

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015-2035



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015-2035



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2015



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015-2035**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan Aceh yang mempunyai karakteristik tersendiri;
 - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 dalam Qanun;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2035.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013-2033;
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam 2014-2034
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015-2035.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kota Subulussalam.
4. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Walikota.
5. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Subulussalam sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri atas walikota dan perangkat kota.
7. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam.
10. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam.
11. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Subulussalam yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disebut RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan SKPK yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah rencana pembangunan tahunan SKPK yang merupakan dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

BAH II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJP Daerah Kota Subulussalam tahun 2015-2035 merupakan:

- a. Penjabaran visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun yang mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional;
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAH III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJP Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan RPJM Daerah dari Walikota dan Wakil Walikota Terpilih;
 - b. penyusunan RKPK tahunan;
 - c. penyusunan Renstra SKPK; dan
 - d. penyusunan Renja SKPK.
- (2) Tujuan penetapan RPJP Daerah adalah untuk:
 - a. melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPK, Renstra SKPK, Renja SKPK, dan Perencanaan Penganggaran; dan
 - c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
 - d. BAB IV : ARAN KEBIJAKAN
 - e. BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) RPJPD Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada perturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 6

- (1) RPJPD dijadikan dasar evaluasi terhadap RPJMD setiap Walikota terpilih dalam jangka 20 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2035.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah Kota Subulussalam, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RPKK untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 2 Januari 2018 M
14 Rabiul Akhir 1439 H



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 3 Januari 2018 M
15 Rabiul Akhir 1439 H



LEMBARAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH : (6/163/2017)

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015-2035**

I. UMUM

RPJPD Kota Subulussalam merupakan salah satu instrumen manajemen pembangunan daerah yang berisi arahan umum pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Subulussalam yang lebih baik.

RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada dan digunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun RPJMD Kota Subulussalam.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selanjutnya Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2035.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN DAN AKRONIM		
ACFTA	:	ASEAN China Free Trade Agreement
AFTA	:	Area Perdagangan Bebas Sabang
AKABA	:	Angka Kematian Balita
AKAP	:	Antar Kota Antar Provinsi
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKDP	:	Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
AKDP	:	Antar Kota Dalam Provinsi
AKI	:	Angka Kematian Ibu
ANC	:	Ante Natal Care
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
ASEAN	:	Association of South East Asia Nation
ASI	:	Air Susu Ibu
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BB/TB	:	Berat Badan per Tinggi badan
BB/U	:	Berat Badan per Umur
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBN-KB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BCG	:	Bacillus Calmette-Guerin
BI	:	Bank Indonesia
BIBD	:	Balai Inseminasi Buatan Daerah
BKPG	:	Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong
BKRA	:	Badan Kesenambungan Rekonstruksi Aceh
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BLUD	:	Balan Layanan Umum Daerah
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP3K	:	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kahutanan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRA	:	Badan Reintegrasi Aceh
BRR	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BTA	:	Basil Tahan Asam
BUMA	:	Badan Usaha Milik Aceh

SINGKATAN DAN AKRONIM		
BUMG	:	Badan Usaha Milik Gampong
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CAR	:	Capital Adequacy Ratio
CAT	:	Cekungan Air Tanah
CDR	:	Case Detection Rate
CPR	:	Contraceptive Prevalence Rate
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Alokasi Khusus
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
Depkeu	:	Departemen Keuangan
DHS	:	Demographic Health Survey
DI	:	Daerah Irigasi
Disbudpar	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dispora	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
DM	:	Diabetes Mellitus
DPRA	:	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPT	:	Difteri, Pertusis dan Tetanus
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HAS	:	Hutan Suaka Alam
HDI	:	Human Development Index
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGS	:	Hak Guna Usaha
HIV/AIDS	:	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
HL	:	Hutan Lindung
HM	:	Hak Milik
HP	:	Hand Phone
HPA	:	Hutan Pelestarian Alam
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
ICOR	:	Incremental Capital Output Ratio
IJSP	:	Industri Jasa Sektor Pertanian
IKK	:	Ibukota Kecamatan
IPHP	:	Industri Pengolahan Hasil Pertanian
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPMP	:	Industri Peralatan Mesin Pertanian

SINGKATAN DAN AKRONIM		
IPTEK	:	Ilmu pengetahuan dan Teknologi
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
IW	:	Indeks Williamson
JTM	:	Jaringan Tegangan Menengah
KANPEL	:	Kantor Pelabuhan
KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
KB	:	Keluarga Berencana
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KK	:	Kepala Keluarga
KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KLDK	:	Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
KP	:	Kuasa Pertambangan
KPI	:	Key Performance Indicators
KPMG	:	Kegiatan Pembangunan Masyarakat Gampong
KSP/USP	:	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
l/dtk	:	liter per detik
LH	:	Lahir Hidup
Linmas	:	Perlindungan Masyarakat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MB	:	Multi Basiler
MBS	:	Manajemen Berbasis Sekolah
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
MDG's	:	Millenium Development Goals
MINERBA	:	Mineral dan Batubara
MoU	:	Memorandum of Understanding
MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MSR	:	Multi Stakeholder Review
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NBM	:	Neraca Bahan Makanan
NPL	:	Non Performing Loan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
ODHA	:	Orang Dengan HIV-AIDS
OTSUS	:	Otonomi Khusus
PAA	:	Pendapatan Asli Aceh

SINGKATAN DAN AKRONIM		
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PB	:	Pausi Basiler
PD PGSI	:	Pengurus Daerah Persatuan Gulat Seluruh Indonesia
PDRB	:	Product Domestic Regional Bruto
Pengda Forki	:	Pengurus Daerah Federasi Olah Raga Karate-do Indonesia
Pengda FPTI	:	Pengurus Daerah Federasi Panjat Tebing Indonesia
Pengda Kodrat	:	Pengurus Daerah Keluarga Olah Raga Tarung Derajat
PER	:	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHBS	:	Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKL	:	Pusat Kegiatan Lokal
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional
PKPN	:	Program Kredit Peumakmue Nanggroe
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PLN	:	Perusahaan Litrik Negara
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTP	:	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal DaLam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMT-AS	:	Pembarian Makanan Tambahan Anak Sekolah
PNPM	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pol WH	:	Polisi Wilayahul Hisbah
PON	:	Pekan Olah Raga Nasional
POPDA	:	Pekan Olah Raga Pelajar Daerah
POPNAS	:	Pekan Olah Raga Pelajar Nasional
PORDA	:	Pekan Olah Raga Aceh
POSPENAS	:	Pekan Olah Raga Siswa Pesantren Nasional
PP	:	Peraturan Pemerintah

SINGKATAN DAN AKRONIM		
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPB-KB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PT	:	Perguruan Tinggi
PTAI	:	Perguruan Tinggi Agama Islam
PTAIS	:	Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta
Pusdalop	:	Pusat Pengendalian Operasi
PWS-KIA	:	Pemantuan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAT	:	Rapat Anggota Tahunan
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RISTEK	:	Riset dan Teknologi
RPJM	:	Rencana Jangka Menengah
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RR	:	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
RSH	:	Rumah Siap Huni
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja

KATA PENGANTAR

Satu hal yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan dimulai dengan perencanaan yang baik, terarah, terukur dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi urgensi sifatnya karena menjadi dasar bagi perumusan berbagai bentuk kebijakan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 sebagaimana isi dalam dokumen ini dilakukan melalui tahapan serta perumusannya dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi potensi yang dimiliki masing-masing daerah serta sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJP ini selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan, yaitu periode 2015-2020; 2020-2025; 2025-2030; 2030-2035 serta menjadi arah bagi para calon kepala daerah dalam merumuskan visi dan misi 5 (lima) tahunan. RPJP Kota Subulussalam yang ditetapkan melalui qanun mengikat seluruh komponen masyarakat, baik itu pemerintah daerah, dunia usaha dan stakeholder lainnya. Substansi RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan.

Perumusan RPJPD ini dilaksanakan atas partisipasi berbagai pihak, terutama dalam pengumpulan data dan informasi, untuk itu atas nama Pemerintah Kota Subulussalam kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. semoga niat baik kerjasama dan kerja keras kita bersama dapat mewujudkan cita-cita bersama yakni mewujudkan Kota Subulussalam yang damai, mandiri, sejahtera dan islami tahun 2035 yang akan datang, semoga Allah Subhana Wata'ala senantiasa meridhoi rencana dan langkah kita bersama, amin.

WALIKOTA SUBULUSSALAM



MERAH SAKTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan	I – 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan.....	I – 2
1.2.1 Maksud	I – 2
1.2.2 Tujuan.....	I – 2
1.3 Landasan Penyusunan	I – 3
1.4 Hubungan Antara Dokumen RPJP Aceh Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I – 4
1.5 Sistematika Penyusunan.....	I – 5
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
2.1 Aspek Geografi dan demografi.....	II - 1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II - 1
2.1.1.1 Letak dan Batas Wilayah Administrasi	II – 1
2.1.1.2 Kondisi Topografi dan Jarak Kampung.....	II – 2
2.1.1.3 Geologi dan Jenis Tanah	II – 6
2.1.1.4 Hidrologi.....	II – 8
2.1.1.5 Klimatologi	II – 11
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	II – 11
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II – 12
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana	II – 14
2.1.2 Demografi	II - 17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 18
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II - 18
2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	II - 18
2.2.1.2 Laju Inflasi	II - 20
2.2.1.3 Pendapatan Perkapita.....	II - 20
2.2.1.4 Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	II - 22
2.2.1.5 Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	II – 22
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II - 23
2.2.2.1 Pendidikan	II - 22
2.2.2.2 Kesehatan	II - 28
2.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia	II - 32
2.2.3 Fokus Dinul Islam, Adat dan Budaya	II - 33
2.2.3.1 Dinul Islam	II - 33
2.2.3.2 Budaya dan Pariwisata	II - 35
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II - 35
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II - 35
2.3.1.1 Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan	II - 35
2.3.1.2 Pendidikan	II - 39

2.3.1.3	Bidang Pendidikan Dayah	II - 44
2.3.1.4	Kesehatan	II - 45
2.3.1.5	Pekerjaan Umum	II - 53
2.3.1.6	Perumahan	II - 59
2.3.1.7	Penataan Ruang	II - 60
2.3.1.8	Perencanaan Pembangunan	II - 60
2.3.1.9	Perhubungan	II - 62
2.3.1.10	Lingkungan Hidup	II - 63
2.3.1.11	Pertanahan.....	II - 66
2.3.1.12	Kependudukan dan Catatan Sipil	II - 66
2.3.1.13	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II - 68
2.3.1.14	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	II - 70
2.3.1.15	Sosial	II - 72
2.3.1.16	Ketenagakerjaan	II - 73
2.3.1.17	Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran	II - 76
2.3.1.18	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	II - 77
2.3.1.19	Kebudayaan	II - 78
2.3.1.20	Kepemudaan dan Olahraga	II - 79
2.3.1.21	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II - 80
2.3.1.22	Ketahanan Pangan	II - 83
2.3.1.23	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II - 85
2.3.1.24	Kearsipan.....	II - 87
2.3.1.25	Komunikasi dan Informatika	II - 87
2.3.1.26	Perpustakaan	II - 88
2.3.2	Fokus Urusan Pilihan	II - 89
2.3.2.1	Pertanian.....	II - 89
2.3.2.2	Kehutanan.....	II - 94
2.3.2.3	Perikanan.....	II - 96
2.3.2.4	Energi dan Sumberdaya Mineral	II - 97
2.3.2.5	Sektor Perdagangan	II - 98
2.3.2.6	Perindustrian	II - 99
2.3.2.7	Ketransmigrasian	II - 100
2.3.2.8	Pariwisata	II - 101
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 102
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II - 102
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	II - 103
2.4.2.1	Aksesibilitas Daerah.....	II - 103
2.4.2.2	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	II - 103
2.4.2.3	Penataan Ruang	II - 104
2.4.2.4	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	II - 106
2.4.2.5	Rasio Ketersediaan Daya Listrik.....	II - 107
2.4.2.6	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik.....	II - 108
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II - 109
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II - 110
2.4.4.1	Ketenagakerjaan	II - 110
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif	II - 111

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III – 1

3.1	Rendahnya Indikator Pembangunan	III – 1
-----	---------------------------------------	---------

3.2	Produktivitas dan Nilai Tambah.....	III – 2
3.3	Infrastruktur yang Terintegrasi	III – 2
3.4	Kualitas Sumber Daya Manusia	III – 3
3.5	Kulaitas Pelayanan Publik.....	III – 3
3.6	Budaya Kreatif Inovatif	III – 3
3.7	Kebencanaan dan Lingkungan Hidup	III – 4
BAB IV. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA SUBULUSSALAM		
	TAHUN 2015-2035	IV-1
4.1	Visi.....	IV – 1
4.2	Misi	IV – 1
BAB V. ARAHAN KEBIJAKAN		
	V – 1	
5.1	Sasaran Pokok Pembangunan.....	V – 1
5.2	Arah Kebijakan.....	V – 2
BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN.....		
	VI – 1	
6.1	Tahapan Pelaksanaan	VI – 1
6.1.1	Tahapan Pembangunan ke-1 (2015-2020) (MDG's, Produksi dan produktivitas).....	VI – 1
6.1.2	Tahapan Pembangunan ke-2 (2020-2025) (SDG's, Agroindustri)	VI – 4
6.1.3	Tahapan Pembangunan ke-3 (2025-2030) (SDG's, Agroindustri, Manufacture).....	VI – 5
6.1.4	Tahapan Pembangunan ke-4 (2030-2035) (Agroindustri, Manufacture, dan Knowledge Base Economy).....	VI – 7
6.2	Prinsip Kaidah Pelaksanaan.....	VI – 8
6.3	Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi	VI – 9
6.3.1	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Subulussalam	VI – 9
6.3.2	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam.....	VI – 10
BAB VII. PENUTUP		
	VII – 1	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Kecamatan, Jumlah Kemukiman Dan Jumlah Kampung Per Kecamatan Dalam Kota Subulussalam Tahun 2013	II-2
Tabel 2.2. Jumlah Kampung Pemekaran Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Subulussalam	II-2
Tabel 2.3. Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan Dan Kondisi Topografi Desa Di Kecamatan Simpang Kiri	II-3
Tabel 2.4. Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan Dan Kondisi Topografi Desa Di Kecamatan Penanggalan	II-3
Tabel 2.5. Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan Dan Kondisi Topografi Desa Di Kecamatan Rundeng	II-4
Tabel 2.6. Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan Dan Kondisi Topografi Desa Di Kecamatan Sultan Daulat	II-5
Tabel 2.7. Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan Dan Kondisi Topografi Desa Di Kecamatan Longkip	II-6
Tabel 2.8. Jenis Penggunaan Lahan Per Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2014	II-12
Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Diperinci Menurut Kecamatan Dalam Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2013	II-17
Tabel 2.10. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-18
Tabel 2.11. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Periode 2009 - 2013	II-19
Tabel 2.12. Perkembangan Nilai Dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Tahun 2009 – 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.....	II-19
Tabel 2.13. Perkembangan Nilai Dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Tahun 2009 – 2013 Atas Dasar Harga Berlaku	II-20
Tabel 2.14. Pendapatan Perkapita Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013 Berdasarkan Harga Konstan	II-21
Tabel 2.15. Pendapatan Perkapita Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013 Berdasarkan Harga Berlaku.....	II-21
Tabel 2.16. Persentase Penduduk Miskin Di Kota Subulussalam Tahun 2011-2013	II-22
Tabel 2.17. Rata – Rata Lama Sekolah Di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013.....	II-24
Tabel 2.18. Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-25

Tabel 2.19. Angka Partisipasi Sekolah Di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013	II-26
Tabel 2.20. Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013	II-27
Tabel 2.21. Angka Putus Sekolah Di Kota Subulussalam Tahun 2012 – 2013	II-27
Tabel 2.22. Angka Kelulusantingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013	II-28
Tabel 2.23. Umur Harapan Hidup Penduduk Kota Subulussalam Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2013	II-29
Tabel 2.24. Jumlah Kelahiran Bayi Berdasarkan Kecamatan Di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-30
Tabel 2.25. Angka Kematian Ibu Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-30
Tabel 2.26. Angka Kejadian Demam Berdarah Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-32
Tabel 2.27. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Golongan Di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-37
Tabel 2.28. Tingkat Pendidikan Aparat PNS Menurut Jenis Kelamin Di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-38
Tabel 2.29. Jumlah Jabatan Struktural Di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-38
Tabel 2.30. Jumlah Produk Hukum Di Kota Subulussalam Periode Tahun 2009 – 2013	II-39
Tabel 2.31. Rasio Ketersediaan Guru SD/Sederajat Dan SLTP/Sederajat Terhadap Murid Per Kecamatan Tahun 2009 – 2013	II-40
Tabel 2.32. Rasio Ketersediaan Guru SLTA/Sederajat Terhadap Murid Per Kecamatan Tahun 2009 – 2013	II-41
Tabel 2.33. Guru Yang Memenuhi Standar Kualifikasi S1/D IV Di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-43
Tabel 2.34. Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-43
Tabel 2.35. Jumlah Dayah/Pesantren, Teungku/Guru Dan Santri Berdasarkan Kecamatan Di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-44
Tabel 2.36. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan Di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-45
Tabel 2.37. Jumlah Dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-46
Tabel 2.38. Jumlah Kasus Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Masing-Masing Puskesmas di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-50
Tabel 2.39. Persentase Akses Sanitasi Dasar di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2012	II-52

Tabel 2.40. Panjang Jalan Di Kota Subulussalam Berdasarkan Kewenangan Tahun 2009 – 2013	II- 53
Tabel 2.41. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Subulussalam Tahun 2009 -2013	II-54
Tabel 2.42. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (. 40 Km/Jam) Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-55
Tabel 2.43. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Di Kota Subulussalam Tahun 2009 -2013	II-56
Tabel 2.44. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-57
Tabel 2.45. Jumlah TPS Yang Diperlukan Berdasarkan Jumlah Penduduk Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-57
Tabel 2.46. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-58
Tabel 2.47. Persentase Rumah Pengguna Air Bersih Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-59
Tabel 2.48. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-61
Tabel 2.49. Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-62
Tabel 2.50. Persentase Penanganan Sampah Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-63
Tabel 2.51. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dikota Subulussalam Tahun 2009 -2013	II-64
Tabel 2.52. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-65
Tabel 2.53. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-66
Tabel. 2.54. Rasio Pasangan Berakte Nikah Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-67
Tabel 2.55. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-67
Tabel 2.56. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-68
Tabel 2.57. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Di Kota Subulussalam.....	II-68

Tabel 2.58. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-69
Tabel 2.59. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kota Subulussalam Tahun 2009 -2013	II-69
Tabel 2.60. Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-70
Tabel 2.61. Cakupan Peserta KB Aktif Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-70
Tabel 2.62. Jumlah PMKS Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-71
Tabel 2.63. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-72
Tabel 2.64. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Subulussalam Tahun 2011 – 2013	II-73
Tabel 2.65. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-74
Tabel 2.66. Pencari Kerja Yang Di Tempatkan Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-74
Tabel 2.67. Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Subulussalam Tahun 2011 – 2013	II-75
Tabel 2.68. Rasio Penduduk Yang Bekerja Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-76
Tabel 2.69. Jumlah Populasi Koperasi Di Kota Subulussalam Tahun 2011 – 2013	II-76
Tabel 2.70. Persentase Koperasi Aktif Di Kota Subulussalam	II-77
Tabel 2.71. Jumlah Industri Pengolahan Dalam Kategori Kecil Dan Menengah Di Kota Subulussalam Tahun 2011 – 2012	II-77
Tabel 2.72. Benda, Situs Dan kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Di Kota Subulussalam Tahun 2011 – 2013	II-78
Tabel 2.73. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Di Kota Subulussalam Tahun 2009 -2013	II-80
Tabel 2.74. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-80
Tabel 2.75. Cakupan Kantor Pemerintahan Desa Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-82
Tabel 2.76. Jumlah Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Perhari Di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-83

Tabel 2.77. Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-84
Tabel 2.78. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kota Subulussalam Tahun 2009 -2013	II-84
Tabel 2.79. Jumlah Posyandu Aktif Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-85
Tabel 2.80. Pelaksanaan Pelatihan Posyantekdes Di Kota Subulussalam Tahun 2011 – 2013	II-86
Tabel 2.81. Jumlah Perpustakaan Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-87
Tabel 2.82. Jumlah Produksi Padi Atau Bahan Pangan Lainnya Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-90
Tabel 2.83. Produktivitas Komoditi Pangan Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-90
Tabel 2.84. Jumlah Produksi Kelapa Sawit, Karet Dan Kakao Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2012	II-91
Tabel 2.85. Produktivitas Kelapa Sawit, Karet Dan Kakao Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2012	II-90
Tabel 2.86. Populasi Ternak Di Kota Subulussalam Pada Tahun 2009 – 2013	II-91
Tabel 2.87. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-92
Tabel 2.88. Persentase Kontribusi Beberapa Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-93
Tabel 2.89. Luas Kawasan Hutan Di Kota Subulussalam Tahun 2014	II-93
Tabel 2.90. Produksi Ikan di Kota Subulussalam	II-95
Tabel 2.91. Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-97
Tabel 2.92. Jenis Usaha Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-98
Tabel 2.93. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-98
Tabel 2.94. Jumlah Jenis Industri Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-99
Tabel 2.95. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-100
Tabel 2.96. Jumlah Transmigrasi Lokal Di Kota Subulussalam Tahun 2012-2013	II-100
Tabel 2.97. Jumlah Kunjungan Wisata Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-101
Tabel 2.98. Kontribusi Sektor Parawisata Terhadap PDRB Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-101
Tabel 2.99. Angka Konsumsi Rata-rata Per Kapita Sebulan Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013	II-102

Tabel 2.100. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-103
Tabel 2.101. Jenis dan Luas Kawasan Lindung di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-104
Tabel 2.102. Jenis dan Luas Kawasan Budidaya di Kota Subulussalam Tahun 2013	II-105
Tabel 2.103. Jenis dan Jumlah Bank Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-106
Tabel 2.104. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-106
Tabel 2.105. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-108
Tabel 2.106. Rasio Kelulusan Pendidikan Tinggi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-110
Tabel 2.107. Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif Di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013	II-110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Subulussalam	II-1
Gambar 2.2. Peta Geologi di Kota Subulussalam	II-7
Gambar 2.3. Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam	II-8
Gambar 2.4. Peta Hidrologi di Kota Subulussalam	II-9
Gambar 2.5. Peta CAT di Kota Subulussalam	II-11
Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam	II-16
Gambar 2.7. Perkembangan IPM Kota Subulussalam, Pemerintah Aceh dan Indonesia	II-33
Gambar 2.8. Peta Kawasan Hutan Kota Subulussalam	II-94
Gambar 2.9. Perbandingan Konsumsi Listrik (Kwh) terhadap Produksi Listrik (Kwh) Kota Subulussalam dan Perkiraan Tahun 2009-2019	II-107
Gambar 2.10. Persentase Rumah Tangga Miskin Desil 1 – 3 (%) terhadap Jumlah Rumah Tangga Yang Belum Menikmati Listrik Kota Subulussalam	II-108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perjalanan historis Subulussalam sebelumnya bernama Banda Baru, yang kemudian diganti menjadi Subulussalam pada tanggal 14 September 1962 oleh seorang ulama kharismatik Alm. Prof. Ali Hasyimi yang menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Aceh. Subulussalam dari bahasa arab memiliki makna “ Jalan Menuju Kedamaian”.

Subulussalam menjadi daerah otonom sejak dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam dari pemekaran Kabupaten Aceh Singkil tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, Kota Subulussalam memiliki 5 kecamatan yaitu Simpang Kiri, Sultan Daulat, Runding, Penaggalan dan Longkip. Khusus nama Kecamatan Sultan Daulat diambil dari nama seorang raja dan pahlawan yang bernama Sultan Daulat.

Moto Kota Subulussalam adalah “Sada Kata” yang artinya “Satu Kata” yang memiliki makna segala sesuatu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Moto ini memberi pesan yang kuat agar masyarakat Kota Subulussalam menanamkan rasa kebersamaan dan tekad kuat untuk membangun Kota Subulussalam.

Dalam kontek kekinian, kesejahteraan yang semakin tinggi dan adil menjadi cita-cita semua pihak. Pemerintah selalu menetapkan azas kesejahteraan tersebut sebagai tujuan akhir pembangunan. Namun, kekhasan tantangan dan faktor-faktor multidimensional selalu dihadapi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sangat penting disiapkan pemerintah untuk memberi arah kebijakan pembangunan yang tepat sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki daerah serta dinamika pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 adalah dokumen perencanaan makro dan berwawasan dua puluh tahun yang memuat maksud dan tujuan, gambaran kondisi umum Aceh, isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Subulussalam untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

Penyusunan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 dilakukan melalui urutan: (1) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; (2) musyawarah perencanaan pembangunan; dan (3) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Selanjutnya, Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004).

Secara normatif, penyusunan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2005-2025 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Subulussalam, DPRK Kota Subulussalam, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan program prioritas dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Subulussalam;
2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Subulussalam, DPRK Kota Subulussalam, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa mendatang; dan

1.2.2. Tujuan

RPJP Kota Subulussalam Aceh Tahun 2015-2035 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Subulussalam dan kabupaten tetangga sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan tercapainya target tujuan pembangunan milenium, pengembangan agroindustri dan industri manufaktur serta peletakan dasar-dasar ekonomi berbasis pengetahuan.

1.3. LANDASAN PENYUSUNAN

Penyusunan RPJP Kota Sublussalam Tahun 2015-2035 berlandaskan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

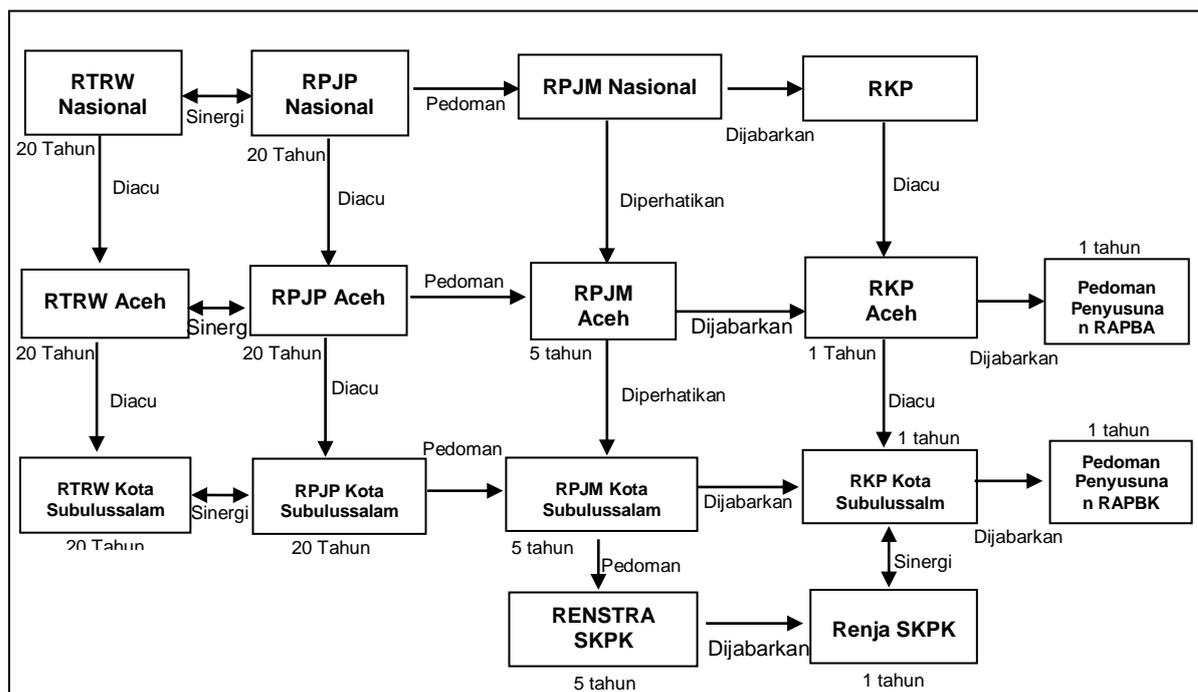
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam dari pemekaran Kabupaten Aceh Singkil;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

1.4. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJP ACEH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Penyusunan RPJP Kota Sublussalam Tahun 2015-2035 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, RTRW Kota Subulussalam, RPJP dan RTRW Nasional, RPJP dan RTRW Provinsi Perbatasan serta RPJP dan RTRW Kabupaten perbatasan.

Gambar 1.1. Hubungan Antara Dokumen RPJP Kota Sublussalam dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



RPJP Nasional, RPJP Aceh dan RPJP Kota Subulussalam harus sinergi. Penelaahan RPJP Nasional dan RPJP Aceh dilakukan untuk menjamin keselarasan kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam dengan kebijakan jangka panjang Aceh dan Nasional. Selanjutnya RTRW Nasional, RTRW Aceh dan RTRW Kota Subulussalam juga harus sinergi. Penelaahan RTRW Nasional dan RTRW Aceh bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah Kota Subulussalam dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya. Penelaahan RTRW Kota Subulussalam untuk menjamin agar arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJP Kota Subulussalam selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional dan RTRW Aceh. RPJP Kota Subulussalam harus memperhatikan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kota Subulussalam.

Penelaahan RTRW provinsi/kabupaten perbatasan bertujuan untuk tercipta sinkronisasi pembangunan jangka panjang antar provinsi/kabupaten, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi/kabupaten perbatasan, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi/kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelaahan RPJP provinsi/kota perbatasan dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam dengan daerah provinsi/kabupaten perbatasan. Hasil telaahan RPJP provinsi/kabupaten perbatasan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi kebijakan dan isu-isu strategis yang dapat menjadi peluang atau tantangan bagi Kota Subulussalam selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang untuk mendukung pertumbuhan regional yang berkualitas, merata dan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015–2035 disusun berdasarkan sistematika penulisan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut.

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB VII : PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

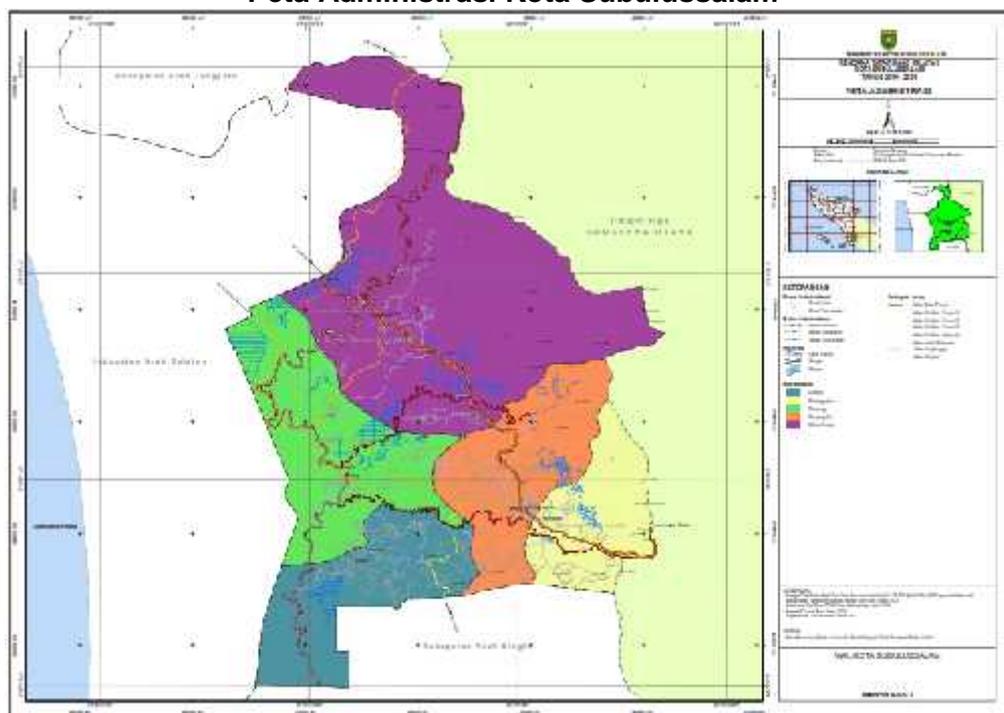
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kota Subulussalam terletak pada posisi 2° 27' 30" - 3° 00' 00" LU dan 97° 45' 00' - 98° 10' 00" BT dengan luas wilayah 118.404,48 Ha (RTRW Kota Subulussalam 2014-2034). Secara administratif, wilayah Kota Subulussalam memiliki konstelasi regional yang berada dibagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara.
3. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
4. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Subulussalam



Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014 - 2034

Pada saat pembentukan pada tahun 2007, Kota Subulussalam terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan 74 kampung/desa yaitu Kecamatan Simpang Kiri (14 kampung),

Kecamatan Penanggalan (10 kampung), Kecamatan Rundeng (23 kampung), Kecamatan Sultan Daulat (17 kampung) serta Kecamatan Longkib (10 kampung). Tahun 2012 terjadi pemekaran kampung sebanyak 8 kampung sehingga totalnya menjadi 82 kampung. Luas kecamatan, jumlah kemukiman dan Kampung berdasarkan kecamatan disajikan pada Tabel 2.1. dan jumlah kampung pemekaran berdasarkan kecamatan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Kampung Per Kecamatan
Dalam Kota Subulussalam Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Kemukiman (Mukim)	Jumlah Kampung	Luas Kecamatan	
				(Ha)	Persen
1	Simpang Kiri	2	17	16.596,00	14,02
2	Penanggalan	1	13	11.612,20	9,81
3	Rundeng	2	23	22.011,25	18,59
4	Sultan Daulat	2	19	52.369,74	44,23
5	Longkib	1	10	15.815,29	13,36
Kota Subulussalam		8	82	118.404,48	100,00

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Tabel 2.2
Jumlah Kampung Pemekaran berdsarkan Kecamatan dalam Kota Subulussalam

No	Kecamatan	8 Kampung Pemekaran	Kemukiman
1	Simpang Kiri	1. Kampung Subulussalam Timur 2. Kampung Belegen Mulia 3. Kampung Danau Tras	1. Kemukiman Kombih 2. Kemukiman Belegen
2	Rundeng		1. Kemukiman Kuala Kepeng 2. Kemukiman Binanga
3	Sultan daulat	1. Kampung Batu Napal 2. Kampung Jabi-jabi Barat	1. Kemukiman Batu-batu 2. Kemukiman Pasil Belo
4	Penanggalan	1. Kampung Dasan Raja 2. Kampung Penanggalan Timu 3. Kampung Penanggalan Barat	Kemukiman Penanggalan
5	Longkib	-	Kemukiman Longkib

2.1.1.2. Kondisi Topografi dan Jarak Kampung

Kondisi topografi dan jarak kampung/desa pada masing – masing kecamatan bervariasi, seperti dijelaskan berikut:

- Keadaan topografi Kecamatan Simpang Kiri pada umumnya datar, hanya dua desa saja yang sebagian besar keadaan topografinya berbukit yaitu Desa Sekelondang dan Desa Subulussalam Barat. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari Ibukota Kecamatan Simpang Kiri (Desa Subulussalam) adalah Desa Makmur Jaya sejauh 11,40 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Subulussalam Timur sejauh 0,17 km. Secara umum semua desa di Kecamatan Simpang Kiri sangat mudah untuk

dijangkau dengan semua jenis kendaraan. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa di Kecamatan Simpang Kiri dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3
Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa
di Kecamatan Simpang Kiri

No	Kampong	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Topografi
1	Buluh Dori	7,43	Datar
2	Kuta Cepu	7,87	Datar
3	Lae Oram	1,75	Datar
4	Makmur Jaya	11,40	Datar
5	Mukti Makmur	10,13	Datar
6	Pasar Panjang	9,07	Datar
7	Pegayo	1,31	Datar
8	Sikelondang	4,19	Berbukit
9	Subulussalam Barat	1,89	Berbukit
10	Subulussalam (Pusat Kecamatan)	-	Datar
11	Subulussalam Selatan	2,44	Datar
12	Subulussalam Utara	1,11	Datar
13	Suka Makmur	4,67	Datar
14	Tangga Besi	3,38	Datar
15	Danau Tras	2,00	Datar
16	Belegen Mulia	1,75	Datar
17	Subulussalam Timur	0,17	Datar

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

- Keadaan topografi Kecamatan Penanggalan pada umumnya berbukit-bukit, hanya lima desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu Desa Lae Motong, Desa Cepu, Desa Penanggalan, Desa Dasan Raja dan Desa Penanggalan Timur. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan Penanggalan (Desa Penanggalan) adalah Desa Lae Ikan sejauh 8,06 Km. Desa Lae Ikan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pak-Pak Barat (Provinsi Sumatera Utara). Desa yang terdekat dengan ibukota Kecamatan adalah Desa Dasan Raja dan Penanggalan Barat sejauh 0,5 Km. Kecamatan Penanggalan merupakan andalan Pemerintah Kota Subulussalam sebagai pintu gerbang masuk ke provinsi Aceh wilayah barat. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa di Kecamatan Penanggalan disajikan pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4
Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa
di Kecamatan Penanggalan

No	Kampung	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Topografi
1	Cepu	2,15	Datar
2	Jontor	6,13	Berbukit
3	Kampung Baru	4,27	Berbukit
4	Kuta Tengah	3,37	Berbukit
5	Lae Ikan	8,06	Berbukit
6	Lae bersih	2,97	Berbukit
7	Lae Motong	7,20	Datar
8	Penanggalan	1,69	Datar
9	Penuntungan	4,24	Berbukit
10	Dasan Raja (Pusat Kecamatan)	-	Datar
11	Sikelang	5,24	Berbukit
12	Penanggalan Barat	0,50	Berbukit
13	Penanggalan Timur	1,00	Datar

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

3. Keadaan topografi Kecamatan Rundeng pada umumnya datar, dengan ketinggian rata-rata hanya 20 mdpl dan hampir semua desa di Kecamatan Rundeng berada di pinggir sungai. Geruguh merupakan desa yang paling jauh dari ibukota kecamatan (Desa Pasar Rundeng) yang berjarak 29,04 km. Transportasi yang digunakan untuk menjangkau setiap desa di Kecamatan Rundeng umumnya menggunakan transportasi air berupa sampan, kapal boat atau sejenisnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang belum baik atau sebahagian besar badan jalan belum beraspal (jalan tanah). Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa di Kecamatan Rundeng disajikan pada **Tabel.2.5**.

Tabel 2.5
Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa
di Kecamatan Rundeng

No	Kampung	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Topografi
1	Belukur Makmur	2,34	Datar
2	Dah	8,33	Datar
3	Geruguh	29,04	Datar
4	Harapan Baru	6,05	Datar
5	Kampung Badar	8,57	Datar
6	Kuala Kepeng	26,73	Datar
7	Kuta Beringin	7,43	Datar
8	Lae Mate	10,26	Datar
9	Lae Pamualan	2,15	Datar

No	Kampung	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Topografi
10	Mandilam	15,56	Datar
11	Muara Batu-batu	0,8	Datar
12	Oboh	6,89	Datar
13	Panglima Saman	1,18	Datar
14	Sepadan	10,86	Datar
15	Pasar Rundeng (Pusat Kecamatan)	-	Datar
16	Sibuasan	7,88	Datar
17	Sibungke	5,12	Datar
18	Siperkas	10,6	Datar
19	Suak Jampak	26,58	Datar
20	Tanah Tumbuh	21,01	Datar
21	Teladan Baru	5,5	Datar
22	Tualang	15	Datar
23	Binanga	2	Datar

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

4. Keadaan topografi Kecamatan Sultan Daulat pada umumnya berbukit-bukit, hanya enam desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu, Desa Pulo Kedep, Suka Maju, Jambi Baru, Singgersing, Pasir Belo serta Jabi-Jabi, dengan ketinggian rata-rata antara 10 meter sampai 350 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Lae Simolap yaitu sejauh 23,10 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Gunung Bakti yaitu sejauh 1,16 Km. sebagian kecil letak desa yang ada di Kecamatan Sultan Daulat terletak di pinggiran sungai. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa di Kecamatan Sultan Daulat disajikan pada **Tabel.2.6**.

Tabel 2.6
Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa di Kecamatan Sultan Daulat

No	Kampung	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Topografi
1	Bawan	6,01	Berbukit
2	Bunga Tanjung	12,51	Berbukit
3	Cipari-pari	21,16	Berbukit
4	Cipari-pari Timur	18,80	Berbukit
5	Darul Makmur	5,62	Berbukit
6	Gunung Bakti	1,16	Berbukit
7	Jabi-jabi	5,62	Datar
8	Lae Langge	8,69	Berbukit
9	Lae Simolap	23,10	Berbukit
10	Namo Buaya	15,35	Berbukit
11	Pasir Belo	9,62	Datar
12	Pulo Belen	3,12	Berbukit

No	Kampung	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Topografi
13	Pulo Kedep	3,06	Datar
14	Sigrun	5,54	Berbukit
15	Singgering	6,67	Datar
16	Suka Maju	3,08	Datar
17	Jambi Baru (Pusat Kecamatan)	-	Berbukit
18	Batu Napal	8,00	Berbukit
19	Jabi-jabi Barat	5,00	Berbukit

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

5. Keadaan topografi Kecamatan Longkib umumnya berbukit, hanya tiga desa yang topografinya datar yaitu Desa Longkib, Panji dan Sepang. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Sepang yaitu sejauh 16,97 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Lae Saga sejauh 5,30 Km dari Darul Aman (Ibukota Kecamatan). Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa di Kecamatan Longkib disajikan pada **Tabel.2.7**.

Tabel 2.7
Jarak desa ke Ibukota Kecamatan dan Kondisi Topografi Desa di Kecamatan Longkib

No	Kampung	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Topografi
1	Bangun Sari	6,55	Berbukit
2	Bukit Alim	16,59	Berbukit
3	Darussalam	8,34	Berbukit
4	Lae Saga	5,30	Berbukit
5	Longkib	19,8	Datar
6	Panji	7,74	Datar
7	Rantau Panjang	16,21	Berbukit
8	Sepang	16,97	Datar
9	Sikerabang	10,34	Berbukit
10	Darul Aman (Pusat Kecamatan)	-	Berbukit

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

2.1.1.3. Geologi dan Jenis Tanah

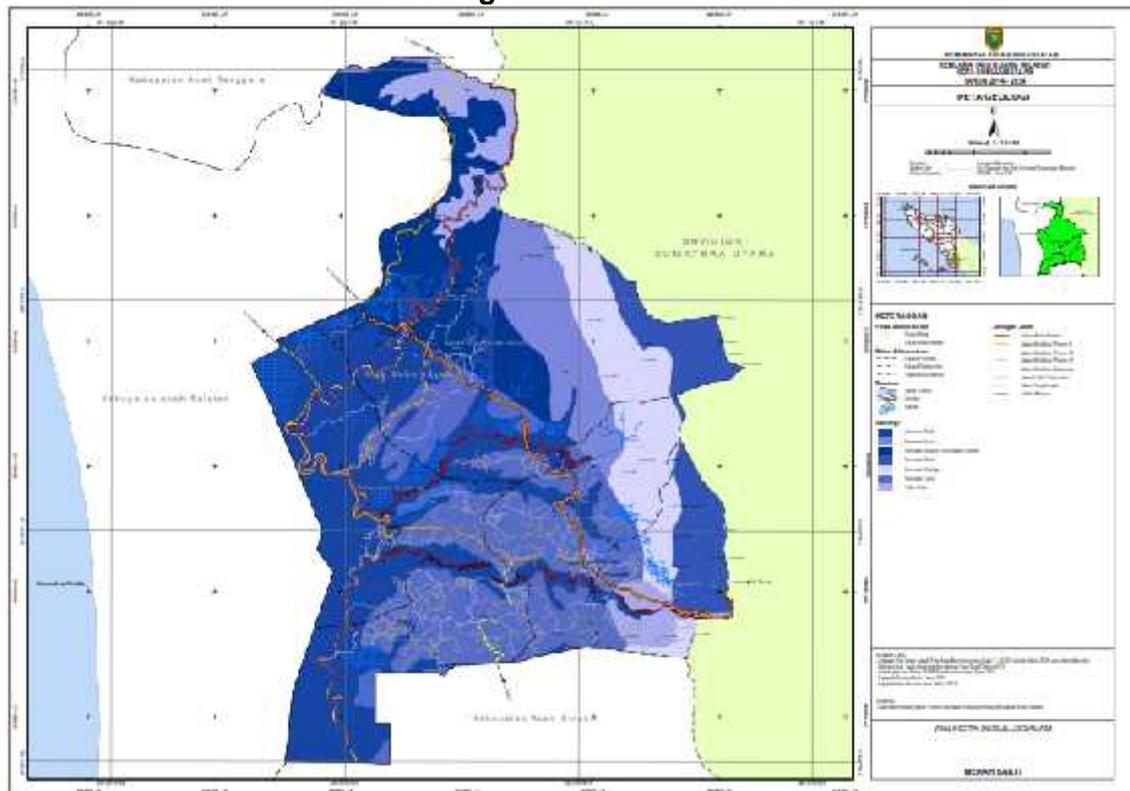
A. Geologi

Ditinjau dari struktur geologis, Kota Subulussalam memiliki struktur geologi yang terdiri atas arenite sandstone, boulder-sandstone, conglomerate, sandstone, tuff, volcanic rock. Dari beragamnya struktur geologis tersebut, Kota Subulussalam didominasi oleh struktur geologi conglomerate. Sedangkan struktur geologi yang memiliki komposisi terkecil adalah tuff.

Struktur arenite sandstone mendominasi di wilayah perbukitan di bagian timur Kota Subulussalam beserta dengan struktur sandstone, yaitu di Kecamatan Penanggalan. Struktur conglomerate yang mendominasi struktur geologi Kota Subulussalam tersebar di

seluruh kecamatan, dengan dominasi pada Kecamatan Simpang Kiri. Komposisi tuff dan volcanic rock mendominasi di bagian utara pada areal hutan yakni di Kecamatan Sultan Daulat. Sementara komposisi boulder-sandstone mendominasi areal di samping sungai-sungai yang melintasi Kota Subulussalam, terutama sungai Lae Kombih, Lae Soraya, Lae Belegen, dan Lae Batu – batu. Selanjutnya peta geologi Kota Subulussalam dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.

Gambar 2.2
Peta Geologi di Kota Subulussalam

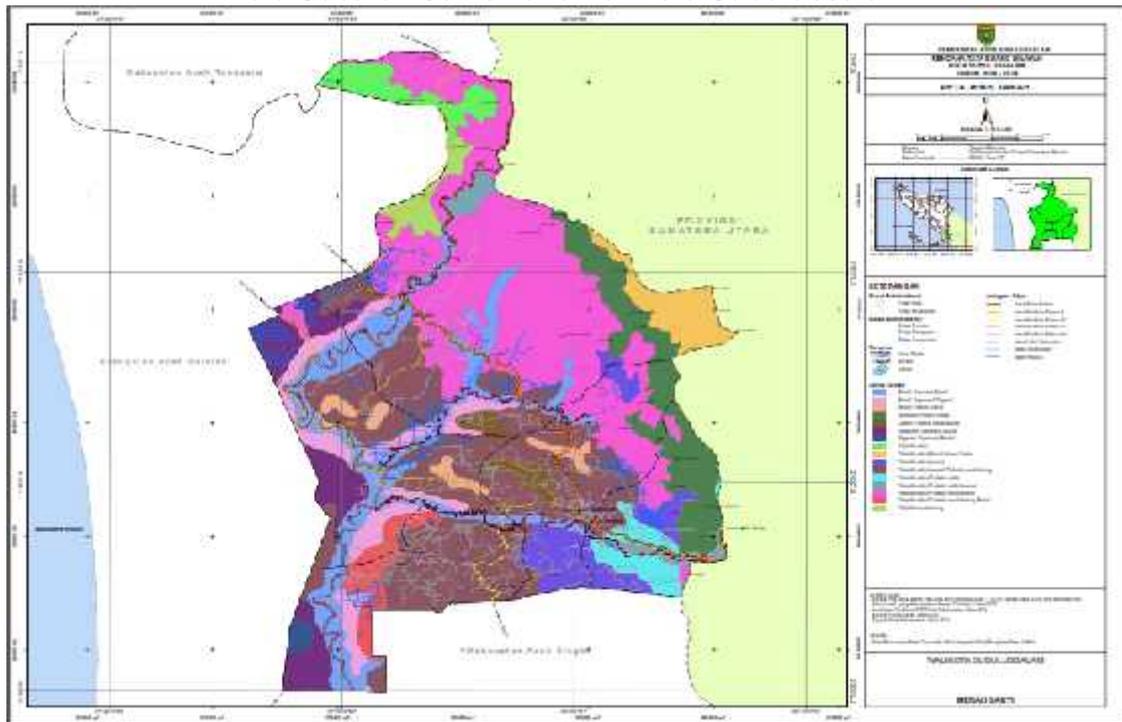


Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

B. Jenis Tanah

Kota Subulussalam memiliki berbagai jenis tanah yang didominasi oleh *komplek podsolik coklat dan podsolik Merah Kuning (PMK)* seluas 31.572,39 Ha (26,66 %) dari luas total wilayah Kota Subulussalam (118.404,48 Ha). Selanjutnya wilayah ini didominasi oleh kompleks podsolik coklat, latosol dan PMK seluas 28.390,72 Ha (23,97 %) dan kompleks aluvial, grumosol dan aluvial seluas 13.462,84 Ha (11,37 %). Distribusi jenis tanah di Kota Subulussalam dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.

Gambar 2.3
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam



Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Jenis tanah PMK mendominasi pada wilayah utara dan timur Kota Subulussalam, sementara jenis tanah Organosol dan Glei Humus mendominasi jenis tanah di wilayah selatan dan barat Kota Subulussalam. Adapun karakteristik khas jenis tanah di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

- a. Podsolik Merah Kuning (PMK) memiliki karakteristik tekstur tanah liat, porositas jelek dan mudah larut. Kandungan bahan organik dan unsur hara pada jenis tanah ini umumnya rendah. Permeabilitas tanah sedang hingga agak lambat, serta memiliki daya menahan air yang kurang baik serta peka terhadap erosi.
- b. Organosol tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dengan bahan organik. Ketebalan minimum 40 cm dan paling sedikit mengandung 30% bahan organik atau lebih 20% bila berpasir. Warna tanah gelap, pH rendah, drainase terhambat sampai sangat terhambat. Bila hendak digunakan untuk pertanian memerlukan drainase/irigasi.
- c. Latosol merupakan tanah yang miskin akan zat hara terutama zat Pospat, Kalium dan Nitrogen dan rendah kadar humusnya, struktur tanah teguh dan mantap, tidak plastis (lembut) serta tahan terhadap erosi. Jenis tanah ini dapat diolah untuk pertanian sepanjang tahun.

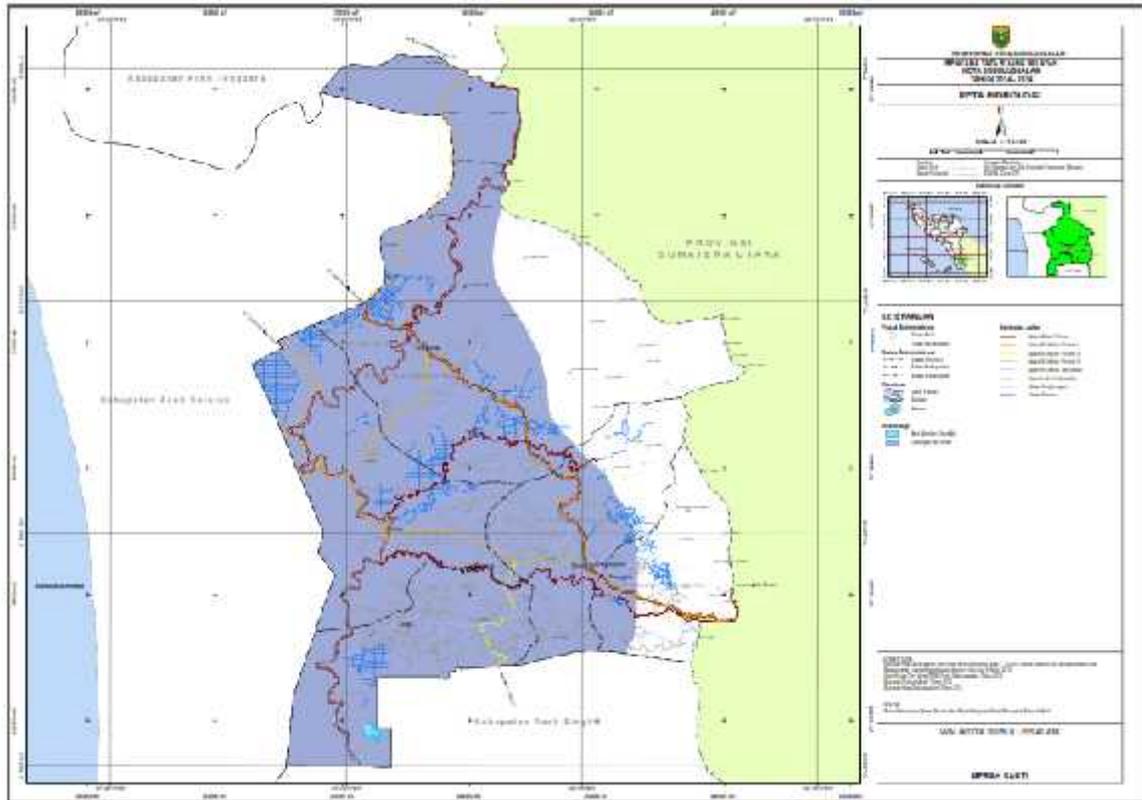
2.1.1.4. Hidrologi

A. Air permukaan

Potensi hidrologi cukup penting untuk menunjang pembangunan, baik untuk kepentingan irigasi, air minum, transportasi maupun untuk kepentingan lainnya. Sumber daya air di Kota Subulussalam meliputi air permukaan (sungai, rawa, danau dan mata air)

dan air tanah yang bersumber dari air artesis. Potensi sumber daya air permukaan Kota Subulussalam bersumber dari sungai Lae Soraya yang memiliki hulu di Lae Alas Aceh Tenggara. Selain Lae Soraya, terdapat beberapa sungai lainnya dengan kapasitas yang lebih kecil serta anak - anak sungai yang tersebar di Kota Subulussalam. Selanjutnya Peta Hidrologi Kota Subulussalam disajikan pada **Gambar 2.4**.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi di Kota Subulussalam



Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Dalam hal pengelolaan Wilayah Sungai (WS) yang melintasi Kota Subulussalam termasuk ke dalam Wilayah Sungai Alas - Singkil yang kewenangan pengelolaannya di bawah koordinasi pemerintah pusat karena sungai tersebut melintasi dua provinsi (Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara). Terdapat 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi Kota Subulussalam, yaitu DAS Lawe Alas, DAS Trumon, DAS Simpang Kanan dan DAS Simpang Kiri. Aliran sungai yang melintasi wilayah Kota Subulussalam berjumlah 8 (delapan) adalah:

1. Sungai Lae Soraya yang merupakan sungai besar yang melintasi Kota Subulussalam di batas barat kota, mengalir dari utara ke selatan melalui Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib hingga Kabupaten Aceh Singkil. Hulu sungai Lae Soraya di Kabupaten Aceh Tenggara dan bermuara di Kabupaten Aceh Singkil.

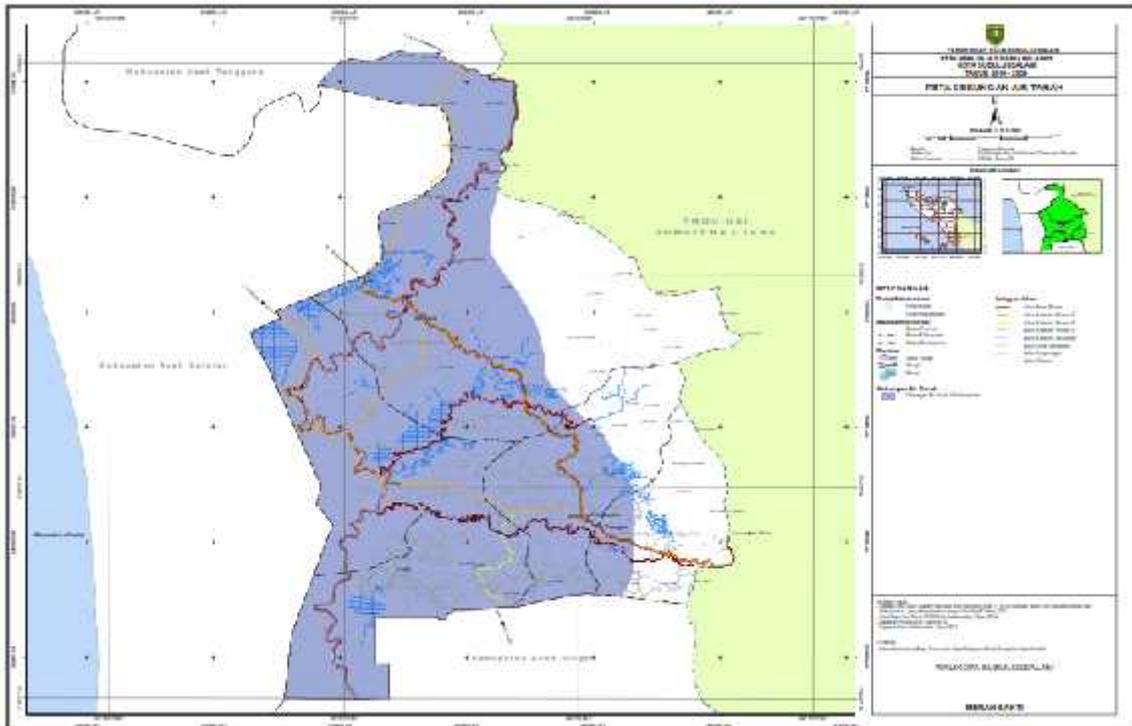
2. Sungai Lae Kombih yang membentang dari timur ke barat kota, mengalir dari Provinsi Sumatera Utara melintasi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng, bermuara pada Sungai Lae Soraya di Kecamatan Rundeng.
3. Sungai Lae Batu - batu mengalir melintasi Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng, memiliki hulu di Kecamatan Sultan Daulat dan bermuara di Lae Belegen menuju Lae Soraya.
4. Sungai Lae Biski yang merupakan hulu dari sungai Lae Batu - batu di Kecamatan Sultan Daulat.
5. Sungai Lae Belegen yang mengalir dari Kecamatan Simpang Kiri menuju Kecamatan Rundeng dan bermuara di Sungai Lae Soraya.
6. Sungai Lae Sarkea yang merupakan daerah hulu, mengalir dari Kecamatan Penanggalan menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
7. Sungai Lae Sireprep yang merupakan daerah hulu di Kecamatan Penanggalan, mengalir menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
8. Sungai Lae Penuntungan di Kecamatan Penanggalan, bermuara di Sungai Lae Sireprep.

Secara umum, karakteristik sungai dan anak sungai yang melintasi Kota Subulussalam merupakan sungai di daerah pegunungan yang alirannya berkelok-kelok. Kerusakan hutan di hulu sungai menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi yang terjadi pada beberapa anak sungai. Hal ini mengakibatkan daya tampung sungai menjadi berkurang dan terjadi genangan di beberapa lokasi. Fenomena banjir sering terjadi pada kondisi curah hujan yang tinggi pada beberapa desa yang berdekatan dengan bantaran sungai di Kota Subulussalam. Di samping itu, kondisi sungai di Kota Subulussalam pada umumnya belum bertanggung juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Di sisi lain, keberadaan sungai - sungai di Kota Subulussalam memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air minum dan perhubungan (transportasi sungai).

a. Air tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. RTRW Kota Subulussalam 2014-2034 memberikan informasi CAT di Kota Subulussalam seluas 86.079,88 Ha meliputi kecamatan rundeng seluas 22.011,25 Ha, Kecamatan Penanggalan seluas 2.473,83 Ha, Kecamatan Longkib seluas 12.815,29 Ha, Kecamatan Sultan Daulat seluas 34.629,66 Ha, Kecamatan Simpang Kiri seluas 11.149, 85 Ha. Selanjutnya peta CAT dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.

Gambar 2.5
Peta CAT di Kota Subulussalam



Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

2.1.1.5. Klimatologi

Informasi tentang iklim di daerah Kota Subulussalam masih sangat terbatas karena belum tersedianya stasion BMKG dan untuk mendapatkan gambaran tentang iklim di wilayah Kota Subulussalam menggunakan data sekunder dari stasiun Klimatologi Kampung Mesjid Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Tahun 2004. Berdasarkan pengamatan yang tercatat, temperatur bulanan disetiap bulannya dengan perbedaan tidak begitu menyolok, yaitu berkisar antara 29,6 - 33,2 °C dengan temperatur udara maksimum mencapai 33,2°C. Kelembaban udara relatif berkisar antara 97 – 100 persen dengan kelembaban maksimum terjadi pada bulan Juli – September dan November – Desember. Kecepatan angin bulanan berkisar antara 50,3 km/hari – 79,1 km/hari serta penyinaran matahari rata-rata bulanan berkisar antara 3 – 6 jam/hari 36 – 73%.

Kedaaan iklim Kota Subulussalam sangat dipengaruhi oleh angin musim yang bertiup dengan kecepatan rendah sampai sedang yang datang dari arah barat laut dan barat daya, dan biasanya akan dimulai pada bulan Nopember sampai bulan Mei, maka iklim yang ditandai dengan keadaan suhu yang relatif tinggi, kelembaban udara tinggi disertai dengan intensitas hujan yang tinggi pula.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Qanun RTRW Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034, luas kawasan lindung

ditetapkan seluas 25.926,93 Ha (21,90%) dan Kawasan Budidaya seluas 92.477,50 Ha (78,10%).

Dari data jenis penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.7, menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Subulussalam untuk hutan lindung seluas 19.275 Ha berada kecamatan Sultan Daulat dan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.713,21 Ha. Tahura Plasma Nutfah Kapur ini direncanakan menjadi pusat penelitian plasma nutfah pohon kapur di provinsi Aceh. Selanjutnya kawasan budidaya didominasi oleh pertanian lahan kering seluas 32.252,47 Ha, perkebunan besar (HGU) seluas 19.690,45 Ha dan perkebunan rakyat seluas 13.539,76 Ha. Secara lebih rinci penggunaan lahan di Kota Subulussalam disajikan dalam **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8
Jenis Penggunaan Lahan Per-Kecamatan
di Kota Subulussalam Tahun 2014

Penggunaan Lahan	Luas/Area (Ha)					Jumlah
	Longkib	Penanggalan	Rundeng	Simpang Kiri	Sultan Daulat	
KAWASAN LINDUNG:						25.926,93
Hutan Lindung					19.275,00	19.275,00
Suaka Marga Satwa Rawa Singkil	2.447,28		697,60			3.144,88
Tahura Plasma Nutfah Kapur		1.713,21				1.713,21
Danau	123,02					123,02
Tubuh Air	223,95	57,14	700,60	62,96	626,17	1.670,82
KAWASAN BUDIDAYA:						92.477,50
Hutan Produksi		4.369,58		1.534,54	3.687,64	9.591,76
Hutan Produksi Konversi		905,11	137,37	1.599,84	537,99	3.180,31
Perkebunan / HGU	1.478,09	376,36	4.556,29	2.300,48	10.979,23	19.690,45
Perkebunan Rakyat	2.298,52	756,39	4.328,32	3.163,17	2.993,36	13.539,76
Pertanian Lahan kering	4.139,50	2.578,51	8.234,51	6.033,16	11.266,79	32.252,47
Industri (PPKS)		53,67	80,34	19,98	23,52	177,51
Pertambangan Galian C	1,04	1,74	0,30	28,59	1,67	33,34
Sawah	8,54	28,53	15,02	72,98	88,19	213,26
Permukiman	93,98	120,42	208,85	474,65	137,03	1.034,93
Transmigrasi	5.001,36	651,54	3.052,03	1.305,65	2.753,13	12.763,71
Total	15.815,28	11.612,20	22.011,23	16.596,00	52.369,72	118.404,43

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan kota subulussalam harus mengadopsi rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi demikian juga dengan rencana tata ruang Subulussalam. Karena kota Subulussalam terletak pada lokasi yang sangat strategis dengan berbatasan langsung provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. (infrastruktur- infrastruktur yang direncanakan oleh nasional seperti jalan kereta api, pelabuhan laut, terminal barang dan penumpang, merupakan potensi yang harus perhatian pemerintah dalam waktu pendek maupun jangka panjang)

Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, Wilayah Kota Subulussalam terbagi menjadi 4 kawasan yaitu:

1. Kawasan dataran tinggi yang dimulai dari pada ketinggian 50-1000 mdpl. Pola spasial yang terlihat dari peta ketinggian dan kemiringan lahan Kota Subulussalam adalah bahwa ketinggian semakin meningkat dari sisi barat menuju sisi timur. Wilayah dengan ketinggian terbesar terkonsentrasi pada timur kota, khususnya pada Desa Penanggalan dan Sultan Daulat. Morfologi lahan berpegunungan di sebelah timur, kemudian lahan datar sampai dengan bergelombang pada sisi tengah sampai barat wilayah kota.
2. Kawasan timur meliputi Kecamatan Penanggalan. Wilayah ini merupakan daerah wisata (air terjun) dan daerah hutan lindung dan perkebunan daerah ini sebagian besar wilayahnya ialah berbukit-bukit.
3. Kawasan tengah meliputi Ibukota Subulussalam itu sendiri dan Kecamatan Simpang Kiri. Wilayah ini merupakan pusat ibukota Kota Subulussalam, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa serta semua fasilitas pemerintah lainnya.
4. Kawasan barat meliputi Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip, dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri CPO serta daerah yang masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).
 - a. Berdasarkan lintas antar daerah, kondisi wilayah Kota Subulussalam merupakan pintu gerbang keluar masuk dari Aceh bagian barat selatan juga dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Subulussalam dengan Kabupaten Aceh Singkil sebagai kota perkebunan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Selatan sebagai kota perkebunan, penghasil perikanan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai kota perdagangan dan jasa serta pertanian, Kabupaten Nagan Raya sebagai kota perkebunan, Kabupaten Aceh Barat sebagai kota perdagangan dan jasa, perkebunan serta industri, Kabupaten Simeulue sebagai kota perkebunan dan pelabuhan serta Kabupaten Aceh Jaya sebagai kota perkebunan. Kota Subulussalam berkembang secara ilmiah akibat potensi wilayahnya dan Kota Subulussalam berkembang karena lokasi yang berada dijalur regional antara Medan, Sumatera Utara/ke kota di pesisir barat Provinsi Aceh yang mana permintaan akan kegiatan jasa pelayanan dan perdagangan berkembang dengan sendirinya.
 - b. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, Wilayah Kota Subulussalam merupakan termasuk di dalam Kawasan Andalan Meulaboh dan sekitarnya, dengan arah pengembangan dan peningkatan pertanian, perikanan, pertambangan dan perkebunan serta peningkatan pemanfaatan lahan yang kurang produktif dan marginal. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat tersebut, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

1. Wilayah Aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan perkembangan Kota Subulussalam, maka Kota Subulussalam yang terletak pada perbatasan langsung antara Pemerintah Aceh dan Provinsi Sumatera Utara khususnya Kecamatan Penanggalan merupakan wilayah aglomerasi Kota Subulussalam dan Pemerintah Aceh.
2. Wilayah Sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Simpang Kiri, Kota Kecamatan Penanggalan dan Kota Kecamatan Rundeng, Kota Kecamatan Sultan Daulat dan Kota Kecamatan Longkip terletak agak jauh dari kota Subulussalam dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.

Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kebencanaan di Kota Subulussalam tidak dapat terlepas dari sistem kebencanaan Indonesia bahkan dunia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempengan tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, dan sesar atau patahan. Penunjaman di Indonesia juga banyak terdapat patahan aktif seperti Patahan Semangko di Sumatera, Cimandiri di Jawa dan banyak patahan dan sub patahan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya kejadian gempa beserta dampak yang ditimbulkannya yang dapat terjadi secara tiba-tiba harus dapat diantisipasi secara dini kejadiannya, misalkan melalui *hazard warning system* dan optimalisasi upaya mitigasi bencana.

Sebagian besar wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan gempa karena dilalui patahan aktif sesar Semangko yang memanjang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga Selat Sunda. Kota Banda Aceh, Padang, termasuk regional Kota Subulussalam merupakan daerah yang dilalui sesar Semangko. Berdasarkan informasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), wilayah-wilayah tersebut tengah terjadi penumpukan energi yang siap dilepaskan kapan saja. Berdasarkan catatan yang ada selama ini, besar gempa bervariasi antara 5 hingga di atas 7 skala Richter (SR).

Rangkaian gempa di Banda Aceh, Mandailing Natal, Padang, Kepulauan Mentawai dan termasuk yang terjadi di Kota Subulussalam dalam beberapa waktu lalu (6-9-2011) dengan besar gempa sekitar 6,7 SR, juga merupakan akibat akumulasi energi yang terjadi di sepanjang patahan Sumatera yang sangat aktif dengan tingkat pergeseran sekitar 1

centimeter setiap tahun. Ketika terjadi gempa, bangunan-bangunan akan hancur karena ada turunan patahan atau ordo dari patahan Semangko yang besar.

Bencana kegempaan di sebagian wilayah Sumatera Utara dan Barat dan sekitarnya pada hakikatnya dipicu pula oleh adanya patahan-patahan benua yang berdasarkan tinjauan geologi memberikan dorongan kuat di dasar bumi yang menyebabkan gerakan tanah bahkan gempa. Gempa besar punya kecenderungan berulang di jalur patahan Sumatera sebagai hasil pelepasan energi yang menumpuk di patahan.

Kota Subulussalam yang terletak di wilayah barat Sumatera tentunya memiliki resiko bencana gempa bumi yang cukup besar. Berdasarkan identifikasi kerentanan terhadap bencana gempa bumi, secara regional Kota Subulussalam berada pada resiko gempa bumi skala I-V MMI atau setara dengan < 5 skala richter. Sesuai dengan RTRW Kota Subulussalam kawasan rawan bencana alam terdiri dari: 1) rawan longsor dan gerakan tanah; 2) rawan kebakaran; dan 3) kawasan rawan banjir.

A. Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah

Kawasan rawan longsor dan atau gerakan tanah meliputi seluas 107.150,53 ha yang terdiri dari intensitas menengah dan rendah. Kawasan Intensitas menengah terdapat di Kampung Sikelang, Kampung Baru, Kuta Tengah dan Cepu seluas 4.615,60 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan, Kampung Subulussalam, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Pegayo, Suka Makmur, Pasar Panjang dan Mukti Makmur seluas 4.934,09 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri, Kampung Darul Aman seluas 13,45 Ha yang berada di Kecamatan Longkib, Kampung Badar, Harapan Baru dan Teladan Baru seluas 906,37 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng, Kampung Namo Buaya, Singgersing, Darul Makmur Pulo Belen dan Pulo Kedep, Jabi-Jabi, Suka Maju dan Pasir Belo seluas 5.877,48 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

Kawasan dengan intensitas rendah terdapat di Kampung Penanggalan, Lae Mbersih, Penuntungan dan Lae Motong seluas 3.057,81 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan. Kampung Subulussalam Utara, Lae Oram, Tangga Besi, Kuta Cepu, Makmur Jaya, Buluh Dori dan Sikelondang seluas 11.585,32 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri. Kampung Rantau Panjang, Bukit Alim, Sikerabang, Bangun Sari, Lae Saga, Darussalam, Panji, Longkib dan Sepang seluas 15.588,33 Ha yang berada di Kecamatan Longkib. Kampung Siperkas, Kuta Beringin, Oboh, Binanga, Belukur Makmur, Pasar Rundeng, Lae Pamualan, Muara Batu-batu, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Sepadan, Dah, Lae Mate, Mandilam Tualang, Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng, Geruguh dan Suak Jampak seluas 20.513,46 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng. Kampung cipar-pari Timur, Cipar-pari, Lae Simolap, Bunga Tanjung, Jambi Baru, Gunung Bakti, Lae Langge dan Bawan seluas 40.058,92 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

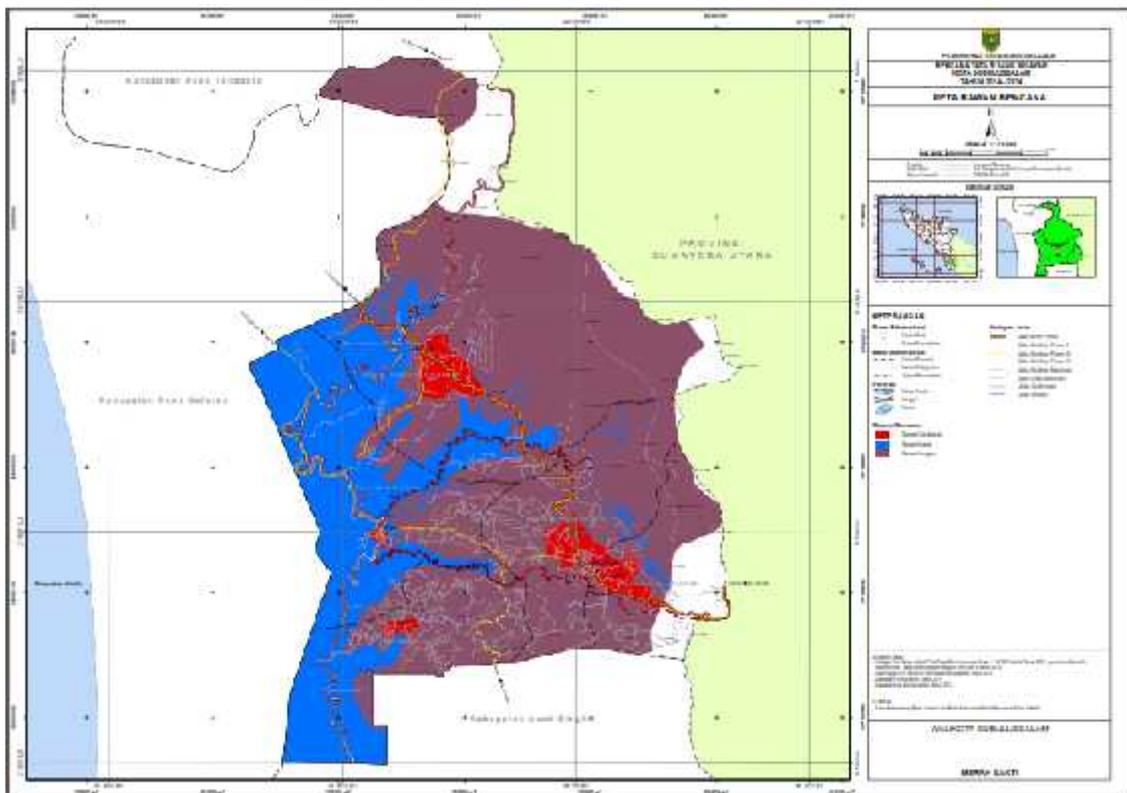
B. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan kebakaran meliputi: 1) Kecamatan Longkib di Kampong Darul Aman, Kecamatan Penanggalan di Kampong Penanggalan, Penuntungan, Lae Mbersih, Cepu, Kuta Tengah, Kampung Baru, Sikelang, Jontor; 2) Kecamatan Rundeng di Kampong Pasar Rundeng, Belukur Makmur; 3) Kecamatan Simpang Kiri di kampong Suka Makmur, Tangga Besi, Subulussalam Selatan, Subulussalam Barat, Subulussalam Utara, Lae Oram, Subulussalam, Pegayo; dan 4) Kecamatan Sultan Daulat di Kampong Gunung Bakti, Jambi Baru, Pulo Belen.

C. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir di Kota Subulussalam menggenangi areal lahan seluas 28.498,49 ha, meliputi: 1) Kecamatan Longkib berada di Kampong Sepang, Longkib, Panji dan Darul Aman seluas 6.555,27 Ha; 2) Kecamatan Rundeng berada di Kampong Siperkas, Kuta Beringin, Oboh, Binanga, Belukur Makmur, Pasar Rundeng, Lae Pamualan, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Dah, Lae Mate, Sepadan, Mandilam, Tualang, Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng, Geruguh dan Suak Jampak seluas 15.653,23 Ha ; dan 3) Kecamatan Sultan Daulat berada di Kampong Lae Simolap, Bunga Tanjung, Jabi-jabi Suka Maju, Sigrun, Pasir Belo, Bawan dan Lae Langge seluas 6.289,99 Ha. Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam disajikan pada **Gambar 2.6**.

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam



Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

2.1.2. Demografi

Tiga hal pokok yang merupakan komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam terbentuknya suatu wilayah adalah: penduduk, tempat/lokasi, dan pemerintahan. Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran masalah suatu wilayah, karena penduduk sebagai suatu objek pokok suatu wilayah merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data Penduduk tahun 2013, jumlah penduduk di Kota Subulussalam berjumlah 72.414 jiwa terdiri dari 36.257 jiwa (50,07 %) laki-laki dan 36.157 jiwa (49,93 %) perempuan. Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Simpang Kiri, yaitu sebesar 29.596 jiwa (40,87 %), jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Longkip, yaitu sebesar 4.656 jiwa (6,43 %) serta rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota Subulussalam sejak tahun 2010-2013 adalah sebesar 2.40 persen. Jumlah penduduk Kota Subulussalam mulai tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan, ini berakibat dari semakin pesatnya laju pertumbuhan pembangunan, yang membuat orang dari luar Kota Subulussalam berdatangan ke Kota ini. Secara rinci jumlah penduduk Kota Subulussalam dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Diperinci Menurut Kecamatan
Dalam Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013

No	Kacamatan	Jumlah Penduduk (Jenis Kelamin)		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
1	Simpang Kiri	14.818	14.778	29.596
2	Penanggalan	6.316	6.298	12.614
3	Rundeng	5.919	5.903	11.822
4	Sultan Daulat	6.872	6.854	13.726
5	Longkip	2.332	2.324	4.656
Jumlah		36.257	36.157	72.414
Tahun 2012		35.596	35.111	70.707
Tahun 2011		34.844	34.146	68.990
Tahun 2010		34.064	33.382	67.446
Tahun 2009		35.961	32.768	68.729

Sumber: Subulussalam Dalam Angka 2014

Jumlah penduduk Kota Subulussalam terus mengalami pertumbuhan, tingkat laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun berfluktuasi dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,33 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk provinsi Aceh sebesar 2,36 persen dan Nasional sebesar 1,49 persen dengan demikian laju pertumbuhan

penduduk Kota Subulussalam masih dikategorikan wajar. Secara rinci persentase laju pertumbuhan penduduk Kota Subulussalam dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2.10
Persentase laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam
Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2013	72.414	2,41
2012	70.707	2,49
2011	68.990	2,29
2010	67.446	-1,87
2009	68.729	0

Sumber: Bappeda (Data olahan), 2014

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Kota Subulussalam merupakan salah satu kota di Aceh yang merupakan gerbang masuk dan keluarnya jalur distribusi barang dan jasa khususnya wilayah pantai barat dan selatan Aceh. Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit produksi dalam suatu daerah selama satu periode tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam suatu periode tertentu.

Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB-ADHK adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kota Subulussalam mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berturut-turut selama lima tahun terakhir dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam berdasarkan PDRB-ADHK senilai 4,50 persen meningkat menjadi 6,03 persen pada tahun 2013. Demikian juga dengan PDRB-ADHB mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata laju pertumbuhan 10,42. Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan mengalami rata-rata laju pertumbuhan yang terbesar masing-masing dengan nilai 10,34 persen dan 10,46 persen dibandingkan dengan sektor lainnya. Di sisi lain sektor pertanian

mengalami rata-rata laju pertumbuhan terendah. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan disajikan pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Periode 2009-2013

Sektor	2009		2010		2011		2012		2013		Rata-rata	
	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
Pertanian	0,81	0,77	0,29	1,85	1,78	5,48	3,43	7,21	3,01	6,65	1,86	4,39
Pertambangan dan Penggalian	6,10	7,29	4,27	7,49	6,11	8,03	6,00	8,42	5,29	8,85	5,55	8,02
Industri Pengolahan	8,04	10,74	9,21	11,77	5,20	7,29	5,38	7,53	5,62	7,11	6,69	8,89
Listrik, Gas dan Air	11,25	19,31	12,95	21,20	6,84	7,21	7,41	12,32	7,05	11,41	9,10	14,29
Konstruksi	2,25	22,15	4,95	15,68	5,83	10,46	6,01	10,37	7,06	14,89	5,22	14,71
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,24	14,25	11,42	19,29	11,13	13,64	9,28	10,72	9,64	12,09	10,34	14,00
Pengangkutan dan Komunikasi	12,75	30,97	12,88	22,68	6,07	8,97	6,01	11,96	7,71	10,46	9,08	17,01
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,21	29,73	10,97	33,45	11,60	33,36	11,31	28,06	11,21	27,98	10,46	30,52
Jasa-Jasa	6,91	13,94	8,98	9,37	6,87	10,75	4,62	7,51	2,24	4,95	5,92	9,30
Laju Pertumbuhan PDRB	4,50	10,81	5,27	11,45	5,67	9,65	5,89	9,60	6,03	10,58	5,47	10,42

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda (data diolah), 2014

Penyumbang terbesar kontribusi PDRB ADHK adalah sektor pertanian dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 42,70 persen selama periode lima tahun. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2009 sebesar Rp. 114.118.840.000 meningkat menjadi sebesar Rp. 124.112.470.000 pada tahun 2013. Sebaliknya sektor listrik, gas dan air memiliki nilai dan kontribusi terendah dibandingkan sektor lainnya. Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB-ADHK Tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.12**.

Tabel 2.12
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sektor	2009		2010		2011		2012		2013	
	Rp (Juta)	%								
Pertanian	114.118,84	46,04	114.449,51	43,86	116.486,08	42,25	120.485,22	41,27	124.112,47	40,09
Pertambangan dan Penggalian	2.795,30	1,13	2.914,55	1,12	3.092,65	1,12	3.278,28	1,12	3.451,69	1,11
Industri Pengolahan	2.887,98	1,17	3.154,00	1,21	3.317,98	1,20	3.496,54	1,20	3.693,13	1,19
Listrik, Gas dan Air	703,75	0,28	794,9	0,30	849,28	0,31	912,18	0,31	976,48	0,32
Konstruksi	34.652,99	13,98	36.369,05	13,94	38.489,12	13,96	40.802,47	13,98	43.682,59	14,11
Perdagangan, Hotel dan Restoran	66.504,73	26,83	74.100,47	28,40	82.345,05	29,87	89.988,33	30,82	98.664,74	31,87
Pengangkutan dan Komunikasi	13.953,79	5,63	15.751,25	6,04	16.707,31	6,06	17.711,03	6,07	19.077,32	6,16
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2.337,65	0,94	2.594,20	0,99	2.895,11	1,05	3.222,66	1,10	3.583,94	1,16
Jasa-Jasa	9.902,68	4,00	10.791,89	4,14	11.533,20	4,18	12.066,34	4,13	12.336,41	3,98
Total PDRB	247.857,71	100,00	260.919,82	100,00	275.715,78	100,00	291.963,05	100,00	309.578,77	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda (data diolah), 2014

Selanjutnya nilai dan kontribusi sektor terhadap PDRB-ADHB juga mengalami pertumbuhan positif. Kontribusi sektor terbesar terhadap PDRB-ADHB juga sektor pertanian dengan rata-rata kontribusi sebesar 35,60 persen selama periode 2009-2013. Sebaliknya

sektor listrik, gas dan air memiliki nilai dan kontribusi terendah dibandingkan sektor lainnya. Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB-ADHB Tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.13**

Tabel 2.13
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Tahun 2009-2013
Atas Dasar Harga Berlaku

Sektor	2009		2010		2011		2012		2013	
	Rp (Juta)	%								
Pertanian	127.153,18	39,70	129.510,16	36,28	136.601,79	34,90	146.457,38	34,14	156.196,25	32,93
Pertambangan dan Penggalian	3.257,21	1,02	3.501,20	0,98	3.782,52	0,97	4.101,02	0,96	4.464,04	0,94
Industri Pengolahan	3.398,99	1,06	3.799,09	1,06	4.076,21	1,04	4.383,35	1,02	4.694,82	0,99
Listrik, Gas dan Air	944,58	0,29	1.144,81	0,32	1.227,39	0,31	1.378,55	0,32	1.535,85	0,32
Konstruksi	62.523,21	19,52	72.325,18	20,26	79.891,12	20,41	88.174,79	20,56	101.301,01	21,36
Perdagangan, Hotel dan Restoran	83.252,94	25,99	99.310,25	27,82	112.856,85	28,84	124.953,21	29,13	140.062,10	29,53
Pengangkutan dan Komunikasi	23.052,85	7,20	28.281,71	7,92	30.817,36	7,87	34.501,82	8,04	38.109,42	8,03
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	3.334,20	1,04	4.449,58	1,25	5.933,80	1,52	7.599,12	1,77	9.725,27	2,05
Jasa-Jasa	13.360,79	4,17	14.613,35	4,09	16.184,97	4,14	17.400,84	4,06	18.262,96	3,85
Total PDRB	320.277,95	100,00	356.935,33	100,00	391.372,01	100,00	428.950,08	100,00	474.351,72	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda (data diolah), 2014

Pertumbuhan ekonomi yang sehat akan selalu diikuti dengan perbaikan indikator lainnya seperti indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi jika pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan perbaikan kesejahteraan, maka pemerintah harus mengambil langkah efektif dengan menjalankan program yang tepat sasaran seperti melakukan peningkatan peran masyarakat lokal terhadap kegiatan-kegiatan padat karya serta meningkatkan pendidikan agar diharapkan nanti generasi Kota Subulussalam memiliki daya saing dan kompetitif. Lain dari pada itu sektor infrastruktur juga harus dimaksimalkan pembangunannya sehingga nilai tambah ekonomi sepenuhnya akan dinikmati oleh penduduk kota Subulussalam.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Informasi resmi laju inflasi di Kota Subulussalam sampai saat ini belum tersedia. Badan Pusat Statistik hanya memberikan data inflasi Aceh untuk tiga Kota acuan yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh. Badan Pusat Statistik (2014) memberikan informasi inflasi yang terjadi pada bulan Juli 2014 di kota Banda Aceh sebesar 1,23 persen dan di Kota Lhokseumawe sebesar 1,34 persen serta di Kabupaten Aceh Barat (Kota Meulaboh) sebesar 2,41 persen sehingga secara agregat di provinsi Aceh terjadinya inflasi sebesar 1,41 persen.

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Tabel 2.14 dan **Tabel 2.15** menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB perkapita selama periode 2009-2013 atas dasar harga konstan sebesar 2,98 persen dan atas dasar harga berlaku sebesar 7,81 persen. Rata-rata PDRB perkapita selama periode 2009-2013 atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4.005.980/tahun dan atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 5.688.301/tahun. Sedangkan kenaikan PDRB perkapita dari tahun 2009 sampai tahun 2013 atas dasar harga konstan hanya sebesar Rp. 514.575 dan atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 1.691.230. kondisi ini masih jauh di bawah pendapatan perkapita Nasional atas dasar harga konstan sebesar 1,8 Juta dan atas dasar harga berlaku sebesar 11,5 juta.

Tabel 2.14
Pendapatan Perkapita Kota Subulussalam Tahun 2009-2013
Berdasarkan Harga Konstan

Pendapatan Perkapita	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
PDRB Non Migas (Rp)	247.857.720.000	260.919.810.000	275.715.780.000	291.963.050.000	309.578.770.000
Jumlah Penduduk (Jiwa)	65.910	67.446	68.990	70.707	72.414
Pendapatan Perkap-Non Migas (Rp)	3.760.548	3.868.573	3.996.460	4.129.195	4.275.123
Laju Pertumbuhan	1,89	2,87	3,31	3,32	3,53

PDRB atas harga berlaku dan konstan memperlihatkan bahwa adanya peningkatan setiap tahunnya namun masih tergolong lamban. Prospek PDRB perkapita pada masa yang akan datang cenderung meningkat, hal ini dikarenakan perkembangan sektor non migas seperti sektor perkebunan, industri dan perdagangan semakin membaik.

Tabel 2.15
Pendapatan Perkapita Kota Subulussalam Tahun 2009-2013
Berdasarkan Harga Berlaku

Pendapatan Perkapita	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
PDRB Non Migas (Rp)	320.277.940.000	356.935.310.000	391.372.010.000	428.950.080.000	474.351.720.000
Jumlah Penduduk (Jiwa)	65.910	67.446	68.990	70.707	72.414
Pendapatan Perkap-Non Migas (Rp)	4.859.322	5.292.164	5.672.880	6.066.585	6.550.552
Laju Pertumbuhan	8,04	8,91	7,19	6,94	7,98

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang, pertumbuhan sektor-sektor non migas di Kota Subulussalam perlu terus didorong agar dapat meningkat, terutama sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

2.2.1.4. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan mengevaluasi Rasio Gini yang memiliki kisaran nilai 0 - 1. Jika bernilai nol artinya pemerataan sempurna dan sebaliknya jika bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Indeks Gini Kota Subulussalam tahun 2009-2012 cenderung konstan berkisar antara 0,29 sampai dengan 0,31. Hal ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah dan juga berarti bahwa pendapatan perkapita penduduk Kota Subulussalam relatif merata.

2.2.1.5. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga dengan dimensi-dimensi lain diluar ekonomi. Namun selama ini kemiskinan sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, yang mana semuanya berada dalam lingkup dimensi ekonomi.

Tabel 2.16 menunjukkan bahwa selama periode 2011-2013 jumlah tingkat kemiskinan di Kota Subulussalam mengalami penurunan. Rata-rata penurunan tingkat kemiskinan tersebut sebesar 1,05 persen. Jumlah penduduk miskin Kota Subulussalam rata-rata berkurang sebanyak 341 orang pertahun. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Subulussalam menunjukkan bahwa adanya keseriusan pimpinan daerah dalam penanggulangan kemiskinan daerah, yakni dengan melahirkan program-program dan kegiatan yang *pro poor* sesuai dengan sasaran MDGs yang bahwa dengan rata-rata penurunan diatas 1 persen pertahun Kota Subulussalam sudah masuk kedalam kategori target MDGs dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Tingkat kemiskinan Kota Subulussalam masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi Aceh.

Tabel 2.16
Persentase Penduduk Miskin Di Kota Subulussalam
Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	238.423	259.680	241.189
Jumlah Penduduk	68.990	70.707	72.414
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	16.502	16.001	14.982
Persentase Penduduk Miskin	23,92	22,63	20,69
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Aceh	894.800	909.000	840.700
Persentase Penduduk Miskin Aceh	19,46	19,37	17,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam 2014

Badan Pusat Statistik Tahun 2013 memberikan informasi jumlah Rumah Tangga (RT) di Kota Subulussalam sebanyak 15.152 RT. Jumlah rumah tangga yang tergolong miskin sebesar 4.988 RT (32,90 %). Distribusi jumlah Rumah Tangga miskin tahun 2012 di Kota Subulussalam untuk masing kecamatan adalah: 1) Kecamatan Sultan Daulat (1.567 RT), Simpang Kiri (1.323 RT), Rundeng (1.252 RT), Penanggalan (522 RT) dan Kecamatan Longkip (324 RT).

Menurunnya tingkat kemiskinan di Kota Subulussalam diduga sebagai dampak dari meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam dinamika pembangunan, terutama di sektor pertanian selama beberapa tahun terakhir. Membaiknya harga beberapa komoditi pertanian diduga telah ikut memotivasi aktivitas usaha tani di pedesaan. Disamping itu program-program pembangunan yang dialokasikan khusus di kawasan pedesaan seperti PNPM Mandiri, BKPG, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian diduga ikut memberi pengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan.

Walaupun kegiatan-kegiatan pembangunan terus secara gencar dilakukan, belumlah bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Subulussalam secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan memerlukan sebuah strategi jitu untuk meminimalkan jumlah masyarakat miskin, salah satu strategi tersebut adalah dengan mensinergikan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui unsur dinas/badan dan kantor dilingkungan Pemerintah kota Subulussalam yang dapat melahirkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas pangan, hak atas layanan kesehatan, hak atas layanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih dan sanitasi yang baik, hak atas tanah, hak atas sumberdaya alam, hak atas rasa aman dan hak atas berpartisipasi.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1. Pendidikan

A. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk: 1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media; dan 3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan

kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan keseluruhan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam 2014, memberikan informasi secara berturut-turut dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu: 96,53 persen (2009); 96,54 persen (2010); 96,55 persen (2011); 96,55 persen (2012); dan 96,57 persen (2013). Dari gambaran tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan AMH penduduk Kota Subulussalam dari tahun ke tahun dengan rata-rata kenaikan persentase AMH selama periode 2009-2013 sebesar 0,01 persen. Persentase penduduk (usia 15 tahun ke atas) yang tidak melek huruf atau belum bisa baca tulis pada akhir tahun 2013 sebesar 3,43 persen. Penduduk yang tidak melek huruf atau belum bisa baca tulis didominasi penduduk yang usia lanjut, hal ini disebabkan sebelum pemekaran menjadi Pemerintah Kota daerah ini bisa dikatakan masih terpencil, sehingga untuk mendapatkan akses sarana pendidikan sangat sulit. Pemerintah Kota Subulussalam akan melakukan pemetaan jumlah penyandang buta aksara secara tepat dan akurat, memperluas informasi dan sosialisasi tentang pentingnya melek huruf, memberdayakan sekolah non formal melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mengembangkan program pendidikan membaca secara inovatif melalui kegiatan diluar sekolah.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama bersekolah mencerminkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau sedang dijalani penduduk usia 25 tahun keatas. Pada usia ini dianggap penduduk sudah menyelesaikan seluruh tingkatan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam dari tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.17**.

Tabel 2.17
Rata-rata Lama Sekolah di Kota Subulussalam
Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,58	7,59	7,61	7,63	7,66

Sumber: Subulussalam dalam Angka 2014

Rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan dari 7,58 tahun (2009) menjadi 7,66 tahun (2013). Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kota Subulussalam belum menamatkan pendidikan dasar 9 tahun atau tamat SLTP.

Rendahnya keinginan dan minat masyarakat di Kota Subulussalam untuk bersekolah terutama di pedesaan menjadi penyebab utama rendahnya rata-rata lama sekolah. Selain itu tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga menyebabkan anak-anak usia sekolah terpaksa menjadi pekerja untuk membantu orang tua. Hal ini menyebabkan semakin banyak anak usia sekolah yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah Kota Subulussalam akan melakukan beberapa kebijakan seperti: memastikan bahwa anak-anak usia sekolah tetap bisa bersekolah; menerapkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun; menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak; menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas dan mempunyai komitmen untuk mencerdaskan masyarakat Kota Subulussalam.

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (jumlah siswa) tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ideal APK adalah nilai 100, yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu sama dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. APK berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.18**.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kota Subulussalam Tahun 2010 – 2013

Tingkat pendidikan	Angka Partisipasi Kasar			
	2010	2011	2012	2013
	(%)	(%)	(%)	(%)
SD/MI Sederajat	118,85	108,67	108,28	114,75
SMP/MTs Sederajat	91,37	100,77	102,78	91,79
SMA/SMK/MA Sederajat	75,76	74,28	74,25	93,75

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.18 menunjukkan bahwa APK tingkat SD sederajat cukup baik (lebih besar dari 100 %). Sedangkan APK tingkat SMP/MTs Sederajat berfluktuasi dan APK tingkat SMA/SMK/MA Sederajat masih di bawah 100 persen. APK tingkat SMP/MTs Sederajat pada tahun 2013 sebesar 91,79 persen bermakna bahwa masih terdapat 8,21 persen jumlah murid di tingkat pendidikan tersebut yang sesuai dengan usia sekolahnya. Selanjutnya APK tingkat SMA/SMK/MA

Sederajat pada tahun 2013 sebesar 93,75 persen mengalami peningkatan dari tahun 2010 dengan APK 75,76 persen. Namun masih terdapat 6,25 persen jumlah murid di tingkat pendidikan tersebut yang tidak berpartisipasi sesuai dengan usia sekolahnya pada tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya siswa yang sekolah pada suatu tingkatan pendidikan tertentu yang tidak menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai dengan masa studinya. Oleh karena itu, program perbaikan mutu guru dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta perbaikan kualitas manajemen pendidikan pada semua jenjang pendidikan sangat diperlukan.

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) Pendidikan Dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia pendidikan dasar dikali 100 persen. APS Pendidikan Menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah dibagi jumlah penduduk usia pendidikan menengah dikali 100 persen. APS di Kota Subulussalam selama periode 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.19**.

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Subulussalam
Tahun 2009 – 2013

Usia	Angka Partisipasi Sekolah				
	2009	2010	2011	2012	2013
7 Tahun s/d 12 Tahun	97,96	99,30	97,21	98,58	98,88
13 Tahun s/d 15 Tahun	91,50	92,67	94,75	91,80	98,30
16 Tahun s/d 18 Tahun	76,64	83,58	70,34	74,63	79,13

Sumber: Subulussalam dalam angka tahun 2010-2014

Tabel 2.19 menunjukkan bahwa, angka partisipasi sekolah ditingkat SD/MI (usia 7 - 12 tahun) cukup baik, meningkat dari 97,96 persen (tahun 2009) menjadi 98,88 persen (tahun 2013). Demikian juga dengan APS di tingkat SMP/MTs (13-15 Tahun) sebesar 91,50 (tahun 2009) meningkat menjadi 98,30 (tahun 2013). Sedangkan APS di tingkat SMA/MA/SMK belum menggembirakan karena masih dibawah nilai APS jenjang pendidikan dasar. Rendahnya APS pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK disebabkan oleh: 1) tuntutan ekonomi sehingga anak usia sekolah tersebut terpaksa bekerja; 2) menikah diusia sekolah karena pengaruh lingkungan; 3) kurangnya motivasi keluarga dan lingkungan untuk menyelesaikan pendidikan; 4) aksesibilitas menuju lokasi sekolah memerlukan biaya tinggi khususnya untuk daerah terluar, terpencil dan terisolir.

E. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah

penduduk berusia 7 hingga 18 tahun dikali 100 persen. APM berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.20**.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni				
	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
SD/MI Sederajat	97,38	98,41	91,73	93,26	95,87
SMP/MTs Sederajat	70,42	76,65	72,00	74,25	77,51
SMA/SMK/MA Sederajat	54,52	62,82	50,79	58,18	67,68

Sumber: Subulussalam dalam Angka tahun 2014

Tabel 2.19 menunjukkan bahwa APM tingkat SD/MI sederajat cukup baik untuk periode 2009-2013 dengan nilai 95,87 persen pada tahun 2013 meskipun berfluktuasi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya APM tingkat SMP/MTs Sederajat dan APM tingkat SMA/SMK/MA Sederajat masih tergolong rendah masing dengan nilai 77,51 persen dan 67,68 persen pada tahun 2013. Rendahnya nilai APM kedua jenjang pendidikan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi nilai APS seperti yang dijelaskan sebelumnya.

F. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persen. Hasil perhitungan angka putus sekolah ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Angka putus sekolah di Kota Subulussalam tahun 2012-2013 disajikan **Tabel 2.21**.

Tabel 2.21
Angka Putus Sekolah di Kota Subulussalam Tahun 2012– 2013

Uraian	Tahun	
	2012	2013
SD/MI	18,30%	9,07%
SMP/MTs	0,68%	0%
SMA/SMK/MA	0%	0%

Sumber: Disdikbudpora Kota Subulussalam tahun 2014

Persentase Angka Putus sekolah Kota Subulussalam berbeda di masing-masing tingkat pendidikan. Di tingkat SD, sejak tahun 2012 sampai tahun 2013, Angka Putus Sekolah menunjukkan angka penurunan yakni 9,23 persen. Ditingkat SMP, dalam 2 tahun terakhir sejak 2012 sampai dengan 2013, hanya pada tahun 2012 terdapat angka putus sekolah yakni sebesar 0,68 persen. Hasil positif dapat dilihat pada tingkat SMA, dengan capaian angka putus sekolah sebesar 0 persen sejak 2012 sampai 2013. Faktor utama yang

menyebabkan siswa putus sekolah berkaitan dengan tuntutan ekonomi, lingkungan sosial, sarana dan prasarana, aksesibilitas, motivasi yang lemah dan komitmen dan ketersediaan guru.

G. Angka Kelulusan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Disdikbudpora Kota Subulussalam, dalam lima tahun terakhir di seluruh tingkatan pendidikan baik SD, SMP maupun SMA, persentase angka kelulusan selalu berada diatas 90 persen. Ditingkat SD, pada tahun 2009 angka kelulusan adalah 99,16 persen dan pada tahun 2013 berada pada angka 99,10 persen. Tahun 2009 angka kelulusan tingkat SMP mencapai 99,50 persen dan pada tahun 2013 turun menjadi 99,40 persen. Namun perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2012 terjadi penurunan angka kelulusan yang cukup signifikan yakni 72,25 persen yang artinya, terdapat sebesar 27,75 persen tidak lulus. Sedangkan pada jenjang SMA, angka kelulusan terus menunjukkan peningkatan, 97,28 persen pada tahun 2009 dan mencapai 100 persen pada tahun 2013. Angka kelulusan tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Subulussalam tahun 2009-2013 sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.22**.

Tabel 2.22
Angka Kelulusan Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
SD/Mi (%)	99,16	99,08	99,74	90,70	99,10
SMP/MTs (%)	99,50	99,24	98,90	72,25	99,40
SMA/SMK/MA (%)	97,28	99,01	99,70	98,27	100

Sumber: Disdikbudpora Kota Subulussalam tahun 2014

Angka kelulusan di dalam profil pendidikan di golongan sebagai indikator mutu pendidikan. Ada 2 faktor yang harus dibenahi dalam upaya meningkatkan angka kelulusan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh kondisi siswa seperti: kecerdasan intelektual, kecemasan, kesiapan mental, bahkan kondisi fisik dan mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya faktor eksternal berupa ketersediaan fasilitas/sarana dan prasarana pendidikan, mutu dan jumlah guru, proses belajar mengajar yang berkaitan dengan ujian nasional

2.2.2.2. Kesehatan

Status kesehatan masyarakat Kota Subulussalam dapat digambarkan melalui beberapa indikator utama, yaitu: umur harapan hidup, angka kematian, status gizi, angka kesakitan, kesehatan lingkungan, dan perilaku.

A. Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur akhir, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Kota Subulussalam belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam menurut jenis kelamin Di Kota Subulussalam tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.23**.

Tabel 2.23
Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam Menurut Jenis Kelamin
Di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013

Uraian	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Laki-Laki	68,83	64	64,78	64,78	64,78
Perempuan	67,71	67,88	68,21	68,21	68,21
AHH	65,71	65,89	66,01	66,01	66,13

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota Subulussalam cenderung meningkat dengan rata-rata 66,13 tahun pada tahun 2013. Bila dibandingkan dengan usia harapan hidup tingkat nasional sebesar 69,43 tahun, AHH Kota Subulussalam masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh pola makan, penyakit bawaan dari lahir, lingkungan tempat tinggal dan stres. Usia Harapan Hidup laki-laki umumnya lebih rendah dari usia harapan hidup perempuan. Angka harapan hidup ini merupakan salah satu indikator menilai derajat kesehatan di suatu daerah dan merupakan salah satu penunjang indeks pembangunan manusia (IPM). Namun jika dibandingkan dengan angka harapan hidup tingkat Kabupaten/Kota seluruh Aceh yang sampai 72 tahun, angka harapan hidup di Kota Subulussalam masih dalam kategori rendah.

B. Angka Kematian

Angka kematian difokuskan pada beberapa indikator kematian utama, yaitu: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi dihitung berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB) dibawah usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Secara umum

angka kematian bayi di Kota Subulussalam mengalami peningkatan. Berdasarkan data profil kesehatan Kota Subulussalam, pada tahun 2011 AKB di Kota Subulussalam sebesar 5,18 per 1000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 2,74 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Angka kematian bayi di Kota Subulussalam termasuk rendah jika dibandingkan dengan target MDGs (15-kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015).

Angka kematian bayi di Kota Subulussalam masih relatif banyak terjadi di daerah pedesaan, pada keluarga miskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan rendah. Kelompok masyarakat inilah umumnya masih mengalami hambatan financial atau sosial kultural untuk akses ke pelayanan kesehatan. Kelompok inilah yang menjadi tantangan utama dalam menurunkan angka kematian bayi. Jumlah kelahiran bayi berdasarkan kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2013 disajikan pada **Tabel 2.24**.

Tabel 2.24
Jumlah Kelahiran Bayi berdasarkan Kecamatan
Di Kota Subulussalam Tahun 2013

Kecamatan	Hidup	Mati	Total
Simpang Kiri	555	-	555
Penanggalan	238	2	240
Rundeng	254	-	254
Sultan Daulat	359	1	360
Longkib	54	1	55
Total	1.460	4	1.464

Sumber: Profil Kesehatan Kota Subulussalam, 2014

2. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100 000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Berikut disajikan dalam tabel jumlah kematian ibu yang melahirkan.

Selama periode 2009-2013 angka kematian ibu di Kota Subulussalam cenderung fluktuatif, akan tetapi bisa dikatakan hampir setiap tahun terjadi kematian ibu saat melahirkan. Bila dirata-ratakan kematian ibu melahirkan selama periode tersebut sebesar 242 per seratus ribu kelahiran hidup atau rata-rata 4 orang. Angka kematian ibu melahirkan terbanyak di Kota Subulussalam terjadi pada tahun 2011 yaitu 518 per seratus ribu kelahiran hidup atau sebanyak 8 orang. Angka kematian ibu di Kota Subulussalam tahun 2009- 2013 sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.25**.

Tabel 2.25
Angka Kematian Ibu di Kota Subulussalam
Tahun 2009- 2013

Uraian	Angka Kematian Ibu				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kematian Ibu melahirkan (org)	4	2	8	3	n/a
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu LH	296	143	518	189	68,5

Sumber: Subulussalam dalam angka, (data diolah)

Beberapa penyebab terjadinya kematian ibu melahirkan secara umum adalah pendarahan pada saat akan melahirkan, hipertensi atau naiknya tekanan darah si ibu yang disebabkan oleh rasa ketakutan pada kelahiran pertama dan pada saat proses partus terlalu lama sehingga menyebabkan si ibu kelelahan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.

C. Status Gizi

Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari – hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Secara umum jumlah balita gizi buruk di Kota Subulussalam mengalami penurunan. Berdasarkan data profil kesehatan Kota Subulussalam, pada tahun 2011 jumlah balita gizi buruk di Kota Subulussalam sebesar 3,3 persen dari 9.255 orang balita; dan turun menjadi 1,1 persen pada tahun 2013.

Masalah gizi umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya ketersediaan pangan, kurang baiknya sanitasi, kurangnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa faktor sosial-budaya sangat berperan dalam proses konsumsi pangan dan terjadinya masalah gizi. Kebiasaan makan keluarga dan susunan hidangannya merupakan salah satu manifestasi kebudayaan keluarga yang disebut gaya hidup. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi.

Akibat gizi buruk pada balita dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Pada tingkat kecerdasan karena tumbuh kembang otak 80% terjadi pada masa dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Pada anak yang pendek (stunted) mempunyai rata-rata score Intelligence Quotient (IQ) 11 poin (UNICEF, 1998), kemudian di perkirakan Indonesia kehilangan 220 juta IQ poin dan menurunkan produktivitas 20-30 persen.

Upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain seperti peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), tatalaksana gizi buruk di puskesmas perawatan dan rumah sakit, serta Kadarzi atau pemberdayaan masyarakat melalui keluarga sadar gizi. Status gizi difokuskan pada status gizi balita yang diukur dari tiga indikator utama, yaitu; prevalensi balita Kekurangan Gizi (gizi buruk dan gizi kurang), balita pendek dan balita kurus serta masalah gizi lainnya.

D. Angka Kesakitan

1. Angka kejadian (*Incident Rate*) DBD

Berdasarkan data profil kesehatan Kota Subulussalam tahun 2014, diketahui bahwasanya Angka Kejadian DBD terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Puncaknya adalah pada tahun 2012, mencapai 18,7 persen, kemudian menurun kembali pada tahun 2013 yakni 8,29 persen. Angka kejadian demam berdarah di Kota Subulussalam tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.26**.

Tabel 2.26
Angka Kejadian Demam Berdarah di Kota Subulussalam
Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Kejadian DBD (%)	2,61	4,0	11,5	18,7	8,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, Tahun 2014

DBD masih menjadi masalah di Kota Subulussalam. Salah satu penyebabnya adalah tingginya mobilitas penduduk ke daerah - daerah dengan tingkat endemisitas tinggi. Oleh sebab itu upaya penanggulangan kasus, pengendalian vektor dan upaya pemutusan rantai penularan harus ditingkatkan dan dioptimalkan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif, yakni dengan cara melakukan sosialisasi kebersihan lingkungan dan tempat tinggal serta upaya pencegahan baik melalui fogging dan 3M (menguras, menutup, mengubur).

2. Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta

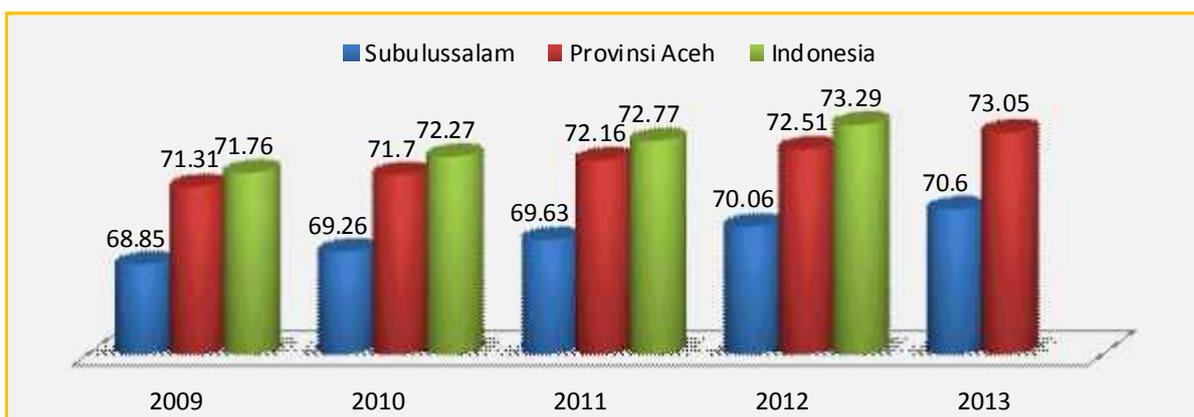
Data profil kesehatan Kota Subulussalam tahun 2014 menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir hanya terdapat satu kali temuan kasus kusta yakni pada tahun 2012 tepatnya di Kecamatan Simpang Kiri, terdapat laporan 1 orang penderita kusta basah. Indonesia secara keseluruhan telah mencapai target nasional eliminasi kusta pada tahun 2000. Eliminasi kusta adalah suatu kondisi dimana angka prevalensi kusta tercatat kurang dari 1 (<1) per 100.000 penduduk. Dari data yang ada disimpulkan bahwa kondisi eliminasi ini juga telah dicapai oleh Kota Subulussalam.

2.2.2.3. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan manusia mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah di hitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*decent living*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas dan hidup layak diukur berdasarkan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada *purchasing power parity* (paritas daya beli).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Subulussalam periode 2009-2013 cenderung meningkat. IPM Kota Subulussalam pada tahun 2013 sebesar 70,60 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM provinsi Aceh sebesar 73,50 dan IPM Indonesia sebesar 73,81. Perkembangan IPM Kota Subulussalam, Pemerintah Aceh dan Indonesia tahun 2009-2013 disajikan pada **Gambar 2.7**.

Gambar 2.7
Perkembangan IPM Kota Subulussalam, Pemerintah Aceh dan Indonesia Tahun 2009-2013



Sumber: BPS Indeks Pembangunan manusia Kota Subulussalam

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Pemerintah Aceh, posisi IPM Kota Subulussalam tahun pada tahun 2013 berada pada urutan terendah ke 21 dari 23 kabupaten/kota sedikit lebih baik dari Kabupaten Aceh Singkil dan Gayo Lues. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kota Subulussalam jika di bandingkan dengan kabupaten tetangga menunjukkan bahwa; untuk Kabupaten Aceh Singkil masih dibawah Kota Subulussalam yakni peringkat 22 (69,79 persen), sementara Kabupaten Aceh Selatan berada diatas peringkat Kota Subulussalam yakni pada posisi 18 (71,18 persen), sedangkan Kabupaten Aceh Tenggara berada pada posisi 11 (72,81 persen). Tingkat IPM di Kota Subulussalam dapat ditingkatkan melalui perbaikan pelayanan dan fasilitas kesehatan, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja guna menekan jumlah pengangguran.

2.2.3. Fokus Dinul Islam, Adat dan Budaya

2.2.3.1. Dinul Islam

Kota Subulussalam sebagai bagian Provinsi Aceh, juga tidak terlepas dari pemberlakuan Syari'at Islam sesuai dengan status Otonomi Khusus bagi Pemerintah Aceh. Konsekuensinya adalah hukum yang berlaku di Pemerintah Aceh akan secara otomatis menjadi pedoman masyarakat adalah hukum Islam yang berlandaskan pada qanun (peraturan) yang berlaku. Demikian juga dengan status pengadilan, bagi pelanggar hukum Islam dilakukan dengan tata cara Islam dan diawasi serta dijalankan oleh Mahkamah Syari'at sebagai lembaga peradilan Islam.

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam melalui penerapan Syari'at Islam di kalangan masyarakat masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai keislaman. Kehidupan yang dulunya sarat dengan akhlak dan sopan santun telah berubah menjadi suasana yang jauh dari tatakrama tuntutan agama Islam. Hal ini tercermin dari tingkah laku anak yang kurang menghargai orang tua, demikian juga sebaliknya orang tua kurang peduli terhadap perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma agama Islam.

Pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat menjadi fenomena umum di Kota Subulussalam. Pasangan muda mudi non muhrim sering terlihat melakukan tindakan yang melanggar Syari'at Islam diberbagai lokasi seperti ditempat-tempat wisata dan lokasi umum lainnya. Hal ini perlu perhatian serius dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah Kota Subulussalam dalam hal ini Dinas Syari'at Islam untuk memberikan pembinaan dan pembelajaran kepada generasi muda agar terhindar dari perbuatan yang melanggar Syari'at Islam.

Pengimplementasian Syari'at Islam di lingkungan pendidikan formal juga belum optimal. Hal ini tergambar dari banyaknya pendidik yang belum dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Muatan Dinul Islam masih belum terintegrasi di dalam ilmu pengetahuan umum (sains). Dengan kata lain, masih terlihat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Selanjutnya, jumlah jam dan mata pelajaran agama dirasakan masih kurang sehingga perlu ditambah. Demikian juga dengan muatan dan kurikulum pelajaran yang mendukung Dinul Islam masih kurang serta tingkat pemahaman tenaga pendidik terhadap Dinul Islam masih sangat terbatas. Tenaga pendidik di sekolah umum belum mendapat standarisasi tentang internalisasi nilai-nilai Dinul Islam ke dalam materi pembelajaran umum.

Selanjutnya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keislaman bisa tercermin dalam aktifitas ekonomi. salah satu aktifitas tersebut adalah semakin banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi ayam pedaging yang dijual belikan di pasar, masyarakat tanpa menilai apakah cara pemotongan hewan tersebut sudah sesuai dengan anjuran syari'at atau belum, apakah "si penyembelih" hewan tersebut sudah melakukan anjuran-anjuran syari'at atau belum. Tantangan berat bagi pemerintah dalam menerapkan hukum syari'at islam kedepan. Khusus dalam hal permasalahan yang berhubungan dengan pemotongan hewan kedepan Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas yang terkait agar dapat menyediakan Rumah Potong Hewan dengan tujuan agar pengawasan terhadap pelaksanaan anjuran tata cara pemotongan hewan sesuai dengan syari'at.

Sementara itu di Kota Subulussalam juga masih banyak beredar minuman keras, tuak dan sejenisnya, judi, sabung ayam, dan lebih menyesatkan lagi adalah semakin maraknya aktifitas bisnis pinjaman uang dengan cara riba (rentenir). Hal ini semestinya menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Subulussalam dengan Dinas syari'at Islam sebagai

aparatur yang bertugas agar segera mencari solusi terbaik untuk menghilangkan penyakit sosial ini.

2.2.3.2. Budaya dan Pariwisata

Masyarakat Kota Subulussalam merupakan masyarakat yang heterogen, terdiri dari beragam suku, bahasa dan adat istiadat yang merupakan potensi bagi persatuan dan kesatuan menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Adapun suku yang mendiami wilayah Kota Subulussalam antara lain Suku Singkil, Pakpak, Aceh, Jawa, Batak Toba, Karo dan Padang.

Keragaman suku dan adat istiadat juga melahirkan berbagai seni tari daerah, salah satunya adalah tari dampeng yang menjadi tarian khas di Kota Subulussalam. Selain itu, di Kota Subulussalam tepatnya Desa Oboh Kecamatan Rundeng terdapat makam penyair dan ahli tasawuf Aceh abad ke 17, Syekh Hamzah Fansyuri yang mashur. Apabila dikelola dan dikemas dengan baik, hal tersebut dapat menjadi daya tarik pariwisata dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya wisata religi.

Dalam kaitannya dengan pengembangan industri di daerah, keragaman etnis atau budaya tersebut dapat menjadi nilai positif yang menjadi pemicu perkembangan industri kecil dan menengah seperti industri barang seni, batu mulia, keramik hias, industri makanan dan minuman serta industri lainnya.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan

Penataan Kelembagaan pemerintahan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), struktur organisasi dan eselonering. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta percepatan pembangunan daerah, maka tupoksi beberapa SKPK perlu dipertegas untuk menghindari tumpang tindihnya kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

Gambaran umum pengelolaan keuangan dan aset Kota Subulussalam sudah berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan di Kota Subulussalam yang pada masuk kedalam kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) tanggal 31 Desember 2013 dan tahun 2012.

Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji

material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Subulussalam penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

B. Organisasi, Tata Kelola Aparatur Pemerintahan

Penataan Kelembagaan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), struktur organisasi dan eselonering. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta percepatan pembangunan daerah, maka tupoksi beberapa SKPA perlu dipertegas untuk menghindari tumpang tindihnya kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan belum dilaksanakan secara baik yang tergambar dari belum efesien dan efektifnya penggunaan anggaran disetiap SKPK, distribusi aparatur yang tidak merata, sumberdaya aparatur yang masih lemah hal ini tergambar dari belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rendahnya kualitas pembangunan secara menyeluruh disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Fungsi perencanaan dan pembangunan harus berada dalam satu sistem yang terintegrasi sejak dari awal hingga implementasi dan monitoring evaluasi.

Disamping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, Pemerintah Kota Subulussalam perlu menerapkan pengembangan sistem elektronik pemerintahan (*e-government*), yang meliputi; kebijakan *e-office* (pengembangan website, e-administrasi umum/manajemen dokumen elektronik (*e-arsip*), administrasi keuangan elektronik/sistem keuangan elektronik, dan administrasi kepegawaian elektronik/*simpeg*), kebijakan *e-planning*, monitoring dan evaluasi, kebijakan *e-budgeting*, kebijakan *e-procurement*, kebijakan *e-performance* (SAKIP).

Distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua kecamatan sampai desa, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing SKPK. Dengan kata lain, pemerintah Kota Subulussalam tidak memiliki kewenangan untuk melakukan distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh secara proporsional. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas/Badan/Instansi pemerintah dan golongan di sajikan pada **Tabel 2.27**.

Tabel 2.27
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi
Pemerintah Dan Golongan Di Kota Subulussalam Tahun 2013

No	Dinas/Instansi Pemerintah	Golongan PNS				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	0	23	73	21	117
2	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga	2	476	547	163	1.188
3	Dinas Kesehatan	0	130	123	5	258
4	Sekretariat DPRK Kota Subulussalam	0	10	9	3	22
5	Inspektorat	0	7	20	5	32
6	Dinas Peternakan Dan Perikanan	0	3	21	2	26
7	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan	0	8	21	5	34
8	Dinas Syari'at Islam	0	1	14	2	17
9	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah	0	13	21	3	37
10	Dinas Pertambangan Dan Energi & Sumberdaya Mineral	1	4	19	2	32
11	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	0	16	14	2	32
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm	0	9	20	4	33
13	Dinas Pekerjaan Umum	1	9	33	2	45
14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	0	3	9	4	16
15	Dinas Perhubungan Telematika Dan Parawisata	0	22	22	2	46
16	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0	5	19	4	28
17	Dinas Sosial	0	3	13	3	19
18	Komisi Indepneden Pemilihan	0	1	6	0	7
19	Badan pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & KB	0	3	15	4	22
20	Badan Pemberdayaan Perempuan	0	3	12	3	18
21	Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan	0	21	30	3	54
22	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan & Pemadam Kebakaran	1	4	17	2	24
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	7	17	3	27
24	Kantor Kesbang Pol & Linmas	0	5	7	1	13
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja & WH	0	4	17	0	21
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	4	10	1	15
27	Kantor Arsip & Perpustakaan	0	14	5	1	20
28	Kantor Pelayanan Izin Terpadu	0	4	10	1	3
29	Sekretariat MAA	0	1	1	1	3
30	Sekretariat Baitul Mal	0	2	2	0	4
31	Sekretariat MPD	0	1	3	1	5
32	Sekretariat MPU	0	1	4	1	6
33	Sekretariat Korpri	0	0	2	0	2
34	Rumah Sakit Umum Daerah	0	52	30	3	85
35	Kantor Camat Longkip	1	2	7	0	10
36	Kantor Camat Rundeng	0	7	14	0	21
37	Kantor Camat Sultan Daulat	0	7	11	0	18
38	Kantor Camat Penanggalan	3	9	9	0	21
39	Kantor Camat Simpang Kiri	1	4	8	0	13

Sumber: Subulussalam dalam Angka tahun 2014

Tabel 2.27 menunjukkan bahwa pendistribusian tenaga pegawai negeri sipil di masing-masing Dinas/Badan dan Kantor tidak merata. Oleh karena itu, Walikota sebagai kepala Pemerintah Kota Subulussalam perlu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPK agar pendistribusian tenaga administrasi, guru, tenaga medis dan para medis sampai dengan tenaga penyuluh dilakukan secara terpadu yang diatur melalui keputusan Walikota. Jumlah aparat pegawai negeri sipil yang melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan berjumlah 2.431 orang dengan tingkat pendidikan disajikan pada **Tabel 2.28**.

Tabel 2.28
Tingkat Pendidikan Aparat PNS menurut Jenis Kelamin
di Kota Subulussalam tahun 2013

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	8	-	8
2	SLTP	13	2	15
3	SLTA	170	199	369
4	Diploma I	2	30	32
5	Diploma II	236	305	541
6	Diploma III	100	218	318
7	Diploma IV	1	6	7
8	Sarjana/S1	636	482	1.118
9	Pasca Sarjana	20	3	23
Jumlah		1.186	1.245	2.431

Sumber: Subulussalam dalam Angka tahun 2013

Kebutuhan lulusan pendidikan penjenjangan sesuai dengan jabatan struktural yang ada di Kota Subulussalam dengan memperhatikan mekanisme regenerasi, mutasi dan promosi. Jumlah jabatan struktural di Kota Subulussalam tahun 2013 disajikan pada **Tabel 2.29**.

Tabel 2.29
Jumlah Jabatan Struktural di Kota Subulussalam Tahun 2013

Jabatan Struktural	Jumlah
Jabatan Eselon II	30
Jabatan Eselon III	117
Jabatan Eselon IV	228
Jumlah	375

Sumber: Subulussalam dalam Angka tahun 2013

Kota Subulussalam telah menetapkan berbagai Peraturan Daerah/Qanun dan Keputusan Walikota yang telah di Undangkan dalam Lembaran Daerah serta di dokumentasikan dalam Buku Produk Hukum daerah sebagaimana dikeluarkan oleh bagian Hukum Sekretariat Kota Subulussalam selama 2 (dua) tahun terakhir (2012-2013) disajikan pada **Tabel 2.30**.

Tabel 2.30
Jumlah Produk Hukum di Kota Subulussalam Periode Tahun 2009-2013

Jenis Keputusan	2012	2013
Peraturan Walikota	14	14
Peraturan Daerah / Qanun	4	2

Sumber: *Bagian Hukum Kota Subulussalam*

C. Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik secara umum belumlah maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai pandangan dan opini masyarakat dalam rangka menuntut haknya yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, diantaranya: kebutuhan masyarakat dalam pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan perlindungan.

Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat tersebut adalah terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing-masing SKPK yang merupakan target yang harus dicapai. Dalam upaya pencapaian target untuk semua bidang urusan tersebut pemerintah Kota Subulussalam perlu segera melaksanakan; penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) setiap urusan, penyusunan standar operasional prosedur untuk semua kegiatan yang berurusan dengan pelayanan publik, sosialisasi dan membuka akses yang luas kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.3.1.2. Pendidikan

A. Pendidikan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, bukan hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar, program pendidikan berkelanjutan dimaksudkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dalam upaya peningkatan partisipasi PAUD di Kota Subulussalam, hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan fasilitas PAUD itu sendiri. Berdasarkan data Masterplan Pendidikan, masih terdapat 24 desa yang belum memiliki fasilitas PAUD. Selain itu, ketersediaan guru PAUD juga perlu mendapat perhatian. Adapun rasio ideal guru dan murid PAUD sebagai berikut:

1. Usia 0-1 tahun dengan rasio 1 : 3 anak,
2. Usia 1-3 tahun dengan rasio 1 : 6 anak,
3. Usia 3-4 tahun dengan rasio 1 : 8 tahun, dan
4. Usia 4-6 tahun dengan rasio 1 : 10-12 anak.

B. Pendidikan Dasar

B.1. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dasar terhadap penduduk usia sekolah dihitung dengan cara membandingkan jumlah ketersediaan sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dikali 10.000. Rasio ketersediaan sekolah dasar (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah dasar pada tahun 2013 di Kota Subulussalam adalah sebesar 146/10.000 penduduk usia sekolah SD/MI. Hal ini bermakna tersedia 146 sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah dasar SD/MI. Jumlah sekolah pendidikan dasar (SD/MI) yang tersedia saat ini adalah 79 unit yang melayani 5.428 penduduk usia sekolah dasar. Jumlah sekolah dasar (SD/MI) sudah memadai karena jumlah standar sekolah setiap 10.000 penduduk terdapat 52 unit sekolah SD/MI. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah sekolah SD/MI di Kota Subulussalam memadai.

Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2013 di Kota Subulussalam adalah sebesar 33/10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Hal ini bermakna tersedia 33 sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs yang tersedia saat ini adalah 19 unit yang melayani 5.779 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Kondisi ideal jumlah sekolah SMP/MTs sebanyak 52 unit untuk melayani 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Dengan demikian Kota Subulussalam masih kekurangan jumlah SMP/MTs sebanyak 8 (delapan) unit sekolah SMP/MTs. Demikian juga dengan fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan dan sarana olah raga masih belum memadai.

B.2. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. PP Nomor 74 Tahun 2009 menyebutkan bahwa rasio guru murid adalah 1 : 20 untuk sekolah umum dan 1 : 15 untuk madrasah. Dengan kata lain bahwa setiap satu orang guru minimal mengasuh/mengajar sebanyak 15-20 orang murid.

Rasio guru terhadap murid ditingkat SD/MI dan SLPT/Sederajat di Kota Subulussalam sudah baik dengan rata-rata 1 : 12 tingkat SD/MI dan 1 : 16 di tingkat SLPT/Sederajat. Selanjutnya rasio ketersediaan guru SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat terhadap murid per kecamatan Tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.31**.

Tabel 2.31
Rasio Ketersediaan Guru SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat
Terhadap Murid per kecamatan Tahun 2009-2013

Kecamatan	SD/Sederajat					SLTP/Sederajat				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Simpang Kiri	23,08	13,77	15,19	n/a	14,67	19,06	14,78	13,90	n/a	14,75
Penanggalan	19,27	11,00	10,61	n/a	10,64	12,72	13,31	9,68	n/a	20,15
Rundeng	19,95	9,45	14,40	n/a	11,87	24,35	20,83	12,95	n/a	18,74

Kecamatan	SD/Sederajat					SLTP/Sederajat				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Sultan Daulat	32,92	12,60	11,38	n/a	12,33	28,09	15,85	11,94	n/a	16,54
Longkib	18,26	7,63	8,24	n/a	8,25	15,67	7,77	7,64	n/a	13,68
Subulussalam	22,62	11,40	12,18	11,66	12,17	18,78	14,88	12,11	13,34	16,49

Sumber: Subulussalam dalam Angka 2010-2014

Rasio guru terhadap murid di setiap kecamatan bervariasi, hal ini menandakan bahwa penyebaran guru belum merata atau sesuai kebutuhan di tiap kecamatan. Pada tahun 2011 rasio guru terhadap murid tingkat SD sederajat tertinggi terdapat di kecamatan simpang kiri yaitu 15,19 (1 orang guru melayani 15-16 murid) dan terendah di Kecamatan Longkib sebesar 8,24 (1 orang guru melayani 8-9 orang).

C. Pendidikan Menengah

C.1. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA terhadap penduduk usia sekolah dihitung dengan cara membandingkan jumlah ketersediaan sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan menengah dikali 10.000. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2013 di Kota Subulussalam adalah sebesar 35/10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Hal ini bermakna tersedia 35 sekolah dapat melayani 10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/MA yang tersedia saat ini adalah 17 unit yang melayani 4.811 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Jumlah sekolah sudah memadai karena berdasarkan rasio di atas 17-18 sekolah dapat melayani 5.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Namun fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan dan sarana olah raga masih belum memadai.

C.2. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio ketersediaan guru SLTA/sederajat terhadap murid per kecamatan Tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.32**.

Tabel 2.32
Rasio Ketersediaan Guru SLTA/sederajat
Terhadap Murid per kecamatan Tahun 2009-2013

Kecamatan	SLTA/Sederajat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Simpang Kiri	10,94	15,52	13,39	n/a	11,85
Penanggalan	10,00	13,64	11,82	n/a	19,59
Rundeng	8,82	16,43	16,06	n/a	16,34

Kecamatan	SLTA/Sederajat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sultan Daulat	15,23	21,21	22,54	n/a	22,55
Longkib	8,69	9,56	8,06	n/a	8,06
Kota Subulussalam	10,65	16,71	13,07	11,56	14,10

Sumber: Subulussalam dalam Angka 2010-2014

Rasio guru terhadap siswa pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 masih normal, artinya bahwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 ketersediaan guru terhadap murid masih mencukupi. Jika melihat angka rasio pada Tabel 2.41 menunjukkan bahwa setiap satu orang guru mengajar/mengasuh siswa sebanyak 10 – 14 orang murid, hal ini sesuai dengan PP Nomor 74 Tahun 2009 menyebutkan bahwa rasio guru murid adalah 1 : 20.

Keberadaan guru tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas saja. Namun perlu juga dikaji dari sisi kualitas. Keberadaan guru SMA dengan rasio yang sudah lebih dari cukup dapat disikapi dengan meningkatkan kompetensi guru yang ada, dengan cara sertifikasi, mengikuti pelatihan - pelatihan terkait peningkatan mutu guru. Selain itu, perlu diperhatikan kembali, dengan rasio 1 : 9 tersebut apakah sudah tercukupi seluruh guru bidang studi, karena sering terjadi kelebihan di mata pelajaran tertentu sementara mata pelajaran lain kekurangan bahkan belum ada. Terkait kekurangan guru pada SMK dan MA, apabila tidak memungkinkan untuk penerimaan/penambahan guru baru, jika memungkinkan dan relevan, perlu dipikirkan opsi untuk penugasan guru SMA ke SMK/MA pada mata pelajaran yang umum.

D. Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

D.1. Guru yang berkualitas S-1/D-IV

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 8 berbunyi bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Berdasarkan data profil pendidikan tahun 2013 diketahui bahwa kuantitas guru di Kota Subulussalam tidak diikuti dengan kualitas yang memadai. Sebagian besar guru belum berijazah S1/DIV dan spesifikasi guru untuk bidang studi tertentu belum terpenuhi yang penyebarannya belum merata. SPM Pendidikan Dasar mensyaratkan di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 persen dan separuh diantaranya (35 persen dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 persen dan 20 persen. Guru yang memenuhi standar kualifikasi S1/D-IV untuk SD/MI dan SMP/MTs sudah mencapai 100 persen. Namun jumlah

guru yang berkualifikasi S1/D-IV untuk SMA/SMK/MA masih belum memenuhi (44,15 %). Guru yang memenuhi standar kualifikasi S1/D-IV di Kota Subulussalam tahun 2013 disajikan pada **Tabel 2.33**.

Tabel 2.33
Guru yang Memenuhi Standar Kualifikasi S1/D IV
di Kota Subulussalam tahun 2013

Uraian	Jumlah Guru	Jumlah Guru	
		Kualifikasi S1/D-IV	%
SD/MI	1.039	1.039	100
SMP/MTs	336	336	100
SMA/SMK/MA	265	117	44,15

Sumber: Disdikbudpora Kota Subulussalam tahun 2014

D.2. Guru yang bersertifikat Pendidik

Jumlah guru sekolah dasar dan menengah di Kota Subulussalam sejumlah 1.640 guru pada tahun 2013 yang terdiri dari PNS (1.059 guru) dan Non-PNS (581 guru), yang sudah bersertifikat pendidik sebanyak 261 guru (24,65 %) dari total guru PNS. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah guru PNS yang belum bersertifikat pendidik sejumlah 798 guru (75,35 %). Jumlah guru bersertifikat pendidik berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Subulussalam tahun 2013 disajikan pada **Tabel 2.34**.

Tabel 2.34
Jumlah Guru bersertifikat Pendidik Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kota Subulussalam tahun 2013

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru		Jumlah Guru PNS		
	PNS	Non-PNS	Belum Bersertifikat Pendidik	Sudah Bersertifikat Pendidik	
				Jumlah	%
SD/MI	668	371	543	125	18,71
SMP/MTs	202	134	169	33	16,34
SMA/SMK/MA	189	76	86	103	54,50
Jumlah	1.059	581	798	261	29,85

Sumber: Disdikbudpora Kota Subulussalam, 2014

Tabel 2.34 menggambarkan bahwa jumlah guru yang belum bersertifikat pendidik masih sangat banyak yaitu sebesar 75,35 persen dari total guru PNS yang tersedia. Hal ini merupakan tantangan kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk melakukan pengsertifikasi guru menjadi guru yang bersertifikat pendidik. Demikian juga dalam hal peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh jumlah guru yang bersertifikat pendidik tetapi juga profesionalisme tenaga pendidik.

2.3.1.3. Bidang Pendidikan Dayah

Kota Subulussalam merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari provinsi Aceh yang merupakan provinsi bersyari'at Islam. Dalam hal penerapan syari'at Islam di Kota

Subulussalam tentu berlaku sebagaimana dilaksanakan di kabupaten/kota lainnya. Keberadaan dayah/pesantren merupakan salah satu sarana dalam peningkatan pemahaman tentang agama Islam. Namun jumlah dayah/pesantren yang tersedia di Kota Subulussalam masih belum memadai dan sebarannya belum merata (**Tabel 2.35**). Di sisi lain Kota Subulussalam merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pakpak Barat propinsi Sumatera Utara yang didominasi oleh penduduk non muslim sehingga sangat rentan terhadap pendangkalan aqidah masyarakat di wilayah tersebut. Jumlah dayah/pesantren, teungku/guru dan santri berdasarkan kecamatan di Kota Subulussalam tahun 2013.

Tabel 2.35
Jumlah Dayah/Pesantren, Teungku/Guru dan Santri berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam tahun 2013

No	Nama dayah / pesantren	Lokasi		Jumlah	
		Kampung	Kecamatan	Santri	Guru
1	Raudatul Jannah	Suka Makmur	Simpang Kiri	372	26
2	Hidayatullah	Subulussalam Selatan	Simpang Kiri	228	23
3	Jannatul Firdaus	Subulussalam	Simpang Kiri	227	44
4	Mardhatillah	Tangga Besi	Simpang Kiri	263	12
5	Minhajussalam	Kampung baru	Penanggalan	192	26
6	Al Mansuriyah	Lae Bersih	Penanggalan	200	25
7	DMT Subulussalam	Jontor	Penanggalan	212	19
8	Ad Darajat	Penanggalan	Penanggalan	121	17
9	Subulurrahmah	Pulo Kedep	Sultan Daulat	439	16
10	Al Muhajirin	Jambi	Sultan Daulat	171	7
11	Darurrahmah Sepadan	Sepadan	Rundeng	30	13
12	Husni Thamrin	Kampung Badar	Rundeng	80	14
13	Mishbahussa'adah	Panji	Longkib	87	10
Jumlah				2.622	252

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, 2014

Hasil analisis Tabel 2.35 memberikan informasi jumlah teungku/guru dayah/pesantren secara umum di Kota Subulussalam masih mamadai untuk pelaksanaan proses belajar mengajar dengan perbandingan 1 : 10 artinya satu orang teungku/guru melayani 10 orang santri. Namun beberapa dayah/pesantren masih kekurangan teungku/guru yaitu dayah/pesantren Subulurrahmah (1 : 27), Al Muhajirin (1 : 24) dan Mardhatillah (1 : 22).

2.3.1.4. Kesehatan

A. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Subulussalam untuk jenis rumah sakit dan puskesmas sudah terpenuhi, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan

tersedia di Kecamatan Simpang (Ibu Kota Subulussalam) dengan tipe D dan puskesmas tersedia 1 unit pada masing-masing ibu kota kecamatan. Sedangkan poskesdes yang berjumlah 67 unit masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 82 desa. Poskesdes masih diperlukan sebanyak 15 unit untuk mencapai jumlah ideal yaitu 1 desa memiliki 1 poskesdes. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kecamatan di Kota Subulussalam secara rinci disajikan pada **Tabel 2.36**.

Tabel 2.36
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Kecamatan
di Kota Subulussalam Tahun 2013

No	Kecamatan	Jenis		
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poskesdes
1	Simpang Kiri	1	1	10
2	Penanggalan	-	1	9
3	Sultan Daulat	-	1	17
4	Rundeng	-	1	21
5	Longkib	-	1	10
	Kota Subulussalam	1	5	67

Sumber: Profil Kesehatan Kota Subulussalam, 2014

B. Tenaga Kesehatan

B.1. Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk

Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa jumlah dokter umum di Kota Subulussalam sejak tahun 2010 belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Pada tahun 2010 dokter umum berjumlah 18 orang dan pada tahun 2013 tetap berjumlah 18 orang. Berdasarkan ketentuan WHO, rasio ideal dokter umum adalah 40/100.000 penduduk atau 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk (1 : 2.500). Dengan jumlah penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2013 berjumlah 72.414 jiwa memerlukan 29 dokter umum, sementara yang tersedia 18 dokter artinya Kota Subulussalam untuk mencapai rasio ideal masih memerlukan 11 dokter umum. Berikut disajikan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Subulussalam pada **Tabel 2.37**.

Tabel 2.37
Jumlah dan Rasio Dokter per satuan Penduduk
di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Dokter Umum	18	16	19	18
Jumlah Dokter Spesialis	-	-	-	5
Jumlah Dokter Gigi	4	4	5	7

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	67.446	68.990	70.707	72.414
Rasio Dokter Umum per 100.000	26	23	26	25
Rasio Dokter Spesialis per 100.000	-	-	-	7
Rasio Dokter Gigi per 100.000	5	6	7	10

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam tahun 2014

Peningkatan jumlah dokter umum dapat dilakukan dengan membuka formasi dokter umum pada penerimaan CPNS di Kota Subulussalam atau membuka kesempatan penerimaan tenaga dokter umum non-PNS khususnya putra/putri asli daerah. Selain itu dapat juga dilakukan dengan mengajukan usulan formasi Dokter Umum PTT kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini dapat menghemat Belanja Pegawai pada APBK karena gaji Dokter Umum (PTT) dibiayai oleh melalui APBN. Namun Dokter Umum PTT Kemenkes RI hanya bisa ditempatkan pada fasilitas terpencil.

B.2. Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk

Tabel 2.37 memberikan informasi jumlah dokter spesialis pada 2013 sebanyak 5 dokter yang pada tahun sebelumnya tidak tersedia. Rasio ideal 1 dokter spesialis melayani 5000 penduduk (Indonesia Sehat, 2010). Dengan jumlah penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2013 berjumlah 72.414 jiwa memerlukan 14 dokter spesialis, sementara yang tersedia 7 dokter artinya Kota Subulussalam untuk mencapai rasio ideal masih memerlukan 7 dokter spesialis yang memiliki spesialisasi tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah.

Peran dokter spesialis sangat penting dalam usaha peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Subulussalam, terlebih untuk mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah di bidang kesehatan. Selain itu dengan telah beroperasinya RSUD Kota Subulussalam, ketersediaan dokter spesialis dapat menjadi salah satu indikator penunjang dalam penentuan tingkatan tipe rumah sakit. Sejauh ini, peningkatan jumlah dokter spesialis melalui Beasiswa PPDS (program pendidikan dokter spesialis) dari BRR kepada dokter umum yang bertugas di Subulussalam pada kurun waktu tahun 2008 - 2009 yang telah menyelesaikan studi pada tahun 2012-2013 dan bertugas sebagai dokter spesialis di Kota Subulussalam. Pemerintah daerah akan berusaha menyediakan dokter umum dan dokter spesialis dalam jumlah yang ideal melalui berbagai program untuk pemenuhan dokter di Kota Subulussalam.

B.3. Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk

Tabel 2.37 memberikan informasi jumlah dokter gigi pada 2013 sebanyak 10 dokter yang jumlah bertambah dari tahun sebelumnya. Rasio ideal 1 dokter gigi melayani 9000 penduduk (Indonesia Sehat, 2010). Dengan jumlah penduduk Kota Subulussalam pada

tahun 2013 berjumlah 72.414 jiwa memerlukan 8 dokter gigi, sementara yang tersedia 10 dokter artinya Kota Subulussalam telah mencapai rasio ideal. Dengan ketersediaan jumlah dokter gigi yang sudah cukup memadai, maka hal selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah pemerataan distribusi dokter gigi. Kondisi saat ini, ketersediaan dokter gigi masih terkonsentrasi di RSUD Kota Subulussalam, sementara dokter gigi belum tersedia di beberapa puskesmas khususnya di wilayah yang jauh dari pusat Kota Subulussalam.

C. Kualitas Pelayanan Kesehatan

C.1. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Rumah Bersalin dan RSUD). Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2009 sebesar 90,17 persen, menurun menjadi 59,5 persen pada tahun 2010 dan 45,6 persen tahun 2011. Namun pada dua tahun terakhir yakni tahun 2012 dan 2013 telah mencapai angka 100 persen.

Dalam upaya peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diperlukan pemantauan dini yang dimulai sejak masa kehamilan. Dalam hal ini, kegiatan PWS-KIA berperan penting. Kegiatan PWS-KIA (Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak) adalah suatu alat manajemen program KIA untuk melakukan pemantauan pelayanan KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Program KIA yang dimaksud meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi, dan balita.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani antara lain: peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten diarahkan ke fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan bagi seluruh ibu nifas sesuai standar di semua fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar di semua fasilitas kesehatan, peningkatan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat dan peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara adekuat dan pengamatan secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan.

C.2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara

persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi, indikator yang digunakan adalah proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berdasarkan data yang tersedia sangat fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2009 mencapai 92,65 persen, namun terus menurun hingga mencapai angka 88,3 persen pada tahun 2013. Tren yang ada menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di kota subulussalam. Hal ini tentunya sangat berisiko karena persalinan yang tidak dilakukan dibawah pengawasan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat meningkatkan resiko kematian bayi maupun ibu melahirkan.

Menurunnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 sebesar 88,3 persen mengindikasikan bahwa lebih dari 10 persen ibu yang mempercayakan proses persalinan kepada dukun bayi. Hal ini patut menjadi perhatian karena pemerintah Kota Subulussalam telah menempatkan bidan di seluruh desa untuk membantu proses persalinan di setiap desa dapat ditangani sesuai dengan standar kesehatan yang benar. Hal ini tentunya dapat mengurangi resiko kematian ibu maupun bayi.

Menurunnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dikarenakan: 1). Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bidan, dikarenakan kompetensi bidan tidak sesuai standar maupun pengalaman bidan tersebut masih minim. Terkait hal ini, dinas kesehatan perlu melakukan langkah - langkah yang dianggap perlu dalam upaya peningkatan kompetensi bidan desa, 2). Bidan tidak menetap di tempat tugas pada saat dibutuhkan. Langkah tegas perlu diambil untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan evaluasi terus menerus terkait keberadaan bidan di lokasi tugas dan memberi sanksi terhadap bidan yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

C.3. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 (empat) kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data profil kesehatan diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan cakupan kunjungan bayi dari 64 persen pada tahun 2009 menjadi 79,34 persen pada tahun 2013. Namun persentase cakupan kunjungan bayi di Kota Subulussalam masih belum memenuhi target sebesar 100 persen. Hal ini patut menjadi perhatian, mengingat kunjungan bayi

merupakan salah pendukung penting dalam menurunkan angka kematian bayi. Penyebab belum tercapainya target persentase cakupan kunjungan bayi adalah kurangnya pemahaman ibu dan kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan khususnya untuk masyarakat desa yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan.

C.4. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam menunjukkan bahwa adanya penurunan cakupan penjangkaran siswa. Pada tahun 2012 jumlah cakupan penjangkaran siswa SD mencapai 91,4 persen, angka ini menurun pada tahun 2013 sampai 73,71 persen. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dasar. Demikian juga dengan masih kurangnya sosialisasi kesehatan dari pihak guru dan tenaga kesehatan kepada siswa.

C.5. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan menunjukkan angka yang baik. Sejak tahun 2009, seluruh kasus Balita Gizi buruk telah mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa petugas di lapangan telah melakukan *sweeping* secara berkelanjutan, dan cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan kasus gizi buruk.

Walaupun pencapaian cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen, namun disisi lain, masih ditemukan kasus gizi buruk tiap tahun patut menjadi perhatian serius. Dalam tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan temuan kasus gizi buruk, pada tahun 2011 (9 kasus) kemudian pada tahun 2012 (16 kasus) dan 2013 (17 kasus). Munculnya kasus gizi buruk terutama disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor ekonomi dan pola asuh yang salah. Faktor ekonomi berkaitan dengan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Sedangkan faktor pola asuh yang salah berkaitan dengan lemahnya pemahaman keluarga tentang gizi keluarga. Ketidaktahuan atau minimnya informasi mengenai pola asuh dan pemberian nutrisi yang tepat kepada anak dapat menyebabkan munculnya kasus gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk yang tertangani di masing-masing kecamatan di Kota Subulussalam dari tahun 2010-2013 disajikan pada **Tabel 2.38**.

Tabel 2.38
Jumlah kasus gizi buruk mendapat perawatan di masing-masing Puskesmas di Kota Subulussalam Tahun 2010-2013

No	Jumlah Kasus Gizi Buruk di Puskesmas	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Simpang Kiri	1	0	4	4
2	Penanggalan	0	1	1	1
3	Sultan Daulat	4	3	6	4
4	Rundeng	3	2	4	6
5	Longkib	1	3	1	2
	Kota Subulussalam	9	9	16	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2014

Tabel 2.38 memberikan informasi kasus gizi buruk ditemukan hampir di seluruh kecamatan. Kasus gizi buruk tertinggi ditemukan Kecamatan Rundeng sebanyak 6 kasus pada tahun 2013, Kecamatan Simpang dan Sultan Daulat masing-masing ditemukan 4 kasus. Informasi kasus gizi buruk di Kota Subulussalam diperoleh langsung dari laporan masyarakat yang mengalami kasus tersebut. Namun kasus gizi buruk ini diperkirakan jumlahnya lebih tinggi lagi jika tenaga medis melakukan observasi langsung ke seluruh desa secara berkala.

C.6. Cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif

ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan lain pada bayi berumur nol sampai 6 bulan (DEPKES RI, 2004). ASI Eksklusif atau pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, nasi tim, bubur nasi. Pemberian ASI secara eksklusif ini dianjurkan untuk jangka waktu setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila mungkin sampai 6 bulan. Setelah bayi berumur 6 bulan, ia harus mulai diperkenalkan dengan makanan padat, sedangkan ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun.

Persentase pemberian ASI Eksklusif di Kota Subulussalam terus menunjukkan peningkatan. Dalam 2 tahun terakhir bahkan mencapai peningkatan lebih dari 100 persen dari angka 19,40 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 53,27 persen pada tahun 2013. Namun capaian ini tentunya belum maksimal, dalam 5 tahun ke depan, sangat realistis jika ditargetkan cakupan pemberian ASI eksklusif dapat mencapai angka 80 persen. Peningkatan persentase pemberian ASI eksklusif mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat akan pentingnya ASI bagi bayi semakin baik. Agar tren peningkatan ini terus terjaga, perlu dilakukan upaya - upaya promotif seperti penyuluhan ASI, edukasi cara menyusui yang benar dan lainnya secara berkelanjutan. Dengan didukung oleh SDM tenaga kesehatan yang memadai yakni melalui keberadaan petugas konselor ASI di setiap fasyankes.

C.7. Cakupan Desa Universal Child Immunization

Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI) adalah Desa dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam

waktu satu tahun. Pencapaian Desa UCI di Kota Subulussalam sejak tahun 2009 terus meningkat dari angka 21,62 persen hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2012 yakni 50 persen. Namun sangat disayangkan, pencapaian ini menurun drastis hingga setengahnya pada tahun 2013 yakni di angka 24,4 persen. Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan perkiraan terhadap cakupan imunisasi dasar secara lengkap kepada bayi. Hal ini merupakan salah satu indikator SPM yang mensyaratkan capaian desa UCI sebesar 100 persen di setiap kabupaten/kota.

Rendahnya capaian Desa UCI ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain belum optimalnya pelaksanaan program imunisasi, posyandu yang tidak aktif, penyediaan dana operasional yang minim, fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, penting untuk memberikan pengetahuan/informasi yang benar kepada masyarakat/keluarga yang memiliki bayi/balita akan manfaat imunisasi sehingga mereka paham dan tidak memiliki persepsi yang salah tentang imunisasi.

C.8. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Dalam tatanan otonomi daerah, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten dan Kota, yang kemudian diserahkan pelaksanaannya ke desa dan kelurahan. Namun demikian, suksesnya pembangunan desa dan kelurahan juga tidak terlepas dari peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pihak-pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), dunia usaha, serta pemangku kepentingan lain. Desa Siaga Aktif merupakan pengembangan dari Desa Siaga, yaitu Desa atau Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), atau sarana kesehatan lainnya.
2. Penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaduratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Capaian Desa Siaga Aktif mencapai angka tertinggi pada tahun 2010, dimana 100 persen desa yang ada telah dikategorikan sebagai desa siaga aktif. Namun sayangnya hal tersebut tidak mampu bertahan dan terus mengalami penurunan hingga akhirnya di tahun 2013 berada pada angka 40,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh desa yang ada di Kota Subulussalam hanya 40,24 persen yang dapat dikategorikan sebagai desa siaga aktif. Permasalahan yang harus segera diselesaikan mengingat Desa Siaga Aktif merupakan

salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 80,00 persen desa dan kelurahan yang ada di Indonesia telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis guna memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

C.9. Cakupan Sanitasi Dasar

Sanitasi dan kesehatan manusia adalah dua hal yang saling terkait. Sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia dalam rangka kebersihan urusan buang hajat dan limbah serta penyediaan air bersihnya. Tiga unsur sanitasi adalah air limbah (*waste water*), persampahan (*solid waste*), dan drainase lingkungan (*drainage system*). Manajemen pembuangan manusia (*human waste*) yang buruk akan berakibat secara langsung maupun tidak langsung pada transmisi penyakit. Lebih dari 2.4 milyar orang di dunia saat ini tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai sehingga mereka terpaksa menggunakan fasilitas toilet yang tidak sehat dan tidak aman untuk digunakan. Sanitasi dan air minum merupakan salah satu dari delapan tujuan Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang diupayakan untuk dicapai pada 2015. Salah satu sanitasi yang menjadi perhatian adalah masalah air yang tercemar terutama di negara berkembang dengan sistem sanitasi air yang kurang.

Kota Subulussalam juga menghadapi permasalahan akses sanitasi dasar seperti ketersediaan, jamban, tempat sampah dan pengelolaan air limbah. Persentase Akses Sanitasi Dasar di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2012 disajikan pada **Tabel 2.39**.

Tabel 2.39
Persentase Akses Sanitasi Dasar di Kota Subulussalam
Tahun 2009 - 2012

Uraian	Tahun (%)			
	2009	2010	2011	2012
Jamban	83,27	30,3	75,5	79,99
Tempat Sampah	26,73	42,4	65,5	42,40
Pengelolaan Air Limbah	85,44	52,3	99,8	53,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, Tahun 2014

Tabel 2.39 memberikan informasi bahwa persentase ketersediaan jamban, tempat sampah dan pengelolaan air limbah di Kota Subulussalam masih tergolong rendah. Ketersediaan jamban pada tahun 2012 mencapai 79,99 persen, dengan kata lain masih terdapat 20,01 persen rumah tangga yang belum memiliki jamban. Selanjutnya kepemilikan tempat sampah rumah tangga pada tahun 2012 masih sangat rendah, hanya 42,40 persen rumah tangga yang memiliki tempat sampah. Demikian juga pengelolaan air limbah dengan

tingkat pencapaian 53,03 persen masih sangat rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat.

2.3.1.5. Pekerjaan Umum

A. Jalan

Panjang jalan di Kota Subulussalam tahun 2013 adalah 746,39 Km, yang terdiri dari jalan nasional (67 Km), jalan provinsi (99,80 Km) dan jalan Kota Subulussalam (579,59 Km). Panjang jalan nasional dan provinsi periode 2009-2013 tidak mengalami perubahan, sedangkan panjang jalan Kota Subulussalam selama periode 2009-2013 meningkat sepanjang 135,73 Km. Hal ini disebabkan adanya pembukaan jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar kecamatan. Panjang Jalan di Kota Subulussalam berdasarkan kewenangan tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.40**.

Tabel 2.40
Panjang Jalan di Kota Subulussalam Berdasarkan Kewenangan
Tahun 2009-2013

No	Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan (Km)				
			Baik	Sedang	Rusak	Belum Tembus	
1	2009	Nasional	67,00	*)	*)	*)	*)
		Provinsi	99,80	*)	*)	*)	*)
		Kota	443,86	39,43	143,70	71,07	189,66
		Jumlah	610,66	-	-	-	-
2	2010	Nasional	67,00	60,00	7,00	0,00	0,00
		Provinsi	99,80	16,00	1,00	13,00	69,80
		Kota	452,79	58,02	120,80	100,20	173,76
		Jumlah	619,59	134,02	128,80	113,20	243,56
3	2011	Nasional	67,00	60,00	7,00	0,00	0,00
		Provinsi	99,80	17,00	1,00	12,00	69,80
		Kota	452,79	65,86	143,70	80,00	163,24
		Jumlah	619,59	142,86	151,70	92,00	233,04
4	2012	Nasional	67,00	60,00	7,00	0,00	0,00
		Provinsi	99,80	17,00	1,00	12,00	69,80
		Kota	579,59	149,86	151,70	90,00	188,03
		Jumlah	746,39	226,86	159,70	102,00	257,83
5	2013	Nasional	67,00	*)	*)	*)	*)
		Provinsi	99,80	*)	*)	*)	*)
		Kota	579,59	158,08	125,31	104,00	192,20
		Jumlah	746,39	-	-	-	-

Sumber: Subulussalam dalam Angka, 2014

A.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat

dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya bottle neck (jaringan jalan yang menyempit) di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Proporsi pajang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Sulussalam periode tahun 2009-2013 cenderung meningkat seperti yang disajikan pada **Tabel 2.41**. pada tahun 2010 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,22 meningkat menjadi 0,30 pada tahun 2012.

Tabel 2.41
Proporsi panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jalan Kondisi Baik (Km)	*)	134,02	142,86	226,86	*)
Panjang Jalan Seluruhnya (Km)	610,66	619,59	619,59	746,39	746,39
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	-	0,22	0,23	0,30	-

Sumber: Subulussalam dalam Angka, 2014

A.2. Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Jalan merupakan sarana penunjang transportasi yang memiliki peran sangat penting khususnya untuk transportasi darat. Pada **Tabel 2.42** terlihat panjang jalan kota khususnya status jalan kota sampai tahun 2013 pemda Kota Subulussalam telah membangun jalan kota sepanjang 579,59 km dan mengalami penambahan dari tahun awal 2009 sepanjang 443,86 km berarti sepanjang 135,73 km bertambah sampai tahun 2013, namun dari panjang seluruh jalan kota tersebut hanya 27,27 persen panjang jalan kota yang berkondisi baik di tahun 2013, ini menunjukkan masih banyaknya jalan yang harus tangani.

Rendahnya persentase jalan kota dalam kondisi baik ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu dari faktor mutu jalan dimana jalan yang baru dibangun kurang dari 1 tahun sudah kembali rusak atau berlubang. Faktor selanjutnya adalah beban kendaraan yang

melewati jalan tersebut melebihi batas beban/tonase dari kelas/mutu jalan sehingga jalan menjadi rusak kemudian faktor kebijakan dan perencanaan jalan yang masih bersifat parsial dan faktor terakhir dikarenakan terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan jalan.

Tabel 2.42
Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
di Kota Subulussalam tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Panjang Jalan dalam kondisi Baik (Km)	39,43	58,02	142,86	149,86	158,08
Panjang seluruh jalan Kota (Km)	443,86	452,79	452,79	579,59	579,59
Persentase (%)	8,88	12,81	31,55	25,86	27,27

Sumber: Subulussalam dalam Angka, 2009-2014

Jalan Kondisi Baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 %), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Berdasarkan data yang tersedia, terjadi peningkatan proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Subulussalam, pada tahun 2009 proporsinya adalah 6,45 persen menjadi 20,68 persen pada tahun 2012.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan panjang jalan kota dalam kondisi baik antara lain: 1) peningkatan pengawasan mutu jalan pada saat pembangunan; 2) pengawasan kendaraan yang melintasi satu ruas jalan agar tidak melebihi tonase yang ditetapkan; 3) penetapan kelas-kelas jalan untuk ketertiban kendaraan; dan 4) menyusun *masterplan* jaringan jalan dan penentuan prioritas pembangunan jalan.

B. Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi padi adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Subulussalam 2014-2034 sawah *existing* di Kota Subulussalam adalah seluas 244,14 Ha, sedangkan rencana pengembangan sawah seluas 556,08 Ha. Pada umumnya sawah di Kota Subulussalam adalah sawah tadah hujan atau belum memiliki sarana irigasi.

C. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WHO), sanitasi adalah usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal

yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia. Adapun Ruang lingkup sanitasi ini antara lain yaitu Air Limbah, Persampahan, Drainase lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene. Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kota Subulussalam pada tahun 2013 memiliki rumah tinggal bersanitasi sebanyak 10.001 unit atau 57,02 dari jumlah seluruh rumah tinggal 17.537 unit (Data rumah tinggal diasumsikan sama dengan data rumah tangga). Hal ini menggambarkan capaian rumah tinggal bersanitasi di Kota Subulussalam masih sangat rendah. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.43**.

Tabel 2.43
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Rumah Tinggal Bersanitasi	n/a	2.203	n/a	n/a	10.001
Jumlah Seluruh Rumah Tangga	14.123	14.453	14.784	15.152	17.537
Persentase	n/a	15,24	n/a	n/a	57,02

Sumber: *Subulussalam Dalam Angka, 2010-2014*

Masih rendahnya persentase rumah tinggal yang belum bersanitasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) masyarakat belum menganggap penting untuk memiliki jamban sendiri; 2) masyarakat pada umumnya masih menggunakan jamban cubluk; 3) perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABs) di sungai/pekarangan/selokan masih menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di daerah pinggiran sungai.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu dengan meningkatkan sosialisasi pentingnya rumah tinggal bersanitasi, menyediakan MCK/MCK++, membangun IPAL Komunal dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) peduli sanitasi, penyuluhan dan Kampanye Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABs) serta mengawal dan melaksanakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang telah digagas oleh Pemerintah Pusat di daerah. Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat yang belum memiliki kepedulian terhadap pentingnya rumah tinggal bersanitasi.

D. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per 1000 penduduk

Jumlah penduduk Kota Subulussalam periode 2009-2013 yang cenderung meningkat menyebabkan produksi sampah setiap harinya meningkat. Kondisi saat ini, TPS yang tersedia di Kota Subulussalam hanya satu TPS dengan daya tampung 8 M3/hari. Dengan

demikian rasio TPS per 1000 penduduk pada tahun 2013 hanya 0,11 M3/hari. Produksi sampah per jiwa sebesar 0,0025 M3/hari (Standar WHO), dengan demikian pada tahun 2013 sampah di Kota Subulussalam sebanyak 259 M3/hari yang berasal dari timbulan sampah Rumah Tangga (RT) dan Non Rumah Tangga (NRT). Dengan daya tampung TPS 8 M3/hari maka sampah yang tidak dapat dikelola sebanyak 251 M3/hari. Rasio TPS berdasarkan jumlah penduduk di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.44**.

Tabel 2.44
Rasio Tempat Pembuangan Sampah berdasarkan Jumlah Penduduk
di Kota Subulussalam tahun 2009 - 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³ /Hari)	8	8	8	8	8
2	Jumlah penduduk	65.908	67.446	68.990	70.707	72.414
3	Rasio TPS Per 1000 Penduduk	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11

Sumber: BLHKPPK Kota Subulussalam, 2014

Dengan berpedoman pada analisis sebelumnya, produksi sampah di Kota Subulussalam 259 M3/hari memerlukan 5 (lima) TPS dengan asumsi tingkat pelayanan pengumpulan sampah 9 persen dan kapasitas TPS 8 M3/hari. Namun kondisi saat ini TPS yang tersedia hanya 1 (satu) TPS sehingga masih diperlukan 4 (empat) TPS. MDGs tahun 2015 menargetkan tingkat pelayanan pengelolaan sampah minimal 70 persen, artinya untuk mencapai target ini Kota Subulussalam memerlukan 38 TPS. Jumlah TPS yang diperlukan berdasarkan jumlah penduduk di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.45**.

Tabel 2.45
Jumlah TPS yang Diperlukan berdasarkan Jumlah Penduduk
di Kota Subulussalam tahun 2009 - 2012

Tahun	Jumlah Penduduk	Besaran Timbulan Sampah (m3/Org/Hari)	Timbulan Sampah (m3/hari)		Timbulan Sampah Total (M3/Hari)	Tingkat Pelayanan Pengumpulan (%)	Timbulan sampah yang dikumpulkan dari sumber ke TPS (m3/hari)	Kapasitas per TPS (M3/Hari)	Jumlah TPS
			RT	NRT					
2009	65.908	0,0025	165	71	235	5%	20	8	2
2010	67.446	0,0025	169	72	241	5%	20	8	3
2011	68.990	0,0025	172	74	246	5%	21	8	3
2012	70.707	0,0025	177	76	253	8%	34	8	4
2013	72.414	0,0025	181	78	259	9%	39	8	5

Sumber: BLHKPPK Kota Subulussalam, 2013

E. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Badan Pusat Statistik (2013) memberikan informasi Rumah Tangga (RT) miskin di Kota Subulussalam sebanyak 4.988 RT. Pada umumnya rumah tangga miskin memiliki rumah yang tidak layak huni. Dengan demikian rumah tidak layak huni di kota Subulussalam diasumsikan sebanyak 4.988 unit. Total rumah tangga di Kota Subulussalam adalah 15.152 RT sehingga rumah layak huni sebanyak 10.164 unit. Rasio rumah layak huni di Kota Subulussalam adalah 0,67 artinya dalam seratus rumah di Kota Subulussalam terdapat rumah layak huni sebanyak 67 unit.

F. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan penduduk

Beribadah menurut agama, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama. Jumlah mesjid dan mushalla masing-masing sebanyak 100 mesjid dan 124 mushalla yang tersebar di seluruh desa. Jumlah desa pada tahun 2014 sebanyak 82 desa dengan demikian ketersediaan mesjid dan mushalla sudah memadai. Namun daya tampung yang terbatas serta kondisi fisik mesjid dan mushalla yang belum sempurna pembangunannya memerlukan upaya rehabilitasi dan kelanjutan pembangunan perlu menjadi perhatian.

2.3.1.6. Perumahan

A. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik di Kota Subulussalam sudah mencapai 93,21 persen pada tahun 2013 yang sebelumnya pada awal tahun 2009 yaitu 78,33 persen, walaupun capaian ini hampir mendekati 100 persen tentunya masih tetap ada rumah tangga kota Subulussalam yang belum menikmati listrik, secara rinci persentase rumah berlistrik di Kota Subulussalam disajikan pada **Tabel 2.46**.

Tabel 2.46
Persentase Rumah Berlistrik
di Kota Subulussalam tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun (unit)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Rumah Tangga Pengguna Listrik	11.063	11.797	13.250	14.785	14.419
Jumlah Seluruh Rumah Tangga	14.123	14.453	14.784	15.152	15.469
Persentase	78,33	81,62	89,62	97,57	93,21

Sumber: Subulussalam Dalam Angka, 2014.

Tabel 2.46 memperlihatkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik saat ini sudah mencapai 93,21 persen. Hal ini berarti masih terdapat 6,79 persen (1.050) rumah tangga yang belum menggunakan listrik dari total rumah tangga 15.469 di Kota Subulussalam. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2012 sebesar 97,57 persen mengalami penurunan menjadi 93,21 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya pemutusan arus listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk rumah-rumah yang tidak membayar iuran listrik lebih dari 3 (tiga) bulan.

Rumah tangga yang belum menggunakan listrik disebabkan oleh terbatasnya jangkauan jaringan listrik dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Subulussalam akan melakukan koordinasi dengan PLN untuk menyediakan jaringan listrik dan membantu bebas biaya pemasangan daya/meterisasi dan instalasi listrik untuk keluarga miskin/duafa maksimal dengan daya 2 A.

B. Persentase Rumah Pengguna Air Bersih

Persentase rumah tangga pengguna air bersih di kota Subulussalam pada tahun 2013 masih sangat rendah, hanya 12,81 persen dari seluruh jumlah rumah tangga. Persentase rumah pengguna air bersih di Kota Subulussalam disajikan pada **Tabel 2.47**.

Tabel 2.47
Persentase Rumah Pengguna Air Bersih
di Kota Subulussalam tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun (unit)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	630	739	749	1.384	1.982
Jumlah Seluruh Rumah Tangga	14.123	14.453	14.784	15.152	15.469
Persentase	4,46	5,11	5,06	9,13	12,81

Sumber: Subulussalam Dalam Angka, 2010- 2014

Minimnya Rumah tangga pengguna air bersih ini secara umum disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) belum tersedianya jaringan air bersih yang menjangkau seluruh pemukiman; 2) rendahnya kemampuan masyarakat untuk membiayai pemasangan sambungan air bersih (PDAM) ke dalam rumah; dan 3) kebiasaan masyarakat yang menggunakan air permukaan (sumur dan sungai) sebagai sumber untuk air minum dan keperluan MCK.

2.3.1.7. Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek

dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

Berdasarkan data yang diperoleh dari RTRW Kota Subulussalam menghasilkan rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah kota Subulussalam yaitu 0,38, dari luas RTH Kota Subulussalam seluas 3.377,72 Ha dengan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 8.923,36 Ha. Rasio ini tentunya telah melebihi Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota, sedangkan ruang terbuka hijau privat minimal 10 persen dengan total 30 persen (rasio 0,30).

Untuk menjaga agar proporsi Ruang terbuka Hijau Kota Subulussalam ini tidak berkurang tentunya ketaatan akan penggunaan lahan sesuai tata ruang harus ditegakkan, kemudian dibarengi dengan regulasi-regulasi lain yang berkenaan dengan pembangunan permukiman, industri, perkantoran dan lain-lain agar mengharuskan penyediaan RTH dan tanah resapan tetap tersedia.

2.3.1.8. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). **Tabel 2.48** menyajikan ketersediaan dokumen perencanaan di Kota Subulussalam selama periode 2009-2013.

Tabel 2.48
Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Subulussalam
Tahun 2009 – 2013

Uraian	2009		2010		2011		2012		2013		Keterangan
	Ada	Tidak Ada									
Dokumen RPJP											Belum disusun, tetapi dalam tahap analisis data
Dokumen RPJMD											-

Uraian	2009		2010		2011		2012		2013		Keterangan
	Ada	Tidak Ada									
Dokumen Renstra SKPD											Renstra SKPD yang tersedia ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD (sesuai PP 8/2008)
Dokumen RKPD											-
Dokumen Renja SKPD											Renja SKPD yang tersedia ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD (sesuai PP 8/2008)

Sumber: BAPPEDA Kota Subulussalam, 2013

Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah tersedia pada periode tahun 2009-2013, namun RPJPD sampai dengan tahun 2013 belum disusun, sebagai dasar perencanaan daerah di Kota Subulussalam RPJP Kota Subulussalam berpedoman kepada RPJP Aceh. Sedangkan renstra Renstra SKPK dan Renja SKPK belum tidak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, akan tetapi ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 97 ayat 5 mengharuskan Renstra SKPK disahkan oleh Kepala Daerah.

2.3.1.9. Perhubungan

A. Izin Trayek

Dinas Perhubungan Kota Subulussalam menginformasikan bahwa sampai saat ini kota Subulussalam belum mengeluarkan izin trayek. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang tersedia belum difungsikan sebagaimana mestinya dan terbatasnya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor.

B. Jumlah Terminal Bis

Kota Subulussalam hanya memiliki 1 terminal Bis tipe B sudah tidak berfungsi optimal untuk melayani armada angkutan penumpang. Kondisi saat ini terminal tersebut beralih

fungsi sebagai pusat pasar. Hal ini disebabkan kurang tepatnya lokasi terminal yang berada ditengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Kota Subulussalam sudah membangun 1 Bis tipe B pada tahun 2011 yang berlokasi di desa Cepu Kecamatan Simpang Kiri. Namun sampai saat ini terminal tersebut belum berfungsi karena akses jalan dari dan menuju terminal belum memadai.

C. Jumlah Kendaraan Bermotor

Selama periode 2009-2013 jumlah kendaraan di kota subulussalam terus mengalami peningkatan. Namun jumlah kendaraan tersebut tidak semuanya terdata sebagai kendaraan beridentitas Kota Subulussalam, artinya masih banyak kendaraan di Kota Subulussalam memakai plat nomor kendaraan dari luar daerah yang tercatat. Kendaraan yang tercatat hanya kendaraan yang sudah membayar pajak sejumlah 1.475 unit. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.49**.

Tabel 2.49
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Subulussalam
Tahun 2009 – 2013

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sedan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jeep	n/a	n/a	2	9	1
Mini Bus	5	16	18	34	42
Mikrobus	n/a	n/a	n/a	1	1
Oplet/taxi	n/a	4	4	n/a	n/a
Pick Up	3	11	16	23	23
Light Truck	1	2	3	7	2
Alat Besar/Berat	n/a	2	7	n/a	n/a
Sepeda Motor	840	1.385	1.990	1.844	1.388
Jumlah	849	1.418	2.033	1.918	1.457

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

2.3.1.10. Lingkungan Hidup

A. Persentase penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Subulussalam adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Data volume sampah yang ditangani pada penjelasan sebelumnya 259 M³/hari, dengan demikian untuk pertahunnya adalah 2.920 M³/tahun. Berdasarkan jumlah penduduk untuk periode 2010-2013 maka volume produksi sampah untuk tahun 2010 sebesar 87.920,6 M³/tahun meningkat menjadi 94.396,8 M³/tahun pada tahun 2013. Namun persentase penanganan sampah masih tergolong rendah yaitu 3,32 persen pada tahun 2010 menurun menjadi 3,09 persen tahun 2013. Persentase penanganan sampah di Kota Subulussalam tahun 2010 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.50**.

Tabel 2.50
Persentase penanganan Sampah di Kota Subulussalam Tahun 2010 - 2013

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Volume Sampah yang ditangani (M ³)	2.920	2.920	2.920	2.920
Volume Produksi Sampah (M ³)	87.920,6	89.933,3	92.171,6	94.396,8
Persentase (%)	3,32	3,25	3,17	3,09

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, 2011-2014

Penanganan sampah ini tentunya tidak dapat terus di biarkan dan akan menimbulkan penyakit akibat timbunan sampah menumpuk dilingkungan permukiman. Rendahnya permasalahan penanganan ini disebabkan oleh; penanganan sampah belum optimal, minimnya pengelola layanan persampahan yang kredibel dan profesional, belum adanya sistem perencanaan pengelolaan sampah dan terbatasnya pendanaan untuk mendukung seluruh aspek pengelolaan sampah.

Berbagai permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan kebijakan-kebijakan seperti; penyediaan perangkat peraturan Daerah untuk mendukung pelayanan persampahan, meningkatkan kinerja manajemen pengelolaan persampahan, Meningkatkan sistem perencanaan dan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan, mengembangkan alternatif sumber pendanaan lainnya bagi pembangunan persampahan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.

B. Persentase penduduk berakses air minum

Menurut Kementerian Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Persentase penduduk berakses air minum di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.51**.

Tabel 2.51
Persentase penduduk Berakses Air Minum
di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk Berakses air minum	2520	2956	2996	5.536	7.928
Jumlah penduduk	65.908	67.446	68.990	70.707	72.414
Persentase (%)	3,82	4,38	4,34	7,83	10,95

Sumber: *Subulussalam Dalam Angka, 2014*

Tabel 2.51 memberikan informasi persentase penduduk berakses air minum masih sangat rendah hanya 3,82 persen tahun 2009 meningkat menjadi 10,95 persen pada tahun 2013. Namun persentase persentase peningkatan tersebut masih sangat lambat dengan rata-rata pertahun hanya 6,27 persen.

Rendahnya persentase akses pengguna air minum disebabkan antara lain: 1) sistem Pelayanan air Minum yang belum memadai; 2) belum lengkap dan terbaharukan perangkat regulasi yang mendukung penyediaan air minum; 3) menurunnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum; 4) masih terbatasnya penyedia air minum oleh perusahaan daerah air minum yang sehat (kredibel dan profesional); 5) belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum; dan 6) terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada: 1) penyediaan perangkat peraturan di daerah untuk mendukung pelayanan air minum; 2) memastikan ketersediaan air baku air minum; 3) meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana air minum; 4) meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum; 5) meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi melalui penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RISSPAM); 6) meningkatkan cakupan pelayanan air minum; dan 7) pengembangan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum.

C. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Kegunaan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL bagi pemerintah adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegunaan bagi pemrakarsa kegiatan adalah memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan serta sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perizinan. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel. 2.52**.

Tabel 2.52
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	4	4	10	11	17
Jlh. Perusahaan wajib AMDAL	10	10	10	17	17
persentase	40	40	100	64,71	100

Sumber: BLHKPPK Kota Subulussalam, 2014

Tabel 2.52 memberikan informasi cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal pada tahun 2009 hanya 40 persen dari perusahaan yang wajib amdal yang telah diawasi meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal telah baik. Namun demikian masih ada kasus lingkungan yang terjadi yaitu 2 kasus lingkungan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh perusahaan dan walaupun kasus tersebut telah diselesaikan oleh pemda namun pengawasan terhadap pelaksanaan amdal masih lemah. Suatu Amdal yang telah disusun memberi arahan untuk Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Kepatuhan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL ini oleh perusahaan dan instansi terkait masih lemah sehingga dapat menimbulkan kasus lingkungan.

2.3.1.11. Pertanahan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Administrasi pertanahan di Kota Subulussalam sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Urusan mengenai lahan yang bersertifikat sangat erat kaitannya dengan Badan pertanahan Nasional, berdasarkan data yang didapat pada akhir tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional kantor Kota Subulussalam sudah mengeluarkan sebanyak 1.475 surat sah kepemilikan tanah. Jumlah surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2009-2011 mengalami peningkatan, yakni tahun 2009 berjumlah 305 surat sah tanah dan pada tahun 2010 berjumlah 361 surat sah tanah. Namun lahan yang belum memiliki surat sah (sertifikat) tanah masih banyak terdapat di Kota Subulussalam, tanah tersebut hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kepala desa/kampong yang pada umumnya berupa lahan pertanian.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan di Kota Subulussalam antara lain: 1) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam masih tunduk kepada kantor BPN Kabupaten Aceh Singkil; 2) tingkat pemahaman masyarakat yang rendah; 3)

banyaknya status kepemilikan tanah yang tumpang tindih; 4) mahal nya biaya administrasi pembuatan sertifikat.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1) mengusulkan BPN Kota Subulussalam dapat berdiri sendiri; 2) menyediakan fasilitas dan SDM BPN Kota Subulussalam di Bidang Pertanahan; 3) menyediakan fasilitas bebas biaya pengurusan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin dengan proda dan prona; 4) melakukan indentifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dari lahan yang diterlantarkan oleh pemegang HPH dan HGU di wilayah Kota Subulussalam.

2.3.1.12. Kependudukan dan Catatan Sipil

A. Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Jumlah bayi yang berakte kelahiran di kota Subulussalam pada tahun 2012 mencapai 83 persen yaitu 1.310 bayi dari 1.585 bayi yang lahir dalam 1 tahun. Rasio bayi berakte kelahiran di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.53**.

Tabel 2.53
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Bayi lahir berakte kelahiran	2.903	2.884	4.162	1.310	1.942
Jlh. Keseluruhan Bayi yang Lahir Hidup	n/a	n/a	n/a	1.585	1.460
Rasio	-	-	-	0,83	1,32

Sumber: *Disdukcapil Kota Subulussalam, 2009-2014*

Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2013 adalah 1,32 yang mengindikasikan jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan melebihi jumlah keseluruhan bayi yang lahir hidup pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurusan akte kelahiran yang tidak keluaran pada tahun sebelumnya sebesar 0,32 pesen (482 sertifikat).

B. Rasio pasangan berakte nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah. **Tabel 2.54** memberikan informasi rasio pasangan berakte nikah di Kota Subulussalam tahun 2009-2013 mangalami peningkatan yaitu 3,39 persen pada tahun 2009 menjadi 14,90 persen pada tahun 2013. Namun persentase peasangan berakte nikah tersebut masih tergolong rendah, masih terdapat jumlah pasangan sebesar 85,10 persen yang belum memiliki akte nikah. Hal ini disebabkan oleh antara lain: 1) kurangnya pemahaman pasangan menikah terhadap

pentingnya tertib administrasi nikah; 2) banyaknya pasangan nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA); dan 3) rendahnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan administrasi nikah.

Tabel 2.54
Rasio Pasangan Berakte Nikah
di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Pasangan yang telah Berakte Nikah	479	1.013	1.409	2.021	2.613
Jumlah Keseluruhan pasangan Nikah	14.123	14.453	14.784	15.152	17.537
Rasio (%)	3,39	7,01	9,53	13,34	14,90

Sumber: *Disdukcapil dan Profil Kesehatan Kota Subulussalam, 2009-2014*

C. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan dan salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Gambaran rinci jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk disajikan pada **Tabel 2.55**.

Tabel 2.55
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Penduduk yang memiliki KTP	37.663	39.816	42.105	43.507	47.628
Jlh. Penduduk yang wajib KTP >17 thn	40.294	42.162	44.305	47.700	51.740
Persentase (%)	93,47	94,44	95,03	91,21	92,05

Sumber: *Subulussalam Dalam Angka, 2009-2014*

Persentase penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2009 sebesar 93,47 persen dan persentase ini mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 92,05 persen atau dengan kata lain masih ada penduduk diatas 17 tahun sebanyak 7-8 persen yang belum memiliki KTP. Masih adanya jumlah penduduk yang wajib KTP kemungkinan disebabkan beberapa faktor yakni penduduk yang baru berusia 17 tahun belum memiliki kemauan atau motivasi dalam mengurus KTP, sisanya adalah masyarakat yang belum melakukan perpanjangan KTP yang telah kadaluarsa. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan persentase penduduk yang wajib KTP yaitu: 1) Sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah umum pentingnya kepemilikan KTP; dan 2) memfasilitasi percepatan proses perpanjangan KTP yang telah kadaluarsa.

2.3.1.13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah. Gambaran mengenai jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dapat dilihat pada **Tabel 2.56**.

Tabel 2.56
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah (org)	774	n/a	1.207	1.200	1.245
Jlh. Pekerja perempuan (org)	n/a	5.699	8.882	7.354	7.645
Persentase (%)	n/a	n/a	13,58	16,29	16,28

Sumber: Subulussalam dalam Angka, data diolah

Tabel 2.56 menunjukkan bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2011 hanya 13,58 persen dan mengalami peningkatan sebesar 16,28 persen pada tahun 2013. Namun angka ini belum mencapai 30 persen sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah bahwa keterwakilan perempuan pada setiap lembaga minimal 30 persen.

B. Partisipasi perempuan di lembaga swasta (pekerja upahan non pertanian)

Jumlah pekerja perempuan dan tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta dapat dilihat pada **Tabel 2.57**. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (pekerja upahan non pertanian) berfluktuasi yaitu 65,36 persen (2010), 34,77 persen (2011), 60,68 persen (2012) dan 48,52 persen (2013).

Tabel 2.57
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pekerja Perempuan di lembaga swasta	n/a	3.725	3.089	4.476	3.710
Jlh. Pekerja perempuan	n/a	5.699	8.882	7.354	7.645
Persentase (%)	n/a	65,36	34,77	60,68	48,52

Sumber: Subulussalam dalam Angka, data diolah

Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga swasta disebabkan beberapa faktor antara lain: 1) rendahnya kualitas sumber daya perempuan; 2) adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan; dan 3) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik, dan di bidang ekonomi.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan peran perempuan di lembaga non pemerintahan (swasta) dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) meningkatkan kualitas SDM perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan politik; dan 2) meningkatkan efektivitas kelembagaan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender.

C. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. Rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kota Subulussalam dapat dilihat pada **Tabel 2.58**. Jumlah kejadian KDRT di Kota Subulussalam pada tahun 2013 sebanyak 13 rumah tangga dari 15.640 rumah tangga. Angka ini menurun bila dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah 20 KDRT dari 15.152 rumah tangga. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa rasio KDRT mencapai 0,0008 pada tahun 2013 masih tergolong rendah.

Tabel 2.58
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah KDRT	n/a	n/a	20	n/a	13
Jumlah Rumah Tangga	14.123	14.453	14.784	15.152	15.640
Rasio	n/a	n/a	0,0014	n/a	0,0008

Sumber: Subulussalam dalam Angka, 2010-2014, Dinas Sosial Kota Subulussalam, 2014 (diolah)

D. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada **Tabel 2.59**. Jumlah penyelesaian pengaduan tindak kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2011 dan tahun 2013 sebesar 100 persen. Namun pada tahun 2012 hanya 25,32 persen yang terselesaikan dari 79 jumlah pengaduan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan instansi terkait dalam menangani kasus KDRT.

Tabel 2.59
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kota Subulussalam
Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. pengaduan yang terselesaikan	n/a	n/a	4	20	6
Jlh. Pengaduan	n/a	n/a	4	79	6

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase (%)	n/a	n/a	100	25,32	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Subulussalam, 2014

2.3.1.14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

A. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak dalam keluarga di Kota Subulussalam selama kurun waktu tahun 2009-2013 rata-rata berjumlah 2 orang anak. Secara rinci rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Subulussalam tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.60**. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Subulussalam berjumlah 2-3 orang pada periode tahun 2010-2013 telah sesuai dengan program pemerintah yang menganjurkan 2 anak lebih baik.

Tabel 2.60
Rata-rata jumlah anak per Keluarga di Kota Subulussalam
Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Anak	n/a	34.494	35.282	36.249	37.002
Jumlah Keluarga	14.123	14.453	14.784	15.152	15.469
Rata-rata	n/a	2,38	2,38	2,39	2.39

Sumber: Subulussalam dalam Angka, 2010-2014

B. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif

Masyarakat Kota Subulussalam saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kota Subulussalam pada tahun 2013 sebanyak 8.213 peserta dari 11.617 pasangan usia subur. Jumlah ini semakin meningkat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.61**.

Tabel 2.61
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Peserta program KB aktif	5.961	3.734	2.825	3.857	8.213
Jlh. Pasangan Usia Subur	9.699	17.194	11.161	10.889	11.617
Persentase (%)	61,45	27,53	25,31	35,42	70,69

Sumber: Subulussalam dalam Angka, 2010-2014

Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2013 sebesar 70,69 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Namun tingkat pencapaian ini masih tergolong sedang karena belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan oleh antara lain: 1) pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi masih rendah; 2) partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja belum optimal; 3) pembinaan dan kemandirian peserta KB belum optimal; 4) kapasitas kelembagaan Program KB masih terbatas; dan 5) kebijakan pengendalian penduduk belum sinergis dan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan masih terbatas.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan persentase pencapaian cakupan peserta KB aktif antara lain: 1) penyediaan layanan KB dan kesehatan reproduksi bagi remaja dan Penduduk Usia Subur (PUS); 2) meningkatkan akses keluarga terhadap informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja; 3) meningkatkan peran kelompok-kelompok kegiatan yang ada di tingkat masyarakat sebagai media dalam meningkatkan kesertaan ber-KB; 4) meningkatkan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya program KB; 5) meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pengelola serta pelaksana program KB di daerah; 6) menyerasikan kebijakan kependudukan agar konsisten dan berkesinambungan; dan 7) meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kejadian vital, serta meningkatkan cakupan dan kualitas data kependudukan dari berbagai sumber.

2.3.1.15. Sosial

Pembangunan bidang sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang fokus sarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di bidang sosial yang sebaik-baiknya serta menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, pada gerak langkahnya senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks.

Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) turut meningkat, secara kuantitas maupun kompleksitasnya termasuk bentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer. Berbagai masalah PMKS yang berkembang di masyarakat antara lain: Keluarga Fakir Miskin; keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni; wanita rawan sosial ekonomi; Lanjut usia dan anak terlantar. Beberapa masalah PMKS disajikan pada **Tabel 2.62**.

Tabel 2.62
Jumlah PMKS di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun (orang)			
	2010	2011	2012	2013
Fakir Miskin	5.830	4.975	4.975	3.573
Anak Terlantar	114	114	114	46

Uraian	Tahun (orang)			
	2010	2011	2012	2013
Lanjut usia	1.539	1.539	1.539	1.238
Penyandang Disabilitas	n/a	n/a	n/a	522
Penyandang cacat berat	568	723	713	24
Anak Nakal	55	23	23	3
Lanjut usia Terlantar	278	253	253	525
Bekas Warga Binaan LP	230	72	4	57
Masy. Tgl didaerah rawan bencana	1.428	1.150	1.050	1.267
Gepeng dan Pemulung	451	2	2	3
Keluraga Berumah tidak layak huni	2.779	3.153	3.028	2.500
Anak yatim/piatu	1.383	1.355	1.355	1.880
Korban tindak kekerasan	9	5	5	141
Eks. Penyakit Kronis	68	115	115	59
Perempuan rawan sosial ekonomi	1.165	1.391	1.371	1.244
Anak Jalanan	-	-	-	6
JUMLAH	14.358	14.770	14.547	13.088

Sumber: Dinas Sosial Kota Subulussalam, 2014

Jumlah PMKS sebanyak 13.088 pada tahun 2013, jumlah ini menurun dari tahun 2010 sebanyak 14.358 PMKS. Meskipun mengalami penurunan namun jumlah PMKS yang ditangani masih relatif rendah yaitu 6,99 persen pada tahun 2013. Dari beragam PMKS tersebut yang terbesar adalah Fakir Miskin berjumlah 3.573, keluarga berumah tidak layak huni berjumlah 2.500 dan Anak yatim piatu berjumlah 1.880.

Persentase penanganan permasalahan PMKS di Kota Subulussalam sangat rendah yang hanya berkisar 6-10 persen dari keseluruhan jumlah PMKS. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada **Tabel 2.63**.

Tabel 2.63
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh PMKS yang ditangani	n/a	1.027	323	1.459	915
Jlh. PMKS yang ada	n/a	15.897	14.870	14.547	13.088
Persentase (%)	n/a	6,46	2,17	10,03	6,99

Sumber: Dinas Sosial Kota Subulussalam, 2014

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk menyelesaikan permasalahan PMKS antara lain: 1) menghindari tumpang tindihnya kegiatan bantuan sosial bagi PMKS; 2) menghindari kegiatan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak tepat sasaran; 3) meningkatkan kualitas data PMKS yang dapat digunakan oleh semua instansi terkait; dan 4) menjamin keberlanjutan kegiatan penuntasan PMKS.

2.3.1.16. Ketenagakerjaan

A. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah jumlah angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Pertumbuhan penduduk dapat menggambarkan pertumbuhan angkatan kerja. Periode tahun 2011 – 2013 APAK terus meningkat, ini menunjukkan bahwa peningkatan penduduk usia kerja yang terlibat dan ingin terlibat dalam memproduksi barang dan jasa dapat terlihat dari jumlah APAK tahun 2009 sebesar 23.456 orang dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 27.087 orang atau berkisar sebesar 3.631 orang. Selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja di Kota Subulussalam disajikan pada **Tabel 2.64**.

Tabel 2.64
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
di Kota Subulussalam Tahun 2011– 2013

Uraian	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk 15 Thn Keatas	40.911	41.854	42.478
Jumlah Angkatan Kerja 15 Thn Keatas	26.403	25.019	27.087
- Bekerja	24.243	22.954	24.419
- Menganggur	2.160	2.065	2.668
Jumlah Bukan Angkatan Kerja	14.508	16.837	15.391
- Mengurus RT	7.357	7.917	NA
- Sekolah	5.049	7.239	NA
- Lainnya	2.102	1.681	NA
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	65	60	64

Sumber: Subulussalam Dalam Angka (BPS), 2014

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan tentang bagaimana meningkatkan angka partisipasi kerja, seperti: pelatihan ketrampilan kerja untuk penduduk usia kerja yang belum bekerja, penambahan kesempatan kerja melalui pembukaan lapangan kerja baru dan pembinaan usaha mandiri berbasis kelompok terutama disektor unggulan daerah (mendukung pertumbuhan ICON Produk Daerah)

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja

yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Berikut adalah gambaran mengenai TPAK dan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Subulussalam selama kurun waktu 2009 – 2013 (**Tabel 2.65**).

Tabel 2.65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Penduduk Angkatan kerja	23.456	22.168	26.403	25.019	27.087
Jlh. Penduduk usia kerja (15-64 thn)	37.862	40.316	40.911	41.854	42.478
TPAK (%)	61,95	54,98	64,53	59,77	57,48

Sumber: Subulussalam Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.65 menunjukkan bahwa adanya penurunan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2009 TPAK sebesar 61,95 persen dari 37.862 orang usia kerja, angka ini semakin menurun pada tahun akhir 2013 sebesar 57,48 persen. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Penduduk usia kerja yang sebelumnya bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja dikarenakan kontribusi yang di terima pekerja tidak mampu memenuhi beban tanggungan rumah tangga.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan angka TPAK adalah meningkatkan profit atau nilai tambah yang diterima pekerja terutama di sektor pertanian melalui peningkatan kuantitas dan nilai jual produk. Hal ini dikarenakan penduduk Kota Subulussalam paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu mencapai 10.016 orang atau 36,97 persen pada tahun 2013 (sumber: BPS, data ST 2013).

C. Pencari kerja yang ditempatkan

Berdasarkan data yang tersedia jumlah pencari kerja yang ditempatkan meningkat dari tahun 2009 ke 2011 dan menurun di tahun 2012 (**Tabel 2.66**). Namun pencari kerja juga terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja yang cenderung melampaui pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan keterampilan bagi tenaga kerja supaya mampu bersaing di dunia kerja.

Tabel 2.66
Pencari kerja yang di Tempatkan di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Pencari Kerja yang ditempatkan	209	202	312	51	n/a
Jlh. Pencari Kerja yang mendaftar	209	290	314	59	113
Persentase (%)	100	69,65	99,36	86,44	n/a

Sumber: Subulussalam Dalam Angka 2014

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha dan yang sudah mendapatkan namun belum mulai bekerja. Berikut gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013 (Tabel 2.67).

Tabel 2.67
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Jlh. Penganggur usia angkatan kerja	2.160	2.065	2.668
Jlh. Penduduk angkatan kerja	26.403	25.019	27.087
Persentase (%)	8,18	8,25	9,85

Sumber: Subulussalam Dalam Angka 2014

Tabel 2.67 menunjukkan bahwa adanya penambahan jumlah angkatan kerja yang menganggur. Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam menyatakan bahwa bertambahnya angka pengangguran ini dikarenakan oleh ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan (jumlah kelulusan sekolah) dengan pasar kerja. Selanjutnya observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengaku memiliki pekerjaan, padahal mereka bekerja sebagai pekerja harian lepas/buruh pabrik selama satu minggu penuh namun seminggu kedepan sudah tidak bekerja lagi. Kondisi inilah yang menjadikan pekerja harian lepas/buruh ditetapkan sebagai pengangguran. Disamping itu, pekerja harian lepas tidak memiliki kontrak kerja dengan pihak perusahaan/pabrik, sehingga secara formal individu-individu yang bekerja dianggap tidak memiliki pekerjaan, walaupun dalam seminggu bekerja bisa menghidupi keluarga dalam satu bulan.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk menurunkan tingkat pengangguran antara lain: 1) membangun kerja sama dengan pihak perusahaan agar memberikan kesempatan kerja dan membuat ikatan kerja dengan buruh/tenaga kerja harian lepas; 2) mengadakan atau menyediakan lapangan kerja; dan 3) meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan vokasional dan Balai Latihan Kerja (BLK).

2.3.1.17. Kesempatan kerja dan tingkat pengangguran

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja untuk menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja (*demand for labour*) berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang

menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

A. Rasio Penduduk yang Bekerja

Angkatan Kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Rasio Penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Subulussalam periode tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.68**.

Tabel 2.68
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Subulussalam
Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Penduduk yang Bekerja (org)	22.437	21.219	24.243	22.954	24.419
Angkatan Kerja (org)	23.927	22.168	26.403	25.019	27.087
Rasio	0.94	0.96	0.92	0.92	0,90

Sumber: Subulussalam dalam Angka 2010-2014

Tabel 2.68 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja masing-masing sebanyak 1.490 orang tahun 2009, 949 orang (2010), 2.160 orang (2011), 2.065 orang (2012) dan sebanyak 2.668 orang (2013). Rata-rata rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja selama periode 2009-2013 sebesar 0,93.

2.3.1.18. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

A. Populasi Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Jumlah koperasi di setiap kecamatan di Kota Subulussalam sejak tahun 2011-2013 disajikan pada **Tabel 2.69**. Jumlah koperasi KNPN mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 79 unit menjadi 93 unit pada tahun 2013. Sementara itu jumlah KUD dan KPN periode 2011-2013 tidak mengalami peningkatan.

Tabel 2.69
Jumlah Populasi Koperasi di Kota Subulussalam
Tahun 2011– 2013

Kecamatan	Jenis Koperasi								
	2011			2012			2013		
	KUD	KPN	KNPN	KUD	KPN	KNPN	KUD	KPN	KNPN
Simpang Kiri	2	2	39	2	2	43	2	2	46
Penanggalan	-	1	16	-	1	18	-	1	18
Rundeng	1	-	8	1	-	10	1	-	10

Kecamatan	Jenis Koperasi								
	2011			2012			2013		
	KUD	KPN	KNPN	KUD	KPN	KNPN	KUD	KPN	KNPN
Sultan Daulat	1	-	14	1	-	17	1	-	17
Longkip	-	-	2	-	-	2	-	-	2
Jumlah	4	3	79	4	3	90	4	3	93

Sumber: Subulussalam Dalam Angka tahun 2014

Ket : KUD (Koperasi Unit Desa)
KPN (Koperasi Pegawai Negeri)
KNPN (Koperasi Non Pegawai Negeri)

B. Persentasi Koperasi Aktif

Persentase Koperasi yang aktif periode 2010-2013 cenderung menurun, pada tahun 2010 sebesar 59,25 persen menurun menjadi 45,00 persen pada tahun 2013. Persentasi koperasi aktif di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.70**. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan persentase koperasi yang aktif antara lain: 1) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi; 2) meningkatkan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan koperasi; 3) meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi.

Tabel 2.70
Persentasi Koperasi Aktif di Kota Subulussalam
Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Koperasi Aktif	n/a	48	49	49	45
Jumlah seluruh Koperasi	84	81	86	97	100
Persentase (%)	n/a	59,25	56,97	50,51	45

Sumber: Dinas UKM & Koperasi tahun 2014

C. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah industri pengolahan dalam kategori kecil dan menengah di Kota Subulussalam tahun 2011 – 2012 dapat dilihat pada **Tabel 2.71**. Jumlah UKM cenderung meningkat sebesar 63,54 pesen dari 441 unit UKM (2011) menjadi 694 unit UKM (2012).

Tabel 2.71
Jumlah Industri Pengolahan dalam Kategori Kecil dan Menengah
di Kota Subulussalam Tahun 2011 - 2012

Uraian	Tahun	
	2011	2012
Agro Industri	286	253
Industri pengolahan	155	441
Jumlah	441	694

Sumber: Subulussalam dalam Angka 2013

Usaha kecil menengah merupakan suatu peluang ekonomi produktif yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

2.3.1.19. Kebudayaan

Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala (BP3) Aceh melaporkan bahwa dari 3 (tiga) situs budaya yang ada di Kota Subulussalam hanya satu yang memiliki juru pelihara yaitu Kompleks makam Syekh Hamzah Fansyuri di Desa Oboh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Situs ini sudah dipugar oleh pemerintah. Namun dua cagar budaya lainnya hingga saat ini belum memiliki juru pelihara dan belum mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat yaitu: 1) Makam Sultan Daulat Sambo yang terletak di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat; dan 2) Benteng Kerajaan Batu-batu yang terletak di desa Batu Napal kecamatan Sultan Daulat. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Subulussalam tahun 2011 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.72**.

Tabel 2.72
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
di Kota Subulussalam Tahun 2011 - 2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Jlh. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	1	1
Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	3	3	3
Persentase	0	33,33	33,33

Sumber: Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala (BP3) Aceh

2.3.1.20. Kepemudaan dan Olah Raga

A. Jumlah organisasi pemuda

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Disdikbudpora melaporkan di Kota Subulussalam sampai saat ini hanya ada 4 organisasi pemuda yang semuanya terhimpun di bawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yaitu: 1) Gerakan Pemuda Ansor, 2) Pelajar Islam Indonesia, 3) Pemuda Muhammadiyah, dan 4) Pemuda Panca Marga.

Permasalahan organisasi kepemudaan adalah sejauhmana organisasi kepemudaan dapat merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa di masa mendatang. Kualitas pemuda Subulussalam masih belum menggembirakan yang terlihat dari kurangnya prestasi yang diraih di bidang kepemudaan seperti pemuda yang berprestasi dalam bidang wirausaha, sosial, politik,

akademik, hukum dan agama masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kualitas pemuda dapat ditingkatkan dengan cara antara lain: 1) pembinaan moral yang berlandaskan akhlak dan teknologi; 2) peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan; 3) peningkatan inovasi, keterampilan berusaha dan perlindungan hak cipta; 4) peningkatan sosialisasi hukum dan bahaya narkoba/miras; dan 5) penertiban pengelola jasa internet yang mempengaruhi mental kepemudaan.

B. Jumlah organisasi olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Disdikbudpora melaporkan di Kota Subulussalam sampai saat ini ada 10 *club* olahraga yang mendapatkan pembinaan pemerintah yaitu *club* sepak bola dan bola voli yang berada di setiap kecamatan. Namun club olah raga lainnya seperti; bulu tangkis, tenis meja, futsal, renang, sepeda, tinju, dan panjat tebing belum terdata dengan baik.

C. Jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan

Kegiatan pembinaan kepemudaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kreatifitas para pemuda, meningkatkan sumber daya pemuda agar mereka dapat menggali potensi mereka sebagai bekal untuk menjadi masyarakat yang berfikir positif, inovatif dan produktif, serta memiliki sikap mandiri, bekerjasama, kekeluargaan. Disdikbudpora melaporkan di Kota Subulussalam sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 hanya satu kegiatan kepemudaan yang sudah menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Subulussalam yaitu kegiatan Pencegahan penggunaan Narkoba Dikalangan generasi Muda. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Subulussalam akan menambah kegiatan kepemudaan.

D. Lapangan olahraga

Lapangan olahraga di Kota Subulussalam sebanyak 10 unit yang difasilitasi pembangunannya oleh pemerintah adalah satu lapangan bola kaki dan satu lapangan bola voli di setiap kecamatan. Sementara lapangan olah raga lainnya dibangun dengan swadaya masyarakat. Di sisi lain, Kota Subulussalam memiliki Gedung Olah Raga (GOR) yang pembangunannya belum tuntas yang berlokasi di Kecamatan Simpang Kiri.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lapangan olah raga Pemerintah Kota Subulussalam perlu mengupayakan: 1) meningkatkan sarana dan prasarana lapangan olah raga yang sudah disediakan masyarakat secara swadaya; 2) mengadakan kompetisi olahraga secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kota minimal 1 (satu) tahun sekali; dan 3) menuntaskan pembangunan GOR di Kecamatan Simpang Kiri.

2.3.1.21. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.73**.

Tabel 2.73
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Polisi Pamong Praja	-	-	118	168	180
Jlh. Penduduk	65.908	67.446	68.990	70.707	72.414
Rasio per 10000 penduduk			17,10	23,76	24,86

Sumber: Kantor Satpol PP dan WH Kota Subulussalam.

Rasio Satpol PP di Kota Subulussalam terus meningkat dari tahun 2011 sebesar 17,10/10.000 penduduk menjadi 24,86/10.000 penduduk pada tahun 2013 artinya dari 10.000 penduduk di Kota Subulussalam baru tersedia 24-25 orang polisi pamong praja. Jumlah Satpol PP tersebut dirasa masih kurang.

B. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman/ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.74**.

Tabel 2.74
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Subulussalam
Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Linmas (orang)	-	-	30	50	50
Jlh. Penduduk (orang)	65.908	67.446	68.990	70.707	72.414

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio	-	-	4,35	7,07	6,90

Sumber: Kantor Satpol PP dan WH Kota Subulussalam.

Rasio Linmas di Kota Subulussalam cenderung meningkat. Tahun 2013 rasio linmas mencapai 6,90 berarti sebanyak 6-7 orang Linmas bertugas melayani 10.000 penduduk. Sama halnya dengan Satpol PP di atas, jumlah Linmas masih kurang karena keterbatasan kemampuan daerah dalam menambah jumlah Linmas. Oleh karena itu, semua komponen masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kondisi kamtibmas yang lebih baik.

C. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bencana kebakaran menitikberatkan terhadap 2 (dua) aspek pelayanan yaitu; cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap (*respon time*) penanggulangan kebakaran, yakni 15 menit dari Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Cakupan pelayanan kebakaran diharapkan mencapai 75 persen dari jumlah luas wilayah.

Kondisi pada saat ini menggambarkan bahwa Wilayah Manajemen Kebakaran di Kota Subulussalam hanya memiliki 3 (tiga) Pos WMK yang terdiri dari WMK Kecamatan Simpang Kiri, WMK Kecamatan Sultan Daulat dan WMK kecamatan Rundeng. Khusus untuk Kecamatan Penanggalan tidak memiliki WMK dikarenakan secara *respon time* masih dalam wilayah WMK kecamatan Simpang Kiri. Lain halnya untuk Kecamatan Longkip yang sampai pada saat ini belum memiliki WMK, padahal jarak pusat ibu kota dengan Longkip lebih dari 15 menit perjalanan darat. Kondisi sarana lain yang mendukung aktifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah mobil pemadam kebakaran yang secara kuantitas dan kualitas masih jauh dari kelayakan. Sampai pada tahun 2013 jumlah mobil pemadam kebakaran berjumlah 4 unit yang tersebar di setiap kecamatan, ditambah lagi dengan minimnya alat dan sumberdaya manusia yang masih memprihatinkan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran antara lain: 1) pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipeologi kebakaran (Mitigasi); 2) penyuluhan dan penyebaran informasi tentang pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran; 3) simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha; 4) pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran; dan 5) pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi dan operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran serta penambahan personil pemadam dengan tidak melupakan tingkat kesejahteraannya.

D. Cakupan Sarana dan prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu indikatornya adalah tersedianya perkantoran pemerintahan desa di setiap desa. Berikut disajikan cakupan kantor pemerintahan desa di Kota Subulussalam pada **Tabel 2.75**.

Tabel 2.75
Cakupan Kantor Pemerintahan Desa
di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Kantor Desa	0	0	1	1	1
Jlh. Seluruh Pemerintahan Desa	74	74	74	74	82
Persentase (%)	0	0	1,35	1,35	1,22

Sumber: BPMD, Kota Subulussalam

Badan Pemberdayaan Masyarakat memberikan informasi hingga tahun 2013 hanya ada satu kampung yang memiliki prasarana pemerintahan kampung yang baik, yaitu kampung Pasar Rundeng yang dibangun dari anggaran APBA tahun 2011. Pemerintah Kota Subulussalam mengupayakan pembangunan kantor pemerintahan kampung secara bertahap sehingga seluruh desa/kampung memiliki kantor pemerintahan dengan cara: 1) mengfungsikan kantor bekas UPT transmigrasi menjadi kantor desa; 2) membangun kantor pemerintahan desa/kampung yang belum tersedia secara bertahap.

2.3.1.22. Ketahanan Pangan

A. Regulasi Ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007; PP Nomor 38 tahun 2007). Di samping itu, Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Namun sampai pada tahun 2013 belum mempunyai peraturan (qanun)/regulasi terkait ketahanan pangan.

B. Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Subulussalam dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik (lokal) dan distribusi bahan pangan dari luar daerah. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi

dan finansial. Jumlah ketersediaan energi dan protein perkapita perhari di Kota Subulussalam disajikan pada **Tabel 2.76**.

Tabel 2.76
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein perkapita Perhari
di Kota Subulussalam Tahun 2013

No	Jenis Bahan Makanan	Ktersediaan Energi dan Protein	
		Energi	Protein
		Kkal/kap/hari	Gr/kap/hari
1	Padi-padian	3396	84,23
2	Makanan Berpati	87	0,65
3	Gula	120	0
4	Buah biji berminyak	37	2,75
5	Buah-buahan	112	1,28
6	Sayur-sayuran	93	5,01
7	Daging	67	4,78
8	Telur	8	0,58
9	Susu	2	0,08
10	Ikan	9	1,61
11	Minyak dan Lemak	9	0,01
	Total	3940	100,98

Sumber: Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan Kota Subulussalam, 2014

Tabel 2.76 menunjukkan bahwa gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM). Rata-rata kuantitas ketersediaan pangan perkapita perhari untuk energi mencapai 3.940 kkal/kap/hari dan protein 100,98 gram/kap/hari. Angka ini sudah melebihi angka rekomendasi hasil widiya karya nasional pangan dan gizi (WNPG) VIII tahun 2004 yaitu ketersediaan energi 2200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari. Ketersediaan bahan pangan ini tidak hanya dihasilkan oleh produksi lokal, tetapi lebih banyak di pasok/distribusi dari luar Kota Subulussalam.

C. Tenaga Penyuluh Pertanian

Penyuluhan Pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jumlah tenaga penyuluh pertanian di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.77**.

Tabel 2.77
Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian
di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Penyuluh Pertanian (org)	5	22	67	67	67
Tingkat Pendidikan :					
a. Sarjana	-	2	7	7	8
b. Diploma	1	1	1	1	2
c. Tingkat SLTA	4	19	59	59	57

Sumber: BPPKP Kota Subulussalam tahun 2014

Tabel 2.77 menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah penyuluh masih kurang, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani dan jumlah desa. Idealnya 1 orang penyuluh membina 1 desa, Kota Subulussalam memiliki 82 desa/kampong sehingga memerlukan 82 orang penyuluh. Dengan demikian Kota Subulussalam masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 15 orang. Dengan jumlah 67 orang, ini berarti 1 (satu) orang penyuluh membina 2-3 desa. Tingkat pendidikan penyuluh yang berkualifikasi sarjana dan diploma masih sangat sedikit, hanya 10 orang selebihnya lulusan setingkat menengah atas. Pada umumnya penyuluh belum mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi penyuluhan.

2.3.1.23. Pemberdayaan masyarakat dan Desa

A. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Hal ini juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat melalui PKK. Jumlah PKK di Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013 sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.78**.

Tabel 2.78
Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah PKK Aktif	74	74	74	74	74
Jumlah PKK	74	74	74	74	82
Persentase (%)	100	100	100	100	90,24

Sumber: BPMD, Kota Subulussalam

Tabel 2.78 menunjukkan bahwa jumlah PKK pada tahun 2013 sebanyak 82 organisasi dengan tingkat keaktifan organisasi PKK hanya 90,25 persen. Sedangkan pada tahun 2009-

2012 jumlah PKK sebanyak 74 organisasi dan keseluruhannya aktif. Tidak aktifnya organisasi PKK sebanyak 8 desa/kampong (9,76%) disebabkan oleh desa-desa tersebut merupakan desa pemekaran.

B. Posyandu aktif

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu melahirkan, perkembangan indikator kesehatan tersebut sangat erat kaitannya dengan pos pelayanan terpadu (posyandu). Persentase posyandu aktif di Kota Subulussalam mencapai 100 persen seperti yang disajikan pada **Tabel 2.79**. Posyandu aktif tersebut memiliki kontribusi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi.

Tabel 2.79
Jumlah Posyandu Aktif di Kota Subulussalam
Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Posyandu Aktif	106	110	110	101	106
Total Posyandu	106	110	110	101	106
Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Kota Subulussalam

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga masyarakat pedesaan, diperlukan suatu inovasi yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi. Dalam hal ini, penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dirasa sangat diperlukan, mengingat teknologi ini sangat dekat dengan masyarakat dan mudah untuk dikembangkan.

Untuk pengembangan teknologi tepat guna pemerintah kota Subulussalam melalui badan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pembinaan pada tahun 2012 dan 2013 dengan jumlah peserta 10 rang tiap tahunnya yang terdiri dari 2 orang pada setiap kecamatan dengan jenis pelatihan keterampilan tekstil (Jahit Bordir) seperti yang disajikan pada **Tabel 2.80**. Hal ini dikarenakan kemampuan fiskal pemerintah Kota Subulussalam yang terbatas.

Tabel 2.80
Pelaksanaan Pelatihan Posyantekdes
di Kota Subulussalam Tahun 2011 - 2013

NO.	Kecamatan	Peserta (Orang)			Nama Sub kegiatan
		2011	2012	2013	
1	Simpang Kiri	-	2	2	- Pelatihan Keterampilan Tekstil (Jahit Bordir)
2	Penanggalan	-	2	2	
3	Rundeng	-	2	2	
4	Sultan Daulat	-	2	2	
5	Longkip	-	2	2	
JUMLAH		-	10	10	

Sumber: BPMD, Kota Subulussalam

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk pengembangan TTG antara lain: 1) meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan TTG; dan 2) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna sektor ekonomi kreatif masyarakat seperti: industri pengolahan rotan, pengemasan lele asap, pengolahan limbah giling tandan kelapa sawit, dan berbagai jenis kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

2.3.1.24. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2009-2013 di Kota Subulussalam masih sangat rendah, hingga tahun 2013 belum ada 1 (Satu) SKPD pun yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Hal ini disebabkan Kota Subulussalam yang merupakan kota yang baru terbentuk. SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kota Subulussalam masih berbenah dalam segala aspek pelayanan terhadap masyarakat termasuk tata pengelolaan arsip yang baik dan benar. Disamping itu masih banyak SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Subulussalam yang memiliki gedung kantor dan prasarana yang belum memadai sehingga belum dapat menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku.

2.3.1.25. Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi. Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan dengan mudah, transparan, akurat, efektif dan efisien. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta kontennya dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kota Subulussalam terdiri dari: akses internet, *hotspot*, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2013, jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet di Kota Subulussalam sebanyak 25 persen SKPD, jumlah titik *hotspot* sebanyak 2 titik, serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 3 (tiga) unit. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2012) jumlah sarana/ prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang mengalami peningkatan hanya ketersediaan akses internet, di beberapa SKPD. Operator seluler yang tersedia di Kota Subulussalam adalah telkomsel, Indosat dan xl. Berdasarkan data Dishubkomtel Aceh untuk cakupan layanan jaringan telpon genggam di Kota Subulussalam sudah mampu mencakup 80 persen wilayah Kota Subulussalam dengan akses jaringan GSM, untuk layanan data baru sekitar 30 persen yang dapat mengakses GPRS dan HSDPA, sedangkan 20 persen lainnya hanya bisa mengakses GPRS saja.

2.3.1.26. Perpustakaan

A. Jumlah perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana didalamnya terdapat berbagai jenis dan kelompok bahan pustaka yang diperuntukan bagi masyarakat luas yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selama kurun waktu tahun 2009 – 2013, Kota Subulussalam selain memiliki 1 (satu) unit perpustakaan daerah, juga memiliki perpustakaan kampung sebanyak 24 unit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.81**.

Tabel 2.81
Jumlah Perpustakaan di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2013

Tipe Perpustakaan	Tahun (unit)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Perpustakaan Daerah	n/a	n/a	n/a	1	1
Perpustakaan Kampung	n/a	n/a	n/a	21	24
Total Perpustakaan	n/a	n/a	n/a	22	25

Perpustakaan Kampong adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Subulussalam ke depan perlu mengupayakan sarana gedung perpustakaan gampong sebanyak 58 unit untuk kampong yang belum memiliki perpustakaan.

B. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Subulussalam, jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Subulussalam tahun 2013 hanya 1.260 orang dengan rata-rata pengunjung 4 orang perharinya. Ini menunjukkan minat baca masyarakat masih sangat rendah. Pemerintah Kota Subulussalam perlu melaksanakan sosialisasi minat baca bagi masyarakat melalui media cetak (poster dan baliho) dan elektronik (televisi dan radio).

C. Koleksi Buku yang tersedia Di Perpustakaan Daerah

Sama halnya dengan ketersediaan jumlah perpustakaan, banyaknya jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Fasilitas yang memadai belum terlihat di perpustakaan Umum Kota Subulussalam dengan persediaan buku perpustakaan masih terbatas yang menyebabkan minimnya pengunjung ke perpustakaan Kota Subulussalam. Buku yang tersedia di perpustakaan Kota Subulussalam sebanyak 10.035 eksemplar yang pengadaanya dibantu oleh perpustakaan provinsi, perpustakaan nasional dan pihak ketiga. Koleksi buku yang sebanyak 10.035 eksemplar tersebut sangat jauh dari standar kesediaan buku. Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi buku-buku koleksi perpustakaan Kota Subulussalam.

2.3.2. Fokus Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Tidak perlu di ragukan lagi bahwa Indonesia secara umum adalah negara dengan potensi agraris yang sempurna, memberikan ruang seluas-luasnya untuk memanfaatkan potensi pertanian tersebut. Ketergantungan kita pada pertanian sangat tinggi sebab hampir seluruh kegiatan perekonomian kita berpusat di sektor ini. Pengentasan

kemiskinan dan juga pencapaian ketahanan pangan merupakan sasaran tujuan pembangunan, maka tak pelak lagi bila pembangunan sektor pertanian merupakan satu cara pencapaian tujuan tersebut.

A. Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal

Tabel 2.82 menunjukkan bahwa produksi padi sawah pada tahun 2010 sebesar 2.212 ton meningkat menjadi 4.175 pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 produksi padi sawah 3.982 ton. Demikian juga dengan komoditi padi ladang mengalami peningkatan dari 181 ton pada tahun 2010 menjadi 2.071 ton pada tahun 2013 dan menurun menjadi 1.127 ton pada tahun 2013. Sedangkan komoditi jagung mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 1.842 ton menjadi 2.688 ton tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 terus mengalami penurunan yaitu masing-masing 1.842 ton (2012) menjadi 1.536 ton (2013). Selanjutnya komoditi kedelai juga mengalami penurunan produksi, dimana pada tahun 2010 mencapai 181 ton turun menjadi 96 ton pada tahun 2013.

Tabel 2.82
Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Lainnya
di Kota Subulussalam Tahun 2011 - 2013

Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang			Jagung			Kedelai		
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2010	1.215	1.113	2.212	712	689	181	651	637	1.842	141	136	181
2011	1.404	924	2.732	345	322	782	1.025	903	2.688	66	64	86
2012	1.213	1.309	4.175	460	558	2.071	1.159	1.264	3.981	15	29	38
2013	1.087	866	3.982	446	322	1.366	434	439	1.870	26	24	35
Rata-rata	1.230	1.053	3.275	491	473	1.100	817	811	2.595	62	63	85

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Subulussalam Tahun 2014

Catatan: Lahan padi sawah *existing* berdasarkan Qanun RTRW Kota Subulussalam seluas 244,14 Ha dan rencana pengembangan sawah seluas 556,08 Ha

Produktivitas komoditi pangan diperoleh dari perbandingan antara jumlah produksi dengan luas panen. Namun luas panen dan luas tanam yang berbeda menyebabkan angka produktivitas menjadi tidak bisa menjadi acuan untuk menentukan produktivitas suatu komoditi pertanian. Berbedanya luas panen dan luas tanam dapat disebabkan oleh banjir, terjangkit penyakit dan serangan hama dan ketiadaan irigasi. Selain dari pada itu juga dikarenakan oleh kesalahan penerapan teknologi pembenihan dan penggunaan pupuk yang tidak tepat.

Produktivitas padi sawah Kota Subulussalam pada tahun 2010 sebesar 1,99 ton/Ha meningkat menjadi 3,19 ton/Ha pada tahun 2012. Sementara produktivitas padi sawah pada tahun 2013 sebesar 4,60 ton/Ha tidak bisa dijadikan acuan karena luas panenanya jauh berkurang dari luas tanam. Produktivitas padi sawah Kota Subulussalam sebesar 3,19 ton/Ha masih di bawah rata-rata produktivitas padi sawah provinsi Aceh (4,6 ton/ha) dan nasional (5,12 ton/Ha). Demikian juga dengan komoditi padi ladang mencapai 3,06 ton/Ha

(Aceh 2,47 ton/Ha), jagung 1,46 ton/Ha (Aceh 3,83 ton/Ha) dan kedelai 1,35 ton/Ha (Aceh 1,44 ton/Ha). Produktivitas komoditi pangan di Kota Subulussalam secara rinci disajikan pada **Tabel 2.83**.

Tabel 2.83
Produktivitas Komoditi Pangan
di Kota Subulussalam Tahun 2011 - 2013

Tahun	Produktivitas/ton/Ha			
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai
2010	1,82	0,25	2,83	1,28
2011	1,95	2,27	2,62	1,30
2012	3,44	4,50	3,43	2,53
2013	3,66	3,06	4,31	1,35
Rata-rata	2,72	2,52	3,30	1,62

Sumber: Bappeda Kota Subulussalam (data diolah), 2014

Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan antara lain: 1) penerapan anjuran teknologi budidaya dan penggunaan varietas unggul; 2) pengendalian hama dan penyakit tanaman padi; 3) Peningkatan fungsi penyuluh pertanian; 4) peningkatan sarana produksi pertanian; dan 5) peningkatan luas tanam khusus untuk tanaman padi ladang, kedelai dan jagung.

B. Sub Sektor Perkebunan

Tabel 2.84 menunjukkan bahwa tingkat produksi tanaman kelapa sawit (dalam wujud produksi) Tandan Buah Segar (TBS) cenderung meningkat. Pada tahun 2009 jumlah produksi TBS sebanyak 67.912 ton dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 5.878 Ha, meningkat menjadi 125.518 ton dengan luas areal TM 10.721 Ha pada tahun 2012. Demikian juga dengan produksi tanaman kakao cenderung meningkat. Pada tahun 2009 jumlah produksi kakao sebanyak 92 ton dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 254 Ha, meningkat menjadi 130 ton dengan luas areal TM 313 Ha pada tahun 2012. Sebaliknya produksi karet cenderung menurun, pada tahun 2009 sebesar 4.919 ton dengan luas areal TM 3.741 Ha menjadi 2.306 ton dengan luas areal TM 3.080 Ha pada tahun 2012.

Tabel 2.84
Jumlah Produksi Kelapa Sawit, Karet dan Kakao
di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2012

Tahun	Kelapa Sawit				Karet				Kakao (cokelat)			
	TBM (Ha)	TM (Ha)	TR (Ha)	Prod (Ton)	TBM (Ha)	TM (Ha)	TR (Ha)	Prod (Ton)	TBM (Ha)	TM (Ha)	TR (Ha)	Prod (Ton)
2009	301	5878	6342	67.912	377	3.741	1210	4919	126	254	10	92
2010	3.389	9.483	443	117.684	n/a	n/a	n/a	4.727	n/a	n/a	n/a	108
2011	n/a	n/a	n/a	117.736	n/a	n/a	n/a	2.189	n/a	n/a	n/a	108
2012	5088	10721	613	125.518	381	3.038	967	2.306	483	313	20	130

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Subulussalam tahun 2009 – 2013

Ket : TBM (Tanaman Belum Menghasilkan); TM (Tanaman Menghasilkan); TR (Tanaman Rusak)

Produktivitas kelapa sawit, karet dan kakao di Kota Subulussalam Tahun 2009 – 2012 disajikan pada **Tabel 2.85**. Produktivitas kelapa sawit, karet dan kakao cenderung menurun selama periode 2009-2012. Pada Tahun 2012 produktivitas kelapa sawit sebesar 11,71 ton/Ha, karet dan kakao masing-masing sebesar 0,76 ton/Ha dan 0,42 ton/Ha .

Tabel 2.85
Produktivitas Kelapa Sawit, Karet dan Kakao
di Kota Subulussalam Tahun 2009 - 2012

Tahun	Produktivitas (Ton/Ha)		
	Kelapa Sawit	Karet	Kakao
2009	11,55	1,31	0,36
2010	12,41	n/a	n/a
2011	n/a	n/a	n/a
2012	11,71	0,76	0,42
Rata-rata	11,89	1,04	0,39

Sumber: Bappeda Subulussalam (data diolah), 2013

Catatan : Produktivitas diperoleh dari hasil bagi dari produksi (ton) dengan Luas Tanaman Menghasilkan pada Tabel 2.88.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya produksi kelapa sawit, karet dan kakao antara lain: 1) kurangnya pemeliharaan; 2) berkurangnya Tanaman Menghasilkan (TM); 3) bertambahnya jumlah Tanaman Rusak (TR). Upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit, karet dan kakao antara lain: 1) peningkatan pemeliharaan dan melaksanakan replanting (menanam kembali) untuk semua komoditi perkebunan; 2) peningkatan penerapan anjuran teknologi budidaya yang baik; 3) perluasan areal penanaman; dan 4) peningkatan penyuluhan kepada petani.

C. Sub Sektor Peternakan

Populasi ternak (besar dan kecil) secara umum menunjukkan peningkatan, pada periode tahun 2008 -2012, kecuali kerbau pada tahun 2012. Secara rinci populasi ternak di Kota Subulussalam disajikan pada **Tabel 2.86**.

Tabel 2.86
Populasi Ternak di Kota Subulussalam
Pada Tahun 2009-2013

NO	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Sapi	1.366	1.351	1.616	1.862	2.562
2	Kambing	4.603	4.381	4.830	6.685	6.896
3	Kerbau	42	80	138	104	107
4	Domba	880	513	592	1.563	1.567
5	Ayam Kampung	34.325	18.769	18.967	19.950	55.860
6	Ayam Pedaging	81.250	243.800	189.668	188.600	52.900
7	Itik	5.211	2.252	2.825	2.950	2.850

Sumber: Subulussalam Dalam Angka, 2014

Usaha peternakan secara umum sampai saat ini merupakan usaha sampingan/usaha rumah tangga, terutama pada ternak besar seperti sapi dan kerbau, sehingga produksi dan produktivitasnya masih dikategorikan rendah. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak (kecil dan besar) antara lain: 1) peningkatan populasi ternak; dan 2) pengembangan kawasan peternakan terpadu.

Jika meninjau produksi daging di Kota Subulussalam berdasarkan data statistik sejak tahun 2009-2013 rata-rata setiap tahunnya untuk daging sapi 54.144 Kg, daging kambing 2.750 Kg, daging kerbau 4.500 Kg, daging domba 1.650 Kg, daging ayam kampung 20.800 Kg, ayam pedaging 256.760 Kg dan daging itik 1.496 Kg.

D. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian dalam arti luas dibedakan menjadi 5 (lima) subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor kehutanan, dan subsektor peternakan. Masing-masing subsektor dengan dasar klasifikasi tertentu, dirinci lebih lanjut menjadi subsektor yang lebih spesifik. Nilai tambah sektor pertanian dalam perhitungan PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah dari subsektor-subsektor tersebut dan perhitungan dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Nilai tambah subsektor-subsektor tersebut dihitung dengan menggunakan produksi. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan harga konstan cenderung menurun di Kota Subulussalam tahun 2010-2013 seperti yang disajikan pada **Tabel 2.87**.

Tabel 2.87
Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan Harga Konstan Di Kota Subulussalam Tahun 2010-2013

Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Persentase (%)	43,86	42,25	41,27	40,09
(Juta Rupiah)	144.449,50	116.486,08	120.485,22	124.122,47

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Rata-rata persentase penurunan kontribusi subsektor pertanian berkisar 1 (satu) persen per tahun. Namun sektor ini tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar dari sektor-sektor lainnya. Menurunnya kontribusi sektor pertanian ini erat kaitannya dengan penurunan jumlah produksi dan produktifitas beberapa subsektor pertanian secara umum. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam dalam meningkatkan kontribusi subsektor pertanian antara lain: 1) meningkatkan jumlah produksi dan produktivitas semua subsektor pertanian; 2) meningkatkan akses informasi dan modal bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian; dan 3) mempermudah akses petani dalam mendapat modal usaha tani.

E. Kontribusi Beberapa Subsektor Pertanian Terhadap PDRB

Persentase kontribusi beberapa subsektor pertanian terhadap PDRB Kota Subulussalam periode tahun 2010-2013 disajikan pada **Tabel 2.88**. kontribusi subsektor kehutanan rata-rata sebesar 20,93 persen dan perkebunan 8,19 persen merupakan 2 (dua) subsektor yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan subsektor lainnya. Subsektor perikanan merupakan subsektor penyumbang terkecil yaitu sebesar 2,23 persen.

Tabel 2.88
Persentase kontribusi Beberapa Subsektor Pertanian terhadap PDRB
Kota Subulussalam Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Kontribusi Sub Sektor tanaman Pangan terhadap PDRB (juta rupiah)	15.176,81	15.220,56	15.361,27	15.483,56
Persentase (%)	5,81	5,52	5,26	5
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	17.140,81	20.728,12	25.909,7	30.461,38
Persentase (%)	6,56	7,51	8,87	9,83
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	13.676,13	14.288,78	14.737,44	15.326,94
Persentase (%)	5,24	5,18	5,04	4,95
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	62.532,69	60.061,91	58.000,77	56.040,75
Persentase (%)	23,96	21,78	19,86	18,10
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	5.923,06	6.186,71	6.476,04	6.799,84
Persentase (%)	2,27	2,24	2,21	2,19

Sumber: Subulussalam Dalam Angka, 2014

2.3.2.2. Kehutanan

A. Luas Kawasan Hutan

Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2014-2034 menetapkan luas kawasan hutan di Kota Subulussalam pada tahun 2014 seperti disajikan **Tabel 2.89**. Hutan di kawasan lindung seluas 23.781,65 Ha, yang terdiri dari Hutan Lindung 19.046,08 Ha, Suaka Margasatwa Rawa Singkil seluas 3.249,62 Ha dan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.485,95 Ha. Selanjutnya hutan di kawasan budidaya seluas 12.573,54 Ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 10.548,47 Ha dan hutan produksi konversi seluas 2.025,07 Ha. Peta kawasan hutan di Kota Subulussalam dapat di lihat pada **Gambar 2.8**.

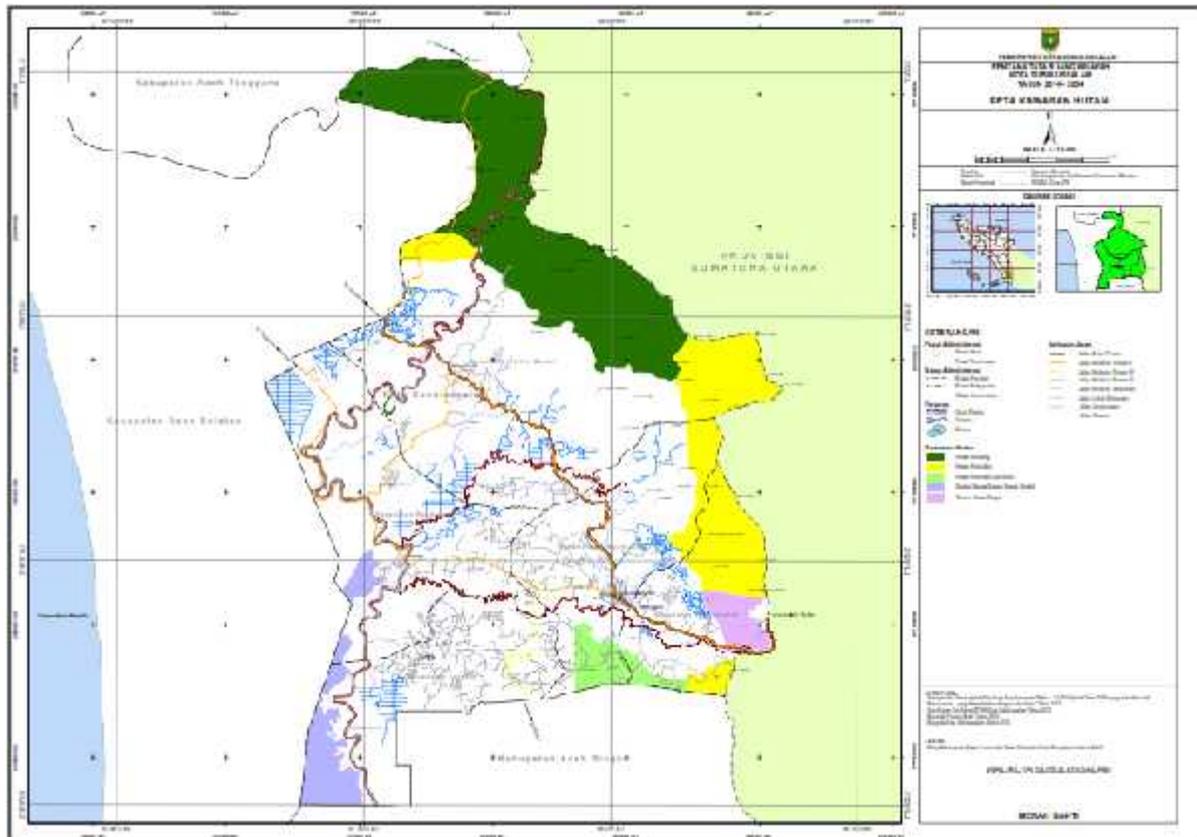
Tabel 2.89
Luas Kawasan Hutan di Kota Subulussalam
Tahun 2014

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)
I	HUTAN DI KAWASAN LINDUNG	23.781,65
	Hutan Lindung	19.046,08

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)
	Suaka Margasatwa Rawa Singkil	3.249,62
	Tahura Plasma Nutfah Kapur	1.485,95
II	HUTAN DI KAWASAN BUDIDAYA	12.573,54
	Hutan Produksi	10.548,47
	Hutan Produksi Konversi	2.025,07
TOTAL LUAS KAWASAN HUTAN		36.355,19

Sumber: Qanun RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.8
Peta Kawasan Hutan Kota Subulussalam



Sumber: RTRW Kota Subulussalam tahun 2014-2034

B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Hutan memiliki fungsi yang sangat strategis bagi keanekaragaman hayati dan lingkungan. Namun kerusakan hutan dapat menyebabkan bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan pemanasan global. Praktek *illegal logging* dan *illegal trade*, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Luas lahan hutan yang perlu rehabilitasi di Kota Subulussalam seluas 10.279 Ha.

Upaya Pemerintah untuk menurunkan luas lahan kritis dilakukan dengan cara mereboisasi dan merehabilitasi lahan kritis. Jenis tegakan hutan yang direkomendasikan adalah pohon yang bermanfaat ganda minimal bernilai ekonomis bagi masyarakat.

C. Kerusakan Kawasan Hutan

Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Luas deforestasi di Kota Subulussalam pada tahun 2013 sebesar 111 Ha atau seluas 0,31 persen dari total luas hutan **36.355,19** Ha. Upaya Pemerintah untuk menurunkan luas deforestasi antara lain: 1) reboisasi, rehabilitasi hutan ; dan 2) pembinaan masyarakat tentang konservasi hutan dan lahan.

2.3.2.3. Perikanan

Potensi sumberdaya ikan di Kota Subulussalam cukup besar, mengingat Kota Subulussalam mempunyai jumlah panjang sungai sekitar 16,72 Km. Lahan budidaya perikanan dapat memanfaatkan lahan daratan basah (sawah), kolam, tambak dan rawa. Secara rinci produksi ikan di Kota Subulussalam tersaji pada **Tabel 2.90**.

Tabel 2.90
Produksi Ikan di Kota Subulussalam
Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun (Ton)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Produksi Perikanan Tangkap	253	148,85	271,02	307,43	345
Perikanan Budidaya Kolam	31.12	43.79	33.65	30.88	30.88
- Budidaya Kolam	16.89	29.56	19.42	16.65	16.65
- Budidaya Tambak	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23
Jumlah	284,12	192,64	304,67	338,31	375,88

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Produksi perikanan dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Produksi perikanan tangkap cenderung meningkat mencapai 345 ton pada tahun 2013. Demikian juga dengan produksi perikanan budiaya kolam yang mencapai 30,88 ton pada tahun 2013. Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan lele, gabus, mas, nila, belut dan beberapa ikan jenis lainnya.

Kebutuhan akan konsumsi ikan masyarakat Kota Subulussalam tiap tahunnya terus meningkat, hal ini bisa dilihat dari data yang menunjukkan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk ikan pada tahun 2011 sebesar Rp. 33.979, pada tahun 2012 sebesar Rp. 41.514 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 44.861. Peningkatan pengeluaran untuk membeli ikan ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Dengan asumsi harga ikan minimal Rp. 15.000/Kg, maka pada tahun 2013 penduduk Kota Subulussalam mengkonsumsi ikan minimal sebanyak 2,9 Kg/perkapita/bulan dan dikalkulasikan setahun mengkonsumsi ikan sebanyak 34,8 Kg/kapita/tahun. Jika dikalkulasikan dengan total jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 72.414 jiwa, maka jumlah konsumsi rata-rata penduduk Kota Subulussalam adalah berkisar 210.000,6 Kg/bulan atau 210 ton/bulan dan dalam setahun konsumsi ikan rata-rata berkisar 2.520 ton/tahun. Kondisi produksi pada tahun 2013 menunjukkan jumlah produksi ikan di Kota Subulussalam sebanyak 338,31 ton sedangkan jumlah rata-rata konsumsi ikan sebanyak 2.520 ton/tahun, sehingga ketersediaan ikan masih sangat rendah yakni kekurangan sebanyak 2.181,69 ton/tahun.

Sebagian besar penangkapan ikan oleh masyarakat masih berkisar pada penangkapan di sungai dan perairan atau masih terbatas pada penggunaan alat tangkap sederhana. Hal ini dapat terlihat dari jumlah alat dan armada yang digunakan seperti perahu tanpa motor/sampam berjumlah 52 unit dan perahu motor tempel yang berjumlah 51 unit (BPS Subulussalam tahun 2012)

Kedepan diperlukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pengoptimalan pembangunan perikanan terutama dalam sektor budidaya ikan untuk peningkatan produksi, memanfaatkan penerapan dan implementasi teknologi dan informasi perikanan dan mengoptimalkan peran balai benih ikan dalam rangka penyediaan benih ikan unggul.

2.3.2.4. Energi dan Sumberdaya Mineral

A. Pertambangan Berizin

Pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sejauh ini perkembangan tingkat kesadaran pemilik usaha pertambangan di Kota Subulussalam sudah sangat bagus. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah perusahaan pertambangan yang sudah memiliki izin dari 4 perusahaan pada tahun 2010 meningkat menjadi 10 perusahaan pada tahun 2012. Namun demikian masih banyak terdapat usaha pertambangan khususnya galian C yang beroperasi secara liar dalam wilayah Kota Subulussalam. Hal ini disebabkan oleh: 1) keberadaan penambang yang sudah berlangsung turun temurun; 2) ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan; dan 3) keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian/ketrampilan masyarakat bawah.

Mengingat permasalahan pertambangan tanpa izin begitu kompleks, maka penanggulangannya memerlukan konsep yang terintegrasi dan harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan permasalahan faktual yang terjadi dibidang sosial, ekonomi, hukum dan politik, maka penanggulangan masalah pertambangan liar ini menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan seiring dengan penegakan hukum. Artinya, bagaimana kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip praktek pertambangan yang baik dan benar.

B. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kota Subulussalam periode tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan masih berkisar 1 persen (**Tabel 2.91**). Nilai ini berarti bahwa kontribusi pada sektor ini terhadap PDRB daerah sangat rendah. Kegiatan pertambangan di Kota Subulussalam lebih mengarah kepada kegiatan penggalan. Secara umum kontribusi sektor pertambangan di Kota Subulussalam banyak didapat dari retribusi beberapa perusahaan penggalan. Namun masih banyak juga beberapa oknum masyarakat yang melakukan penggalan tidak memiliki izin sehingga retribusi tidak didapat.

Tabel 2.91
Persentase kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB
Kota Subulussalam Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	2.914,55	3.092,65	3.278,28	3.451,69
Persentase (%)	1,12	1,12	1,12	1,11

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Upaya Pemerintah Subulussalam dalam meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB antara lain: 1) promosi potensi pertambangan kepada investor dalam dan luar negeri; dan 2) meningkatkan pengawasan terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan.

2.3.2.5. Sektor Perdagangan

A. Jenis Usaha

Jumlah Jenis Usaha di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013 disajikan secara rinci pada **Tabel 2.92**. Jenis usaha di sektor perdagangan di Kota Subulussalam didominasi oleh warung, toko dan kios.

Tabel 2.92
Jumlah Jenis Usaha di Kota Subulussalam
Tahun 2009-2013

Jenis Usaha	Jumlah Usaha (Unit)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pasar Umum/desa	0	0	0	1	1
Toko	38	57	76	280	146
Kios	91	123	126	380	125
Warung	155	197	164	373	169
Rumah Makan/Restoran	3	13	13	25	42
Total	287	390	379	1.059	483

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Kota Subulussalam

Tabel 2.96 menunjukkan bahwa usaha toko pada tahun 2009 hanya terdapat 38 unit kemudian meningkat menjadi 280 unit pada tahun 2012. Usaha kios pada tahun 2009 hanya 91 unit meningkat menjadi 380 unit pada tahun 2012. Peningkatan jumlah usaha di Kota Subulussalam tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota untuk memajukan perekonomian masyarakatnya. Sejak tahun 2011 sudah terdapat pusat jajanan malam yang terdiri dari 23 kios makan dan minuman yang terletak di lapangan beringin Kecamatan Simpang Kiri.

B. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan adanya peningkatan, sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 naik sebesar 4 persen. Pada tahun 2010 nilai kontribusi sektor ini sebesar 28,40 persen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi 29,87 persen, pada tahun 2012 naik lagi sebesar 30,82 persen dan pada tahun 2013 naik menjadi 31,87 persen. Berikut disajikan secara rinci jumlah persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Subulussalam sejak tahun 2010-2013 pada **Tabel 2.93**.

Tabel 2.93
Persentase kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kota Subulussalam Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	74.100,47	82.345,05	89.988,33	98.664,74
Persentase (%)	28,40	29,87	30,82	31,87

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam dalam meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB antara lain: 1) peningkatan kualitas, kuantitas, jalur distribusi dan fasilitas infrastruktur pemasaran; dan 2) peningkatan nilai tambah komoditi agar tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.

2.3.2.6. Perindustrian

A. Jenis Industri

Potensi industri di Kota Subulussalam secara keseluruhan berjumlah 109 unit usaha, yang terdiri dari industri dalam skala kecil sampai besar. Kehadiran industri secara langsung juga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah. Berikut ditampilkan beberapa jenis industri di Kota Subulussalam. Jumlah jenis industri di Kota Subulussalam disajikan pada **Tabel 2.94**.

Tabel 2.94
Jumlah Jenis Industri di Kota Subulussalam
Tahun 2010-2013

Jenis Industri	Tahun (unit)			
	2010	2011	2012	2013
Pertanian	1	-	12	
Kayu	11	1	32	32
Logam	4	-	12	
Makanan	11	23	80	78
Pakaian	9	5	9	9
Industri lainnya	123	38	142	109

Sumber: Subulussalam Dalam Angka 2014

Pertumbuhan sektor industri di Kota Subulussalam sangat cepat. Tabel 2.98 menunjukkan bahwa jumlah industri yang beroperasi di Kota Subulussalam terus bertambah bahkan mencapai dua kali lipat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Pertumbuhan ini akan mampu memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan sektor industri melalui pembinaan para pelaku usaha industri (hulu dan hilir) khususnya industri kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk kelompok – kelompok industri binaan pemerintah.

B. Kontribusi Sektor Industri Non Migas

Nilai kontribusi sektor industri non migas dari tahun 2010 – 2013 disajikan pada **Tabel 2.95**. Kontribusi Sektor Industri Non migas terhadap PDRB rata-rata sebesar sebesar 1,20 persen. Pertumbuhan positif sektor ini terlihat dari usaha-usaha industri baru yang terlihat mulai beroperasi di Kota Subulussalam khususnya wilayah Simpang Kiri. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam dalam meningkatkan kontribusi sektor industri non migas berupa pembinaan yang berkesinambungan agar usaha – usaha industri yang baru tersebut dapat bertahan dan mampu bersaing dengan produk yang masuk dari Sumatra Utara.

Tabel 2.95
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kota Subulussalam
Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun (juta rupiah)			
	2010	2011	2012	2013
Kontribusi Sektor Industri Non migas terhadap PDRB	3.154	3.317	3.496,54	3.693,13
Persentase (%)	1,21 %	1,20 %	1,20 %	1,19 %

Sumber: Subulussalam Dalam Angka

2.3.2.7. Ketransmigrasian

A. Transmigrasi Lokal

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Jumlah transmigrasi lokal di Kota Subulussalam tahun 2012-2013 ditunjukkan pada **Tabel 2.96**.

Tabel 2.96
Jumlah Transmigrasi Lokal
di Kota Subulussalam Tahun 2012-2013

Tahun	Wilayah Penempatan	KK	Jiwa
2012	Suak Jampak	100	387
2013	Bukit Alim	100	388

Sumber: Disnakertrans Kota Subulussalam

Sejauh ini Pemerintah telah menempatkan 200 KK Transmigrasi Lokal dengan penempatan 100 KK pada tahun 2012 yang berlokasi di Suak Jampak dan 100 KK lagi di tempatkan pada tahun 2013 dengan lokasi penempatan di Bukit Alim. Kedua lokasi transmigrasi ini merupakan jenis transmigrasi swakarsa. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam dalam pengelolaan transmigrasi lokal yaitu dengan menempatkan lebih banyak lagi transmigrasi lokal dan memberikan fasilitas layak pada transmigrasi lokal.

2.3.2.8. Pariwisata

A. Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan di Kota Subulussalam periode tahun 2010-2013 dapat dilihat pada **Tabel 2.97**. Jumlah objek wisata yang ada di Kota Subulussalam sebanyak 6 (enam) lokasi. Jumlah kunjungan wisata ada yang datang dari mancanegara dan wisatawan lokal. Jumlah kunjungan wisata ke objek wisata cenderung menurun, pada tahun 2010 berjumlah 23.600

orang menjadi 14.209 orang pada tahun 2013 atau menurun sebesar 40,00 persen. Hal ini disebabkan oleh kurang baiknya sarana dan prasarana fisik objek wisata dan belum optimalnya promosi objek wisata.

Tabel 2.97
Jumlah Kunjungan di Kota Subulussalam
Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah Obyek Wisata	6	6	6	6
Jumlah Kunjungan Wisata (org)	23.600	23.769	14.209	14.209
Rata-rata Kunjungan per Obyek Wisata (orang)	3.933	3.961	2.368	2.368

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk sektor kepariwisataan antara lain: 1) membangun sarana dan parasarana, akses serta sarana penunjang pada lokasi objek wisata; 2) melakukan promosi pariwisata; 3) mengikuti *expose* kepariwisataan nasional maupun internasional; dan 4) meningkatkan pemahaman masyarakat di sekitar lokasi objek wisata.

B. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sektor pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor jasa-jasa (termasuk jasa pariwisata) terhadap PDRB Kota Subulussalam pada tahun 2013. Berikut disajikan jumlah kontribusi pariwisata terhadap PDRB tahun 2009-2013 pada **Tabel 2.98**.

Tabel 2.98
Kontribusi Sektor Parawisata Terhadap PDRB
Kota Subulussalam Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Kontribusi Sektor Parawisata terhadap PDRB	159,79	169,45	176,99	188,29
Persentase (%)	0,06	0,06	0,06	0,06

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Kontribusi PDRB sub sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi memang sangat sedikit yakni hanya sebesar 0,06 persen mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Pertumbuhan Sub sektor ini akan meningkat jika Pemerintah Kota Subulussalam memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang keparawisataan.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional

atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.99**.

Tabel 2.99
Angka Konsumsi rata-rata Per kapita sebulan
di Kota Subulussalam Tahun 2010-2013 (Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013
Pengeluaran Rata-rata Per kapita sebulan (pangan)	219.737	279.785	278.333	302.386
Pengeluaran Rata-rata RT per kapita sebulan (Non pangan)	145.488	155.468	152.651	185.773
Jumlah Pengeluaran RT per kapita sebulan (pangan + non pangan)	365.225	435.253	430.984	488.159

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kota Subulussalam mencapai Rp. 488.159 terdiri dari bahan pangan sebesar Rp. 302.386 dan non pangan sebesar Rp. 185.773. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2012, dimana pada tahun tersebut pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita sebulan baik pangan maupun non pangan sebesar Rp. 430.984.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah

Salah satu hal yang penting tentang perkembangan wilayah adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah, *region*, ruang untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas yang baik juga akan mendorong minat swasta dan masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan wilayah. Dengan demikian akan memajukan kegiatan perekonomian masyarakat, dan dapat mengentaskan atau setidaknya dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang memiliki potensi sama atau berbeda.

2.4.2.2. Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Subulussalam tersaji pada **Tabel 2.100**.

Tabel 2.100
Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan di Kota Subulussalam
Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Panjang Jalan	610,66	619,59	619,59	764,39	764,39
Jlh. Kendaraan	2.368	2.787	4.426	1.957	1.456
Rasio	0,26	0,22	0,14	0,39	0,52

Sumber: Subulussalam dalam Angka Tahun 2014

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Tabel 2.100 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,26 ini berarti setiap panjang jalan 1 Km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 dan roda 2 sebanyak 3-4 kendaraan. Selanjutnya pada tahun 2013 panjang jalan 1 Km dapat diakses sebanyak 2 kendaraan.

2.4.2.3. Penataan Ruang

Penataan wilayah di Kota Subulussalam diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Subulussalam tahun 2014-2034. Salah satu bentuk penataan wilayah yang

diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan RTRW Kota Subulussalam tahun 2014-2034 rencana pemanfaatan lahan di Kota Subulussalam terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya seperti disajikan pada **Tabel 2.101** dan **Tabel 2.102**. Selanjutnya ketaatan terhadap dokumen RTRW di Kota Subulussalam belum dapat diidentifikasi karena RTRW baru ditetapkan pada Tahun 2014.

Tabel 2.101
Jenis dan Luas Kawasan Lindung di Kota Subulussalam
Tahun 2013

Kawasan Lindung		Luas (Ha)	Lokasi
1	Kawasan Hutan Lindung	19.275	Kampong bawan, pasir belo, darul Makmur dan Singgersing
2	Kawasan Perlindungan Setempat, terbagu dua:		
	a. Kawasan sempadan sungai	898,20	Sungai Lae soraya, lae batu-batu dan lae kombih
	b. Kawasan sekitar danau/waduk berupa sempadan danau lincir	43,09	Kampong Longkip
3	Kawasan Suaka alam dan cagar budaya, terbagi tiga :		
	a. Kawasan suaka alam berupa suaka marga stwa rawa singkil	3.144	
	b. Kawasan cagar budaya (kawasan bersejarah)	6	
	c. Kawasan taman hutan rakyat (TAHURA), yaitu Taman Hutan Raya Plasma Nutfah Kapur	1.692,75	Kedabuhan
4	Kawasan rawan bencana alam, terbagi dua:		
	a. Kawasan rawan longsor atau gerakan tanah	107.150,53	
	b. Kawasan rawan banjir	28.498,49	
5	Ruang terbuka hijau (RTH) kota, terbagi dua :		
	a. RTH public	2.471,68	27,68 persen dari luas kawasan terbangun
	b. RTH privat	892,92	10 persen dari luas wilayah terbangun

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Tabel 2.102
Jenis dan Luas Kawasan Budidaya di Kota Subulussalam Tahun 2013

Kawasan Budidaya		Luas (Ha)	Lokasi
1	Kawasan Perumahan	8.923,36	
2	Kawasan perdagangan dan Jasa	56,37	
3	Kawasan perkantoran	19,63	
4	Kawasan industry	260,45	
5	Kawasan pariwisata, terdiri dari :		
	a. Pariwisata sejarah budaya		
	b. Pariwisata alam		
	c. Pariwisata minat khusus		

Kawasan Budidaya		Luas (Ha)	Lokasi
6	Kawasan ruang terbuka non hijau		Tersebar diseluruh kecamatan
7	Kawasan ruang evaluasi bencana		Kawasan-kawasan pusat pelayanan yang didalamnya terdapat RTH dan non hijau perkotaan
8	Kawasan peruntukan ruang bagi kawasan informal	0,29	Meliputi kawasan pedagang kaki lima, kawasan kuliner dan kawasan khusus
9	Kawasan hutan produksi, terdiri dari tiga :		
	a. Kawasan hutan produksi tetap	9.591,34	
	b. Kawasan hutan produksi konversi	2.379,97	
	c. Kawasan hutan rakyat	781,38	
10	Kawasan Tanaman Pangan, terbagi dua:		
	a. Pertanian lahan basah	220,05	
	b. Pertanian lahan kering	27.206,53	
11	Kawasan hortikultura	67,81	Di seluruh kecamatan
12	Kawasan perkebunan, terdiri dari dua :		
	a. Kawasan perkebunan skala besar	19.562,13	
	b. Kawasan perkebunan rakyat	10.882,17	
13	Kawasan pertambangan, terbagi dua :		
	a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam berupa potensi biji besi	6.666,85	
	b. Kawasan peruntukkan pertambangan galian bahan konstruksi	32,81	
14	Kawasan pertahanan dan keamanan		Tersebar diseluruh kecamatan
15	Kawasan prasarana kota lainnya, meliputi :		
	a. Pengembangan prasarana pendidikan	49,62	
	b. Pengembangan prasarana kesehatan	7,77	
	c. Pengembangan prasarana peribadatan	4,38	
	d. Prasarana umum lainnya berupa pengembangan sistem proteksi kebakaran		Tersebar diseluruh kecamatan

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang antara lain: 1) sosialisasi dokumen RTRW Kota Subulussalam kepada masyarakat dan pihak swasta; 2) melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang; dan 3) melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

2.4.2.4. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya. Jenis dan jumlah bank di Kota Subulussalam selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat pada **Tabel 2.103**. Pada tahun 2009, jumlah bank di Kota

Subulussalam sebanyak 3 unit yang terdiri dari BRI sebanyak 2 unit dan BPD Aceh sebanyak 1 unit. Jumlah bank pada tahun 2013 meningkat menjadi 8 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di Kota Subulussalam semakin maju, dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi keuangan ke bank dan adanya kepercayaan dari perbankan yang melakukan investasi di Kota Subulussalam.

Tabel 2.103
Jenis dan Jumlah Bank di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013

Nama Bank	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bank BRI Kantor Cabang Pembantu	n/a	n/a	n/a	n/a	1
Bank BRI Unit Subulussalam	1	1	1	1	1
Bank BRI Unit Siaga	1	1	1	1	1
Bank BRI teras	n/a	n/a	n/a	n/a	1
PT. Bank Aceh Cabang Subulussalam	1	1	1	1	1
Bank Syari'ah Mandiri KCP Subulussalam	n/a	n/a	1	1	1
Bank BTPN MUR	n/a	n/a	n/a	n/a	1
Bank Danamon Simpan Pinjam	n/a	n/a	1	1	1
Jumlah	3	3	5	5	8

Sumber: Bappeda Kota Subulussalam, 2014

2.4.2.5. Rasio ketersediaan daya listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah memadai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Rasio ketersediaan daya listrik di Kota Subulussalam selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada **Tabel 2.104**.

Kebutuhan Energi Listrik Kota Subulussalam setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah kebutuhan energi listrik Kota Subulussalam pada Tahun 2009 sebesar 15.266.826 KWH menjadi 23.809.510 KWH di tahun 2013. Penyebab bertambahnya kebutuhan energi listrik ini adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, pelayanan sosial, bisnis, industri, kantor pemerintah dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Tabel 2.104
Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Subulussalam
Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Produksi Listrik (KWH)	39.917.980	27.053.760	25.287.900	27.628.660	30.069.320
Konsumsi Listrik (KWH)	15.266.826	15.250.357	18.841.498	22.199.244	23.809.510

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio	2,61	1,77	1,34	1,24	1,26

Sumber: Subulussalam dalam Angka, 2010-2014

Di sisi lain produksi listrik PLN Kota Subulussalam yang di suplay dari PLTA Sigurgura tiap tahunnya mengalami penurunan, berdasarkan data dari BPS (Subulussalam Dalam Angka Tahun 2013) produksi listrik tahun 2009 sebesar 39.917.980 KWh dan terus menurun hingga tahun 2011 menjadi sebesar 25.287.900 KWh, dan pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 30.069.320 KWH.

Bila mencermati ketersediaan daya listrik maka di perkirakan pada tahun 2015 produksi listrik yang ada sudah tidak mampu lagi memenuhi konsumsi listrik seluruh Kota Subulussalam. Perkiraan ini berdasarkan data perbandingan pertumbuhan konsumsi listrik dari tahun 2009 sampai tahun 2012 akan terjadi titik klimaksnya di tahun 2015 yakni mencapai 55.000.000 KWh. Jadi ini merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi pemerintah Kota Subulussalam Kedepan. Perbandingan konsumsi listrik (KWH) terhadap produksi listrik (KWH) dapat dilihat pada **Gambar 2.9**.

Gambar 2.9
Perbandingan Konsumsi Listrik (KWH) Terhadap Produksi Listrik (KWH)
Kota Subulussalam dan Perkiraanannya Tahun 2009 – 2019



Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi krisis daya listrik antara lain:

- 1) mencari alternatif lain dalam hal pemenuhan ketersediaan daya listrik daerah;
- 2) koordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Subulussalam;
- 3) mencari investor untuk berinvestasi di Kota Subulussalam pada sektor kelistrikan.

2.4.2.6. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Subulussalam periode tahun 2009-2013 dapat dilihat pada **Tabel 2.105**. Proporsi Rumah Tangga dengan akses listrik di Kota Subulussalam sudah mencapai 104,22 persen. Hal ini belum menunjukkan keseluruhan rumah tangga di Kota Subulussalam sudah teraliri listrik, masih ada dibagian pelosok desa di beberapa kecamatan rumah tangga yang belum menikmati listrik sekitar 2-3 persen dari keseluruhan jumlah rumah tangga. Besarnya persentase ini bisa jadi dikarenakan ada beberapa rumah tangga menggunakan listrik lebih dari 2 unit penggunaan, sehingga menunjukkan angka lebih dari 100 persen.

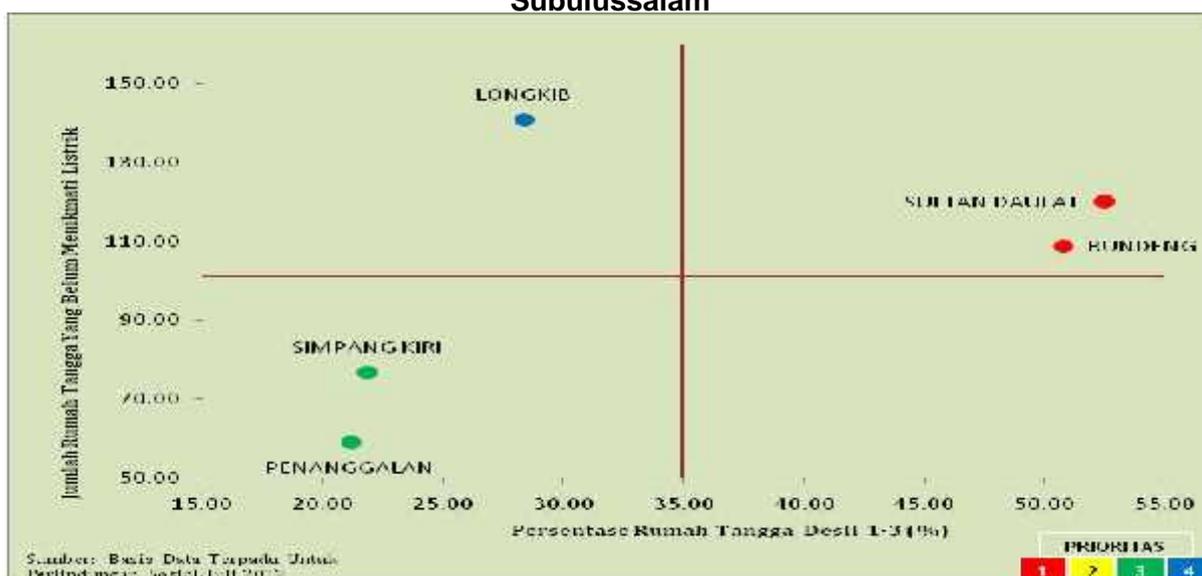
Tabel 2.105
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jlh. Rumah Tangga Menggunakan Listrik	11.063	11.797	13.250	14.785	16.123
Jumlah Rumah Tangga	14.123	14.453	14.784	15.152	15.469
Persentase (%)	78,33	81,62	89,62	97,57	104,22

Sumber: Subulussalam Dalam Angka, 2014

Kalau di analisa dengan membandingkan antara proporsi rumah tangga dengan akses listrik dan jumlah penduduk miskin desil 1-3 berdasarkan data dari basis data terpadu TNP2K seperti pada **Gambar 2.10**.

Gambar 2.10
Persentase Rumah Tangga Miskin Desil 1-3 (%) Terhadap Jumlah Rumah Tangga yang Belum menikmati Listrik Kota Subulussalam



Pada Kecamatan Sultan Daulat terdapat 120 rumah tangga yang belum menikmati listrik dengan persentase rumah tangga miskin desil 1-3 sebesar 52,51 persen dan di Kecamatan Rundeng terdapat 109 rumah tangga yang belum menikmati listrik dengan

persentase rumah tangga miskin desil 1-3 sebesar 50,77 persen. Hal ini menunjukkan penduduk yang belum menikmati listrik di kecamatan Sultan Daulat dan kecamatan Rundeng adalah penduduk miskin dengan tingkat kesejahteraannya di bawah 30 persen.

Sementara itu di Kecamatan Longkib, jumlah rumah tangga yang belum menikmati listrik sangat banyak berjumlah 141 rumah tangga, namun persentase rumah tangga miskin desil 1-3 hanya sebesar 28,35 persen. Hal ini menunjukkan besar kemungkinan banyaknya jumlah rumah tangga di Kecamatan Longkib yang belum menikmati listrik bukan disebabkan faktor kemiskinan namun disebabkan oleh jaringan instalasi listrik yang memang belum tersedia.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja: keamanan, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah dan peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha. Implementasi indikator-indikator tersebut dapat mendukung investasi dunia usaha di Kota Subulussalam. Beberapa jenis investasi yang ada di Kota Subulussalam adalah komoditas perkebunan (kelapa sawit), pertanian, perdagangan, wisata dan pertambangan.

Khusus dalam sektor perkebunan investasi yang dominan di Kota Subulussalam sampai saat ini meliputi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMD) dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), yang telah mendapatkan izin prinsip sebanyak sembilan belas perusahaan. Sedangkan yang sudah dikeluarkan izin hanya lima perusahaan.

Berkembangnya jenis investasi di sektor perkebunan, karena didukung oleh tersedianya industri hilir dalam bentuk pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) yang dihasilkan dari pabrik-pabrik yang ada di Kota Subulussalam. Hal inilah yang mendukung meningkatnya produksi sektor perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat. Selain sektor perkebunan, sektor perdagangan dan jasa juga berkembang pesat di Kota Subulussalam, sampai saat ini semakin banyak muncul pertokoan dan jasa layanan yang sifatnya komersil. Investasi di bidang pertambangan yang telah mendapatkan izin atau telah melaksanakan/memenuhi persyaratan terdapat 10 (sepuluh) perusahaan yang telah melakukan eksplorasi sebanyak 6 (enam) perusahaan, sedangkan perusahaan lainnya baru melakukan penyelidikan umum.

2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.4.1. Ketenagakerjaan

A. Rasio Lulusan Pendidikan Tertinggi Terhadap Jumlah Penduduk

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diterima. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas masyarakat setempat. Rasio kelulusan pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk di Kota Subulussalam selama periode tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.106**.

Tabel 2.106
Rasio Kelulusan Pendidikan Tinggi terhadap Jumlah Penduduk
di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jlh. Lulusan Diploma dan Sarjana	290	313	132	132
Jumlah Penduduk	67.446	68.990	70.707	72.414
Rasio 10.000 penduduk	4,29	4,53	1,86	1,82

Sumber: Subulussalam dalam Angka tahun 2010-2014

Rasio penduduk yang lulus diploma dan sarjana dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan banyak penduduk Kota Subulussalam yang telah menamatkan Diploma I/II/III sederajat dan Diploma IV/S1 melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

2.4.4.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kota Subulussalam 2009 – 2013 pada **Tabel 2.107**.

Tabel 2.107
Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif
di Kota Subulussalam Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	29.160	27.672	28.303	29.096	29.720
Jumlah Penduduk Usia > 64	1.705	1.365	1.398	1.392	1.452

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Usia Tidak Produktif <15 tahun + > 64 tahun	30.865	29.037	29.701	30.488	31.172
Jumlah Penduduk 15 – 64	37.863	38.409	39.289	40.219	41.242
Rasio Ketergantungan Total	81,52	75,60	75,60	75,80	75,58
Rasi Ketergantungan Muda	77,01	72,05	72,04	72,34	72,06
Rasio ketergantungan Tua	4,50	3,55	3,56	3,46	3,52

Sumber: Subulussalam dalam Angka (data diolah)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak Produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.107 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 76 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 75,80 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 72,34 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 3,46 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2012 penduduk usia kerja di Kota Subulussalam masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Tujuan akhir kegiatan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan secara adil dan merata kepada masyarakat. Kesejahteraan bukan merupakan warisan melainkan hasil usaha sumber daya manusia yang mengelola potensi sumber daya alam, mengatasi permasalahan pembangunan dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Kota Subulussalam untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global yang dipengaruhi faktor-faktor multidimensional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2015-2035.

Dalam konteks kekinian Kota Subulussalam memiliki keunggulan komparatif (kedudukan geografis, kekayaan sumber daya alam, populasi penduduk) yang belum dimanfaatkan secara maksimal. RTRW Aceh telah menetapkan Kota Subulussalam sebagai kawasan agroindustri di wilayah barat Aceh. Namun, produktivitas dan daya saing yang rendah untuk pengembangan agroindustri belum mampu diwujudkan. Dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat, beberapa isu strategis diuraikan sebagai berikut.

3.1. RENDAHNYA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

Isu strategis pembangunan Kota Subulussalam berkaitan dengan rendahnya indikator makro pembangunan yang tergambar dari tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta rendahnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Jumlah penduduk miskin Kota Subulussalam masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Isu pengangguran Kota Subulussalam hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan Kota Subulussalam saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri dan perdagangan. PDRB Kota Subulussalam masih rendah dan didominasi oleh sektor pertanian. Namun sektor pertanian belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam sehingga masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Pemertintah Aceh. Hal ini disebabkan oleh rendahnya nilai tambah

dari komoditi unggulan pertanian. Tantangan pembangunan pemerintah Kota Subulussalam adalah sebagai kawasan industri sesuai dengan rancangan RTRW Pemerintah Aceh. Selain itu, lambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam juga dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan potensi daerah seperti sektor pariwisata, sektor pertambangan (galian) dan pengembangan sektor ekonomi riil masyarakat.

3.2. PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH

Produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan yang rendah menjadi isu strategis Kota Subulussalam untuk mendukung pengembangan kawasan agroindustri. Tanaman pangan utama secara umum diantaranya adalah padi, jagung dan kedelai. Tanaman perkebunan adalah kepala sawit dan karet. Produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan utama dan tanaman perkebunan tersebut masih rendah sehingga berdampak terhadap rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP). Dukungan pemerintah untuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat skala kecil dan agroindustri skala sedang yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah sangat menentukan produktivitas masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

3.3. INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI

Infrastruktur yang terintegrasi mempunyai peran yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan pengembangan wilayah sebagaimana yang telah direncanakan RTRW Kota Subulussalam. Infrastruktur jalan dan jembatan belum optimal untuk mendukung daya saing daerah. Di sisi lain, sarana dan prasarana transportasi belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah terutama terkait dengan kondisi kinerja pelayanan, keselamatan transportasi, integrasi antar moda transportasi dan pengembangan sistem transportasi massal. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya air yang tersedia belum optimal untuk mendukung kebutuhan air baku dan sumber daya energi alternatif, pelayanan sanitasi layak, pengelolaan sampah, rumah tidak layak huni serta kelistrikan.

Infrastruktur yang terintegrasi juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Kota Subulussalam secara regional dan nasional serta mengatasi kesenjangan antar wilayah terutama antara sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar kecamatan dan wilayah pusat perkotaan dengan wilayah yang jauh dari kawasan perkotaan.

Selanjutnya, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah regional Subulussalam maupun diluar wilayah agar semakin kuat. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur energi perlu ditingkatkan melalui pembangunan

jaringan listrik pedesaan serta pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan.

3.4. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi penentu keberhasilan pembangunan Kota Subulussalam. Dalam hal ini, pendidikan dan kesehatan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Secara umum, tingkat pendidikan di Kota Subulussalam masih relatif rendah. Pemerintah daerah belum menerapkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Tenaga pendidik dan distribusinya serta sebaran fasilitas sekolah belum merata. Mutu lulusan sekolah menengah atas masih rendah sehingga jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri masih terbatas. Ketersediaan sekolah kejuruan masih terbatas untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Isu strategis di bidang kesehatan tergambar dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat Kota Subulussalam. Hal ini disebabkan oleh fasilitas kesehatan belum memadai, rendahnya kualitas tenaga kesehatan dan rendahnya pelayanan kesehatan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3.5. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Kualitas pelayanan publik yang rendah juga menjadi isu strategis Kota Subulussalam. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal ini, organisasi pemerintahan yang ideal dan sumberdaya aparatur profesional merupakan penentu kualitas pelayanan publik. Struktur organisasi pemerintahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan penempatan sumberdaya aparatur yang tepat serta memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mempertimbangkan pengarusutamaan gender.

3.6. BUDAYA KREATIF INOVATIF

Isu strategis budaya kreatif inovatif masyarakat Kota Subulussalam menjadi penentu untuk mewujudkan kesejahteraan. Budaya belajar seumur hidup harus terus digalakkan dan diarahkan agar mencapai hasil yang bermanfaat. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Kota Subulussalam menguasai iptek untuk mendukung kawasan agroindustri serta mampu menjawab tantangan pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif

dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif yang mempertimbangkan kearifan lokal.

3.7. KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Secara geografis Kota Subulussalam berada pada Patahan Semangko yang rawan terhadap bencana seperti: gempa bumi, gunung api. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Demikian juga, tingkat kerusakan lahan dan hutan yang terjadi semakin tidak terkendali yang akan menyebabkan bencana dimasa yang akan datang berupa bencana kekeringan atau banjir. Hal ini, memerlukan penanganan serius berkaitan dengan topografi Kota Subulussalam yang berbukit dengan sebagai daerahnya masuk kedalam wilayah Kawasan Ekosistem Leuser.

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015-2035

4.1. VISI

Berdasarkan kondisi kekinian dan isu strategis yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki Kota Subulussalam, visi pembangunan Kota Subulussalam 2015-2035 adalah:

“KOTA SUBULUSSALAM YANG DAMAI, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN ISLAMI”

Visi pembangunan Kota Subulussalam tahun 2015 - 2035 adalah kondisi Kota Subulussalam yang diharapkan Damai, Mandiri, Sejahtera dan Islami sebagaimana tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Damai adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia untuk memenuhi hak dasar terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya dengan baik serta memiliki rasa aman. Damai merupakan kondisi dalam masyarakat yang tidak mengalami konflik pada komunitasnya dan hidup secara selaras serasi seimbang.

Mandiri adalah kondisi masyarakat Kota Subulussalam yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya dan menyelesaikan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Aceh.

Sejahtera adalah sebuah kondisi masyarakat Kota Subulussalam yang berpenghasilan cukup, berpendidikan, sehat, memiliki lapangan usaha yang layak, terbebas dari kemiskinan serta memiliki kepedulian dalam aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik serta pertahanan keamanan.

Islami adalah kondisi masyarakat Kota Subulussalam yang menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam serta memiliki karakter dan akhlak mulia, mencintai perdamaian, memiliki ketahanan dan daya juang tinggi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

4.2. MISI

Dalam mewujudkan visi Kota Subulussalam tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan Kota Subulussalam sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Kota Subulussalam yang Demokratis, Aman, Damai, Bersatu dan berlandaskan hukum adalah** memantapkan budaya demokrasi dalam masyarakat;

memperkuat partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil; menjamin kebebasan media secara bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; menjaga keutuhan wilayah; melestarikan perdamaian secara berkelanjutan; menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek; memperkuat persatuan; dan menegakkan hukum secara konsekuen, adil dan tidak diskriminatif.

- 2. Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Hidup dan Memiliki Daya Saing** adalah membangun masyarakat mandiri dan memiliki daya saing berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; memanfaatkan potensi sumber daya yang didukung regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; menyediakan infrastruktur yang memadai; menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif; mengembangkan aneka ragam kekayaan budaya dan menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- 3. Mewujudkan pembangunan yang Berkualitas, Adil dan Merata berbasis lingkungan** adalah meningkatkan kualitas pelayanan berbagai aspek pembangunan untuk mengurangi kesenjangan (disparitas) sosial ekonomi secara menyeluruh; memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah; melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang; meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 4. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami** adalah membangun sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa; memelihara kerukunan antar umat beragama; memelihara nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota tahun 2015-2035 adalah mewujudkan Kota Subulussalam yang Damai, Mandiri, Sejahtera, dan Islami. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan sasaran-sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

5.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

5.1.1. Terwujudnya Kota Subulussalam yang Demokratis, Aman, Damai, Bersatu dan berlandaskan hukum dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Terciptanya budaya demokrasi dalam masyarakat
- b. Terciptanya partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan;
- c. Terjaminnya kebebasan pers secara bertanggung jawab
- d. Terjaganya keutuhan wilayah dan melestarikan perdamaian secara berkelanjutan
- e. Terciptanya keadilan dalam berbagai aspek pembangunan
- f. Terciptanya persatuan masyarakat dalam pembangunan; dan
- g. Terjaminnya penegakan hukum secara konsekuen, adil dan tidak diskriminatif.

5.1.2. Terwujudnya Masyarakat yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Hidup dan Memiliki Daya Saing dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Terciptanya masyarakat mandiri dan memiliki daya saing berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Terciptanya nilai tambah sumber daya alam untuk mendukung pembangunan
- c. Tersedianya regulasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif;
- d. Tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan;
- e. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan produktif sesuai dengan kebutuhan pasar;
- f. Terpeliharanya keanekaragaman budaya dalam masyarakat;
- g. Terciptanya lapangan kerja untuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

5.1.3. Terwujudnya pembangunan yang Berkualitas, Adil dan Merata berbasis lingkungan yang dicirikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terciptanya kualitas pelayanan berbagai aspek pembangunan untuk mengurangi kesenjangan (disparitas) sosial ekonomi secara menyeluruh;
- b. Terbangunnya struktur perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah;

- c. Terciptanya pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang;
- d. Terciptanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

5.1.4. Terwujudnya masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami yang dicirikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terciptanya sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa;
- b. Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama;
- c. Terpeliharanya nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat

5.2. ARAH KEBIJAKAN

5.2.1. Mewujudkan Kota Subulussalam yang Demokratis, Aman, Damai, Bersatu dan berlandaskan hukum.

1. Pemantapan budaya demokrasi dalam masyarakat dilakukan dengan: mempromosikan dan menyosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah regulasi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan; menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat secara formal dan informal; meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik; dan menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat menuju masyarakat madani yang kuat. Di samping itu, penataan peran masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata sosial kemasyarakatan, kearifan lokal, dan lembaga adat untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan. Dalam ranah politik, penguatan peran masyarakat diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik.

3. Peningkatan kebebasan pers yang bertanggung jawab diarahkan untuk: mencerdaskan masyarakat dalam pembangunan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan berlandaskan hukum; meningkatkan jangkauan dan pemerataan informasi dengan mendorong munculnya media massa daerah yang independen; menciptakan jaringan dan teknologi informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik dalam menciptakan dan mensosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas; meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.
4. Penciptaan keutuhan wilayah dan pelestarian perdamaian secara berkelanjutan dilakukan dengan: keterpaduan penegakan hukum yang adil, tegas dan bijaksana dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan budaya lokalita; merekatkan kembali struktur masyarakat sehingga kohesi sosial, ekonomi dan politik terjadi secara baik; peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perdamaian secara berkelanjutan.
5. Penciptaan keadilan dalam berbagai aspek pembangunan dilakukan dengan cara: sinergisitas pembangunan yang saling mendukung berdasarkan potensi wilayah, pengurangan disparitas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata;
6. Penciptaan persatuan masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan cara: Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perdamaian; mengurangi resiko konflik akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak merata.
7. Penegakan hukum secara konsekuen, adil dan tidak diskriminatif dilakukan dengan cara: hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan yang bersumber dari hukum nasional dan daerah; Penciptaan masyarakat yang berbudaya hukum dilaksanakan melalui pendidikan secara formal dan informal; dan pemberian akses kepada masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dan akses terhadap proses pengambilan keputusan; Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan dengan tidak memandang suku, agama, ras dan antar golongan berdasarkan hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran. Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) secara konsisten dan non-diskriminatif juga ditujukan agar

terdapat kepastian hukum untuk menjamin kedudukan yang sama dihadapan hukum dan memberikan iklim yang kondusif bagi investasi.

5.2.2. Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Memenuhi Kabutuhan Hidup dan Memiliki Daya Saing

1. Penciptaan masyarakat mandiri dan memiliki daya saing berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan cara: Pembangunan sumberdaya manusia harus mengarah pada peningkatan kualitas manusia sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan; Peningkatan kualitas pendidikan diarahkan agar sumberdaya manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi serta berakhlak mulia berdasar nilai-nilai islami yang kaffah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berharkat, bermartabat dan mampu bersaing di era global;
2. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam untuk mendukung pembangunan dilakukan dengan cara: menumbuh kembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan yang menyerap tenaga kerja terutama di wilayah perdesaan; pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi; pengembangan teknologi pengolahan yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah; dan pengembangan kelembagaan, pemasaran dan infrastruktur pendukung yang mendorong daya saing komoditas andalan di pasar nasional dan internasional.
3. Penciptaan regulasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif dilakukan dengan cara: menyusun regulasi yang mendukung investasi sehingga dapat menarik penanaman modal dalam negeri dan asing dan berpihak sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.
4. Penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan dilakukan dengan cara: pengembangan infrastruktur yang membuka isolasi wilayah; meningkatkan indeks pelayanan transportasi di wilayah perdesaan, tertinggal dan terpencil, dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi pertanian dan industri dengan kawasan koleksi dan distribusi serta meningkatkan aksesibilitas informasi, aktifitas perdagangan barang maupun jasa secara lokal, regional dan internasional; pembangunan energi listrik, air dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
5. Penciptaan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif sesuai dengan kebutuhan pasar dilakukan dengan cara: peningkatan kapasitas lembaga *Vocasional Training* dan balai latihan kerja; peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan

kreatif yang berdaya saing di pasar domestik maupun manca negara; mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha; peningkatan kompetensi kewirausahaan dan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar; penerapan hasil inovasi dan teknologi dalam iklim usaha yang sehat; pengembangan UKM yang terintegrasi dalam bentuk agribisnis.

6. Pelestarian keanekaragaman budaya dalam masyarakat dilakukan dengan cara: memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, adat, budaya lokalita yang islami dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sehingga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Subulussalam.
7. Penciptaan lapangan kerja untuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan cara: menggerakkan sektor riil yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan revitalisasi pertanian dan perdesaan; meningkatkan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; mengembangkan modal sosial (*social capital*) dan modal manusia (*human capital*) yang belum tergali potensi khususnya di kawasan perdesaan; intervensi harga yang berpihak kepada produk pertanian; menguatkan struktur perekonomian dengan menempatkan sektor industri sebagai penggerak utama untuk menciptakan nilai tambah sektor pertanian dengan pengembangan sektor komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktifitas sub sektor perkebunan, menghidupkan usaha perternakan dari hulu ke hilir, memanfaatkan potensi perikanan serta pengelolaan hutan secara lestari dengan mengoptimalkan manfaat hutan sesuai fungsinya, dengan berorientasi kepada penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK.

5.2.1. Mewujudkan pembangunan yang Berkualitas, Adil dan Merata berbasis lingkungan

1. Peningkatan kualitas pelayanan berbagai aspek pembangunan untuk mengurangi kesenjangan (disparitas) sosial ekonomi secara menyeluruh dilakukan dengan cara: peningkatan kualitas sumberdaya manusia difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lingkungan serta didukung kondisi sosial, politik dan keamanan yang tertib, aman, nyaman dan demokratis.
2. Pembangunan struktur perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah dilakukan dengan cara: pembangunan infrastruktur harus membuka isolasi wilayah, meningkatkan indeks pelayanan transportasi khususnya di wilayah perdesaan, tertinggal dan terpencil, dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi pertanian dan industri dengan kawasan koleksi dan distribusi serta meningkatkan aksesibilitas informasi, aktifitas perdagangan barang maupun jasa

secara lokal, regional dan internasional; lembaga jasa keuangan bank dan non bank serta swasta dalam pendanaan pembangunan secara adil dan merata; mendukung peningkatan kelembagaan jasa non perbankan sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang dilakukan dengan cara: meningkatkan fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; meningkatkan akses pelayanan secara merata di seluruh aspek pembangunan daerah; pengelolaan sumberdaya alam diarahkan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan; pengelolaan dan konservasi potensi sumberdaya air; pemanfaatan dan pengelolaan struktur dan pola ruang yang serasi; pelestarian fungsi dan potensi keanekaragaman hayati sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan; penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
4. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dilakukan dengan cara: penerapan konsep mitigasi dalam manajemen penanganan bencana; menata pola dan struktur ruang yang tepat dengan memperhatikan kawasan rawan bencana; menerapkan sistem peringatan dini melalui penyebaran informasi yang efektif kepada masyarakat; pembangunan berbagai prasarana fisik dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; mengintegrasikan mitigasi bencana dalam proses pembangunan melalui sinkronisasi kondisi sosial, budaya, serta ekonomi daerah; Mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana; pelaksanaan drill kebencanaan secara berkala; peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat bersama pemerintah untuk siap dan tanggap menghadapi bencana yang berbasis pada pengurangan risiko bencana.

5.2.2. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami

1. Menciptakan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa dilakukan dengan cara: menerapkan pendidikan Islami melalui institusi pendidikan formal dan non formal, dengan tujuan membentuk generasi penerus yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan memiliki daya saing; Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan standar pendidikan yang berbasis nilai islami yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan jumlah dan kualitas guru mata pelajaran yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama

dalam mata pelajaran keilmuan lainnya, peningkatan kapasitas penyelenggara pendidikan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan; Penguatan dan pemantapan peran keluarga, masyarakat, lingkungan sosial kemasyarakatan, ulama dan umara dalam membentuk karakter masyarakat yang Islami; peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah berdasarkan nilai-nilai Islami, penegakan hukum dan tertib sosial yang konsisten melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi; peningkatan kualitas kehidupan beragama diarahkan pada peningkatan dan pengelolaan fungsi sarana ibadah, peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan dana sosial keagamaan (zakat, infaq, dan sedekah), serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan; pengembangan dan pemantapan peran Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan hukum Islam di Aceh untuk menciptakan pelayanan hukum sesuai azas peradilan yang tepat, cepat, sederhana dan biaya ringan; pelaksanaan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan terutama dalam pelaksanaan hukum, pendidikan, kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, tatanan politik, pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik dan informasi media massa harus sesuai dengan tuntunan Islam.

2. Menciptakan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan cara: Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat perlu dikembangkan secara berkelanjutan sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang damai dan harmoni dengan memelihara kerukunan antar individu, kelompok, dan umat beragama; interaksi antar budaya serta nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan; Pemantapan kapasitas dan kredibilitas pemerintah, lembaga-lembaga politik dan demokrasi, pranata-pranata lokal/adat serta media massa, dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator atau mediator untuk menanggulangi dan mencegah konflik; Pembentukan dan peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui cara-cara damai, peningkatan dialog dan koordinasi antar umat beragama dan antar instansi/lembaga pemerintah, melakukan penyempurnaan dan penegakan hukum serta peraturan perundangan.
3. Pemeliharaan nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat dilakukan dengan cara: mendorong pelestarian, pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat islami yang memiliki jatidiri dan berketahanan budaya yang mampu mendorong pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

6.1. TAHAPAN PELAKSANAAN

Untuk mencapai visi, misi dan sasaran RPJP Kota Subulussalam 2015-2025 sebagaimana dimaksud sebelumnya, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran dalam empat misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritas utama dalam masing-masing tahapan. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Uraian tentang tahapan dan skala prioritas utama pembangunan Kota Subulussalam sebagai berikut.

6.1.1. Tahapan Pembangunan ke-1 (2015 – 2020) (MDG's, Produksi dan Produktivitas)

Periode pertama pembangunan Kota Subulussalam difokuskan untuk mencapai target-target tujuan pembangunan millenium (MDG's) dan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan yang mendukung pengembangan agroindustri di Kota Subulussalam. Tujuan MDG's di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, lingkungan dan kebencanaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum diharapkan dapat tercapai pada tahun 2020. Selanjutnya, produksi dan produktivitas komoditas unggulan seperti: kelapa sawit dan karet dapat meningkat secara optimal. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur pendukung, input teknologi dan pemasaran hasil komoditas unggulan menjadi kunci untuk penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan penyuluh melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang bekerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat menjadi modal dasar untuk penciptaan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar sejalan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai pada tahun 2015. UMKM dan Koperasi aktif semakin berkembang dan mandiri untuk penyediaan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Pada tahapan pembangunan pertama ini diharapkan PDRB meningkat dari 5,0 – 6,0 persen, angka kemiskinan 18-20 persen, dan tingkat pengangguran 7-9 persen.

Penekanan pembangunan infrastruktur dalam periode pertama adalah peningkatan sistem transportasi dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran,

peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan, peningkatan akses jaringan air bersih dan sanitasi, dan pemantapan di sektor perumahan yang mengedepankan penyediaan rumah layak huni secara mandiri yang memenuhi standar kesehatan.

Pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDG's) yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan pengendalian penyakit menular serta menurunkan beban ganda kesehatan.

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan pada berbagai jenjang dilakukan dengan mengupayakan penyempurnaan kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana pendukung pendidikan (pustaka, laboratorium, dan mushalla), peningkatan kompetensi/profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik, meningkatkan kerjasama dengan berbagai stake holders pendidikan serta upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Prioritas pendidikan menengah melalui pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan sesuai dengan kebutuhan dan realitas dunia kerja. Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0–6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun non formal. Pelaksanaan konsep pendidikan Islami di seluruh institusi pendidikan dengan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan standar pendidikan yang berbasis nilai Islami serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lokal, nasional dan global. Upaya percepatan implementasi sistem pendidikan Islami juga telah dikuatkan dengan tersedianya landasan hukum yang dapat menjadi pedoman bagi sekolah dan institusi terkait serta peningkatan kuantitas dan kualitas guru yang dapat mengimpelementasikan nilai Islami dalam mata pelajaran. Mendorong terciptanya pemerataan kesempatan dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi; mendorong terciptanya kerjasama yang sinergis antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha sehingga hasil kajian dan riset dapat dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan.

Prioritas kesehatan ditujukan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh SDM dan fasilitas kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimum serta tersebar secara merata dan proporsional. Selain itu, upaya pencapaian tujuan MDGs yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak; pencegahan penyakit menular; serta masalah kesehatan lingkungan tetap menjadi prioritas.

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan

anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Pembangunan di bidang sosial dan budaya ditujukan untuk meningkatkan modal sosial (*social capital*) dalam masyarakat untuk mendukung industrialisasi pertanian berbasis perdesaan. Rasa saling percaya dalam masyarakat harus dibangun dengan merevitalisasi kearifan budaya local melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas (*community-based*) sehingga proses industrialisasi mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Modal sosial yang kuat dalam masyarakat juga membentuk iklim investasi yang baik. Demikian juga pembangunan sosial ditujukan untuk menjamin hak-hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dalam bidang syariat Islam, semakin menguatnya lembaga-lembaga pelaksana Syariat Islam seperti Mahkamah Syar'iah, Baitul Maal, dan Wilayatul Hisbah serta makin baiknya pengintegrasian Syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan terutama dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Pembangunan menuju masyarakat yang Islami juga ditandai dengan tercapainya tertib sosial, kerukunan dan harmonisasi dalam masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, meningkatnya profesionalisme aparatur, serta peningkatan pelayanan publik untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Peningkatan kualitas lingkungan dititik-beratkan pada penyediaan informasi sumberdaya alam dan lingkungan, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan dan menjalankan rencana penataan ruang sebagai suatu keinginan dan harapan dalam penggunaan ruang dengan ekosistem sebagai pola dan struktur ruang yang diarahkan sesuai dengan konteks lingkungan, ekonomi dan sosial budaya sebagai suatu kesatuan unit ekosistem.

Pembangunan di bidang kebencanaan difokuskan pada peningkatan peran, kapasitas dan kelembagaan masyarakat dan pemerintah guna memaksimalkan upaya pengurangan risiko bencana dalam hal kemampuan penilaian bahaya, peringatan dini, dan persiapan menghadapi bencana.

Pengelolaan sumber daya hutan diarahkan pada pengembangan wana tani (*agroforestry*) dan pemanfaatan jasa lingkungan seperti pariwisata alam (*eco-tourism*) dan hasil hutan non-kayu. Penyusunan sejumlah aturan dan regulasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian hutan.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat optimal melalui penyediaan regulasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Kondisi keamanan yang semakin mantap memelalui penegakan hukum secara konsekuen, adil, tidak diskriminatif dan transparan menjadi modal untuk menarik minat investor. Dari sisi sosial, budaya dan keagamaan,

sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa semakin membaik yang dicirikan dengan kerukunan antar umat beragama, nilai-nilai dan keanekaragaman budaya yang berkembang di dalam masyarakat tetap terjaga. Demikian juga pembangunan yang berwawasan lingkungan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana merupakan target dalam pembangunan kota Subulussalam.

6.1.2. Tahapan Pembangunan ke-2 (2020 – 2025) (SDG's dan Agroindustri)

Tahap pembangunan ke-2 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap pertama. Fokus pembangunan pada tahap ke-2 adalah pengembangan agroindustri melalui peningkatan nilai tambah komoditas unggulan kelapa sawit dan karet serta sumber daya alam lainnya. Kemitraan perusahaan swasta dengan masyarakat yang dimediasi pemerintah menjadi kunci keberhasilan untuk mengembangkan agroindustri. BLK dan SMK menjadi lebih profesional untuk menyediakan SDM terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan tuntunan MEA. UMKM dan Koperasi aktif semakin mandiri melalui pendampingan oleh perusahaan mapan dan pemerintah. Di samping itu, kelanjutan MDG's yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDG's) menjadi target pembangunan Kota Subulussalam. Pada tahapan pembangunan kedua ini diharapkan PDRB meningkat dari 6,0 - 6,5 persen, angka kemiskinan 16-17 persen, dan tingkat pengangguran 6-7 persen.

Pemantapan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, sistem transportasi darat yang semakin baik mendukung aktifitas ekonomi yang mengarah pada pemantapan kondisi perekonomian yang berbasis agroindustri dimana arus pergerakan orang, barang, dan jasa lebih difokuskan pada aktifitas pabrikasi dan kegiatan ekspor. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sudah membaik seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk kegiatan industri dan pertanian dengan tetap memperhatikan upaya pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan untuk mempertahankan fungsi dan daya dukungnya terhadap peningkatan aktifitas ekonomi. Memperkuat sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika melalui pengembangan iptek dan peningkatan daya saing perlu dilakukan dalam rangka mendukung aktifitas perekonomian dan dunia usaha.

Aktifitas ekonomi yang berbasis pada agroindustri dijalankan dengan tetap memperhatikan keserasian lingkungan tanpa menghambat kemajuan, salah satunya melalui penerapan imbal jasa lingkungan oleh pelaku dunia usaha, hingga penerapan sanksi hukum bagi pelaku pengrusakan terhadap lingkungan. Pengembangan industri diarahkan untuk meningkatkan nilai ekspor hasil agroindustri, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan menunjang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan wisata, energi dan sumberdaya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Pembangunan dibidang ekonomi ditujukan untuk lebih memantapkan pengembangan agroindustri yang berbasis kepada keunggulan sumberdaya alam yang tersedia dan teknologi yang semakin berkembang. Industri dan perdagangan diupayakan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (*networking*), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antar industri, dan peningkatan tumbuhnya industri masa depan sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi semakin kompetitif dengan semakin terpadunya antara industri manufaktur dengan agro industri yang didukung oleh infrastruktur yang handal.

Agro industri yang dikembangkan harus diikuti dengan pemantapan kualitas untuk merespons setiap tuntutan konsumen, pada tahap ini diperlukan: pengelolaan kualitas rantai produksi (*supply chain management*) yang efektif dan efisien; budaya kualitas dan merk; sertifikasi dan standisasi produk; respons terhadap upaya mencapai kepuasan konsumen; kelembagaan penunjang yang efisien; membangun kemitraan untuk membuka jejaring perdagangan nasional dan internasional sesuai dengan tuntutan MEA.

Pembangunan bidang pendidikan telah semakin baik yang antara lain ditandai oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing, meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; serta meningkatnya kemampuan Iptek. Pada periode ini diprioritaskan pengembangan institusi pendidikan yang memiliki standar internasional sehingga dapat bersaing secara global.

Pengembangan pendidikan menengah kejuruan juga diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global (MEA). Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional.

Prioritas kesehatan ditujukan pada reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Dalam bidang pelaksanaan syariat Islam, seluruh komponen masyarakat telah mampu mengimplementasikan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan sehingga menciptakan kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

6.1.3. Tahapan Pembangunan ke-3 (2025 – 2030) (SDG's, Agroindustri, Manufacture)

Tahap pembangunan ke-3 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap ke dua. Pada tahap ini, Kota Subulussalam menitikberatkan pembangunannya untuk mencapai target SDG's, pengembangan Agroindustri dan melangkah menuju pembangunan manufacture berbasis sumberdaya alam unggulan. Pada tahapan pembangunan ketiga ini

diharapkan PDRB meningkat dari 6,5 - 7,5 persen, angka kemiskinan 13-15 persen, dan tingkat pengangguran 5-6 persen.

Infrastruktur jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, sistem transportasi darat yang semakin mantap yang mendukung aktifitas ekonomi berbasis agroindustri dan manufacture. Penyediaan infrastruktur sudah memadai untuk mendukung kegiatan agroindustri dan manufacture yang berwawasan lingkungan. Sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika sudah tersedia untuk mendukung aktifitas perekonomian dan dunia usaha sesuai tuntutan MEA.

Pengembangan agroindustri dan industri manufacture diarahkan untuk meningkatkan nilai nilai tambah, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan sector wisata, energi dan sumberdaya mineral telah berkembang secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan. Industri dan perdagangan diupayakan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (networking), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antar industri, dan peningkatan tumbuhnya industri masa depan sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi semakin kompetitif dengan semakin terpadunya antara industri manufaktur dengan agro industri yang didukung oleh infrastruktur yang handal. Pengelolaan kualitas rantai produksi (supply chain management) berjalan secara efektif dan efisien; budaya kualitas dan merk semakin tumbuh; sertifikasi dan standarisasi produk menjadi kebutuhan; kepuasan konsumen semakin meningkat; kemitraan untuk perdagangan nasional dan internasional semakin meningkat sesuai dengan tuntutan MEA.

Pembangunan bidang pendidikan telah menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Institusi pendidikan pada tahap ini diharapkan sudah memiliki standar nasional dan internasional sehingga dapat bersaing secara global. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global (MEA), sudah mulai berkembang. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional sudah diimplementasikan.

Reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional sudah terlaksana.

Dalam bidang pelaksanaan syariat Islam, seluruh komponen masyarakat tetap mengimplementasikan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan sehingga menciptakan kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

6.1.4. Tahapan Pembangunan ke-4 (2030 – 2035) (Agroindustri, Manufacture, dan Knowledge Based Economy)

Tahapan pembangunan ke empat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Kota Subulussalam yang damai, mandiri, sejahtera dan Islami.

Prioritas pembangunan pada periode ke-empat difokuskan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah. Pada akhir tahapan pembangunan ke-4, pertumbuhan PDRB diharapkan mencapai 7,5-8,5 persen, tingkat kemiskinan menjadi 10-13 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 4-5 persen.

Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kota Subulussalam, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat dari dan ke wilayah Kota Subulussalam.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran tentang komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (*added values*) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan UKM dan Swasta Nasional dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di level nasional dan internasional serta mengembangkan kluster agro industri dan industri manufaktur.

Pembangunan sumber daya manusia difokuskan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu ber-inovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai Islami dalam rangka mendukung pengembangan industri kreatif.

Pembangunan sumber daya manusia akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional. Bidang pemerintahan, prioritas pembangunan pada tahap ini difokuskan pada pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang dapat menstimulasi investasi, menciptakan dan mengembangkan e-government sebagai sarana peningkatan layanan publik.

Penegakan hukum diarahkan pada terciptanya kelembagaan politik dan hukum yang kuat, terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; dan terwujudnya rasa aman

dan damai bagi seluruh masyarakat. Bidang keagamaan, pembangunan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap rukun dan harmonis antar individu, dan antar kelompok masyarakat serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Pada periode ini, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat sudah semakin meningkat. Pembangunan kesehatan ditekankan pada peningkatan kapasitas sumberdaya kesehatan dan pelayanan yang handal sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Upaya yang di tempuh diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, kelompok ataupun komunitas masyarakat. Pada tahap ini kelompok penyandang masalah sosial yang rentan karena keterbatasan fisik dan mental harus menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Subulussalam untuk membina dan memberikan kehidupan layak sesuai dengan azas kemanusiaan yang dijamin undang-undang.

Pembangunan budaya dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat sebagai bagian unsur utama pembentuk identitas dan jati diri yang menjadi karakter yang tangguh. Keberhasilan dalam membentuk karakter budaya ini ditandai dengan semakin meningkatnya budaya santun, jujur, ramah, memiliki rasa malu dan sadar lingkungan.

6.2. PRINSIP KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Subulussalam Tahun 2015-2035 merupakan pedoman pembangunan Subulussalam yang mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJP Subulussalam Tahun 2015-2035 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Subulussalam. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Kota Subulussalam dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Subulussalam dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon wali kota dan wakil wali kota Kota Subulussalam harus mempedomani RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 dalam menyusun visi dan misi daerah.
2. Pemerintah Kota Subulussalam melalui Bappeda Kota Subulussalam perlu menyebarluaskan dokumen RPJP Kota Subulussalam kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota melalui Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam dan partai-partai politik di wilayah Kota Subulussalam sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun dapat

dilaksanakan dan selaras dengan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam terpilih dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Subulussalam yang berpedoman pada RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035.
4. RPJP Subulussalam Tahun 2015-2035 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kota Subulussalam. Untuk menjamin konsistensi antara RPJP Subulussalam Tahun 2015-2035 dengan RPJM Kota Subulussalam, Bappeda Kota Subulussalam berkewajiban melakukan evaluasi terhadap rancangan akhir RPJM Kota Subulussalam.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam (SKPK) dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan yang termaktub dalam RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 dengan sebaik-baiknya.
6. Dalam rangka implementasi RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam berkewajiban untuk melakukan penjabaran RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 ke dalam Kota RPJM Subulussalam.

6.3. MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.3.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Subulussalam

Mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 meliputi:

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam.
2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035.
3. Pemantauan dan supervisi RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Kota Subulussalam.
4. Hasil pemantauan dan supervisi RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam, telah dilaksanakan melalui RPJM Kota Subulussalam.

5. Kepala Bappeda Kota Subulussalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda Kota Subulussalam melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
6. Kepala Bappeda Kota Subulussalam melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 kepada Wali Kota Subulussalam.

6.3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam

Mekanisme evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam meliputi:

1. Evaluasi terhadap hasil RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam.
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035.
3. Penilaian digunakan untuk mengetahui;
 - a. Realisasi antara sasaran pokok RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 dengan capaian sasaran RPJM Subulussalam;
 - b. Realisasi antara capaian sasaran pokok RPJP Subulussalam Tahun 2005-2035 dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
4. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
5. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJM Kota Subulussalam.
6. Kepala Bappeda Kota Subulussalam melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJP Subulussalam Tahun 2015-2035. Dalam hal evaluasi jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda Subulussalam melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
7. Hasil evaluasi RPJP Subulussalam Tahun 2015-2035 digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJP Kota Subulussalam untuk periode berikutnya.
8. Kepala Bappeda Subulussalam melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJP Subulussalam tahun 2015-2025 kepada Wali Kota Subulussalam.
9. Wali Kota Subulussalam menyampaikan laporan kepada Gubernur Aceh.

BAB VII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015 –2035 yang memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

RPJP Kota Subulussalam ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Subulussalam 20 tahun, menjadi acuan di dalam penyusunan RPJM Kota Subulussalam dan pedoman bagi calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Subulussalam dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Keberhasilan pembangunan Kota Subulussalam dalam mewujudkan visi **Kota Subulussalam yang Damai, Mandiri, Sejahtera dan Islami** perlu didukung oleh :(1) komitmen dari kepemimpinan Kota Subulussalam yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah kota; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

WALIKOTA SUBULUSSALAM



MERAH-SAKTI